

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN - 2018

PROSPEKTUS

JADWAL		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	10 Oktober 2018
Tanggal Efektif	:	28 Desember 2018
Tanggal Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		
- Di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	9 Januari 2019
- Pasar Tunai	:	11 Januari 2019
Tanggal Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:		
- Pasar Regular dan Negosiasi	:	10 Januari 2019
- Pasar Tunai	:	14 Januari 2019
Tanggal Akhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD	:	11 Januari 2019
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	14 Januari 2019
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI")	:	15 Januari 2019
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI	:	15 - 21 Januari 2019
Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Pemesanan Saham (Periode Pelaksanaan)	:	15 - 21 Januari 2019
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	17 - 23 Januari 2019
Tanggal Akhir pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	23 Januari 2019
Tanggal Penjatahan Saham	:	24 Januari 2019
Tanggal Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga	:	24 Januari 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Pembelian Saham Tambahan	:	25 Januari 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120
Telp: (021) 350 4890, Fax: (021) 350 4891
Situs Internet: www.verena.co.id

Kantor Cabang:
Perseroan memiliki 20 Kantor Cabang yang tersebar di Provinsi :
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Riau, dan Sulawesi Selatan

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pereseroan menawarkan sebanyak 3.102.193.089 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak Rp 434.307.032.460,- (empat ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019 dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD II. PT Bank Panin Tbk dan Murniaty Santoso akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD ini kepada IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL). Sedangkan IBJL selaku pemegang saham Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD II termasuk yang di peroleh dari pengalihan kedua pihak tersebut di atas.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut wajib dibeli oleh IBJL selaku Pembeli Siaga.

APABILA SETELAH ALOKASI PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN MASIH TERDAPAT SISA SAHAM, MAKA BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM NO.24 TANGGAL 10 OKTOBER 2018 YANG DIBUAT DI HADAPAN DINA CHOIZE S.H., PENGGANTI FATHIAH HELMI, S.H., NOTARIS DI JAKARTA, SEBAGAIMANA DI USAH DENGAN AKTA PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM NO.27 TANGGAL 22 NOVEMBER 2018 YANG DIBUAT DI HADAPAN FATHIAH HELMI S.H., NOTARIS DI JAKARTA, IBJ LEASING COMPANY, LIMITED YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA DALAM PMHMETD II PERSEROAN WAJIB MEMBELI SELURUH SISA SAHAM DALAM PMHMETD II PERSEROAN.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI BURSA EFEK INDONESIA MAUPUN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL TANGGAL 15 - 21 JANUARI 2019. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 JANUARI 2019 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 PASAL 33 TENTANG HMETD, MAKA AKAN DIPERLAKUKAN PEMBULATAN KE BAWAH. PECAHAN HMETD TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, DIMANA DEBITUR TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA ATAU KEDUANYA. RISIKO INI TIMBUL JIKA STRUKTUR PEMBIAYAAN KREDIT, KELAYAKAN KONSUMEN DAN PIUTANG TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI SEHINGGA MENYEBABKAN KETIDAKLANCARAN PEMBAYARAN ANGSURAN DARI KONSUMEN YANG DAPAT MENGGANGGU KINERJA PERSEROAN SECARA KESELURUHAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA, MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 54,55% (LIMA PULUH EMPAT KOMA LIMA LIMA PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

PT Verena Multi Finance Tbk., (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD II**”) kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta melalui surat No. 285/VMF/XVI/X/18 pada tanggal 16 Oktober 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu. (“**POJK No.32/2015**”), yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”).

Perseroan beserta para lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggungjawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**BEI**”). Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Sesuai dengan dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DEFINISI DAN SINGKATAN		ii
RINGKASAN PROSPEKTUS		vii
Bab I.	PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II)	1
Bab II	PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
Bab III.	PERNYATAAN HUTANG	9
Bab IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
Bab V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
Bab VI.	FAKTOR RISIKO	47
Bab VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	52
Bab VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	53
	A. Keterangan Tentang Perseroan	53
	1.Riwayat Singkat	53
	2.Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	54
	3.Pengurusan dan Pengawasan	54
	4.Sekretaris Perseroan (<i>Corporate Secretary</i>)	58
	5.Komite Audit	58
	6.Komite Nominasi dan Remunerasi	59
	7.Sumber Daya Manusia	60
	8.Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	63
	9.Struktur Organisasi Perseroan	66
	10.Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan	67
	11.Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum	68
	12.Keterangan Mengenai Pernyataan Saham Oleh Perseroan	71
	13.Transaksi Dengan Pihak Berelasi	73
	14.Keterangan Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi	74
	15.Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Lain	78
	16.Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan	86
	17.Keterangan Tentang Aset tetap	86
	18.Kelompok Usaha Perseroan	88
	B. Kegiatan Dan Prospektus Usaha Perseroan	89
	1.Umum	89
	2.Kegiatan Usaha	91
	3.Pemasaran	93
	4.Strategi Pemasaran	93
	5.Operasional	94
	6.Sistem Teknologi Informasi	96
	7.Persaingan Usaha	97
	8.Strategi Usaha	97
	9.Perluasan Jaringan Pemasaran	98
	10.Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	99
BAB IX.	EKUITAS	100
BAB X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	102
BAB XI.	PERPAJAKAN	103
BAB XII	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA / CALON PENGENDALI BARU PERSEROAN	105
BAB XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	108
BAB XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	110
BAB XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	115
BAB XVI.	INFORMASI TAMBAHAN	116

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali disebutkan lain dalam Prospektus ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Biro Administrasi Efek (BAE)	Berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka PMHMETD II yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek Indonesia (BEI)	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek diantara para pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Channeling	Berarti penerusan pinjaman untuk pembiayaan konsumen. Dalam hal ini, Perseroan ditunjuk sebagai agen yang berfungsi untuk meneruskan pinjaman yang telah diperoleh dari bank kepada konsumen.
Dealer atau Showroom	Berarti perusahaan atau pihak yang melakukan penjualan kendaraan bermotor.
Dilusi	Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
EBITDA	Berarti <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation</i> , yaitu laba neto sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
Emisi	Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PMHMETD II.
FPPS	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II.
FPPS Tambahan	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.
Harga Penawaran	Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD II untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD II ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

Hari Bursa	Berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana terdapat dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015.
IBJL	Berarti IBJ Leasing Company, Limited, berkedudukan di Tokyo, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Jepang yang merupakan Pembeli Siaga dalam Rencana PMHMETD II.
IBJV	Berarti PT IBJ Verena Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang akan menjadi subyek transaksi.
<i>Joint Financing</i>	Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan dan/atau pihak lainnya.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	Berarti konsultan hukum yang terdaftar di OJK.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 10 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
KTUR	Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Laba (rugi) - bersih	Berarti laba (rugi) sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak bersih dan dikurangi dengan bagian laba (rugi) yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.
Laba (rugi) komprehensif - bersih	Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti neraca keuangan.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau pengganti haknya.
NPL	Berarti <i>Non Performing Loan</i> .
OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS Perseroan, yang berhak atas HMETD.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan Terbatas PT Verena Multi Finance Tbk. No.25 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Dina Chozie S.H., Notaris Di Jakarta pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Verena Multi Finance Tbk., No.28 tanggal 22 November 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pembelian Sisa Saham	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham oleh Pembeli Siaga yaitu IBJ Leasing Company, Limited Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No.24 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Dina Chozie S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham oleh Pembeli Siaga yaitu IBJ Leasing Company, Limited Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Verena Multi Finance Tbk., No.27 tanggal 22 November 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. .
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD II, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
POJK	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan No. VIII.G.12	Berarti Peraturan No. VIII.G.12 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan Dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2014.
Peraturan No. IX.E.1	Berarti Peraturan No. IX.E.1 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-412/BL/2009.
Peraturan No. IX.E.2	Berarti Peraturan No. IX.E.2 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011.

POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
PMHMETD II	Berarti kegiatan penawaran saham biasa atas nama dengan sebanyak 3.102.193.089 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham.
Perseroan	Berarti PT Verena Multi Finance Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta saham yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan Situs Web Perusahaan Terbuka.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPT serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPT serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Saham	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini.
Saham Lama	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD II yaitu sebanyak 3.102.193.089 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) lembar saham.
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2015.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana Pemegang Saham yang memesan saham tambahan mengetahui berapa banyak mendapatkan saham tambahan yang dikehendaki.
Tanggal Pengembalian Uang	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan saham tambahan yang tidak dapat terpenuhi oleh Perseroan kepada pemesan saham tambahan, dimana Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pencatatan HMETD	Berarti tanggal pencatatan HMETD untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, sebagaimana tercantum pada bagian luar kulit muka Prospektus.
UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan peiaksanaannya.
UUPT	berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, beserta peraturan-peraturan peiaksanaannya.
Undang-undang Perpajakan	Berarti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (dua ribu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan lainnya di kemudian hari.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Riwayat Singkat Dan Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir berubah, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk. No.23 tanggal 10 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Dina Choize, S.H. pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0021332.AH.01.02 Tahun 2018.

Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham menjadi Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha saat ini dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan berupa:

- a. Pembiayaan Otomotif;
- b. Pembiayaan Non-Otomotif.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat dihadapan Dina Choize, S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0021332.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018, serta Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2018 struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.487.482.304	148.748.230.400	57,54
2. IBJ Leasing Co. Ltd	516.773.665	51.677.366.500	19,99
3. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	9,44
4. Murniaty Santoso *	97.586.016	9.758.601.600	3,77
5. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	239.353.883	23.935.388.300	9,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.414.839.092	741.483.909.200	

* Komisaris Utama

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan menawarkan sebanyak 3.102.193.089 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak Rp 434.307.032.460,- (empat ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No.32/2015 pasal 33, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019, dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Sebelum PMHMETD II ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 2.585.160.908 saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK (OJK)	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	13 Juni 2008	25 Juni 2008	1.002.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		24 Juni 2010	352
PMHMETD I	27 April 2017	15 Mei 2017	1.583.160.556

1. Asumsi A

Asumsi bahwa seluruh HMETD yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan milik Murniaty Santoso yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini akan dialihkan ke IBJL dan hanya IBJL yang akan melaksanakan seluruh haknya menjadi saham Perseroan, termasuk yang di terima dari pengalihan kedua pihak tersebut serta dimana IBJL juga bertindak sebagai Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100.-					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.487.482.304	148.748.230.400	57,54	1.487.482.304	148.748.230.400	26,15
2. IBJ Leasing Co. Ltd	516.773.665	51.677.366.500	19,99	3.038.984.046	303.898.404.600	53,43
3. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	9,44	243.965.040	24.396.504.000	4,29
4. Murniaty Santoso *	97.586.016	9.758.601.600	3,77	97.586.016	9.758.601.600	1,72
5. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	239.353.883	23.935.388.300	9,26	239.353.883	23.935.388.300	4,21
6. Pembeli Siaga (IBJ Leasing Co. Ltd)				579.982.708	57.998.270.800	10,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00	5.687.353.997	568.735.399.700	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.414.839.092	741.483.909.200		4.312.646.003	431.264.600.300	

* Komisaris Utama

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah total saham yang akan dimiliki oleh IBJL setelah PMHMETD II adalah sebanyak 3.618.966.754 lembar

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) setelah PMHMETD II.

2. Asumsi B

Asumsi bahwa seluruh HMETD yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan milik Murniaty Santoso yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini akan dialihkan ke IBJL dan pemegang saham lainnya melaksanakan seluruh haknya menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100.-					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.487.482.304	148.748.230.400	57,54	1.487.482.304	148.748.230.400	26,15
2. IBJ Leasing Co. Ltd	516.773.665	51.677.366.500	19,99	3.038.984.046	303.898.404.600	53,43
3. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	9,44	536.723.088	53.672.308.800	9,44
4. Murniaty Santoso *	97.586.016	9.758.601.600	3,77	97.586.016	9.758.601.600	1,72
5. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	239.353.883	23.935.388.300	9,26	526.578.543	52.657.854.300	9,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.585.160.908	258.516.090.800	100	5.687.353.997	568.735.399.700	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.414.839.092	741.483.909.200		4.312.646.003	431.264.600.300	

* Komisaris Utama

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah total saham yang akan dimiliki oleh IBJL setelah PMHMETD II adalah sebanyak 3.038.984.046 lembar.

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) setelah PMHMETD II.

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019 melalui Bursa serta diluar Bursa, sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak, HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek bank kustodian pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya dapat diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI. Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI. Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar per saham	= Rp a
Harga saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= R
Jumlah saham yang beredar sesudah PMHMETD II	= A + R
Harga teoritis saham baru ex HMETD	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ r \times R)}{(A + R)}$
	= Rp X
Harga HMETD per saham	= Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI dan Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan POJK No.32/2015 pasal 33, bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk :

- Sekitar 49,96% atau Rp 214.307.032.460,- (dua ratus empat belas miliar tiga ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh Rupiah) untuk membeli 80% (delapan puluh persen) saham milik IBJ Leasing Co.Ltd pada PT IBJ Verena Finance; dan
- Sisanya kurang lebih sebesar 50,04% (lima puluh koma nul empat) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PMHMETD II dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus ini.

PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan liabilitas Perseroan per 30 Juni 2018 yang diambil dari Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam Jutaan Rupiah)	
LIABILITAS	Jumlah
Utang bank	
Pihak berelasi	464.285
Pihak ketiga	456.545
Jumlah	920.830
Utang lain-lain	18.560
Biaya masih harus dibayar	
Pihak berelasi	1.372
Pihak ketiga	3.644
Jumlah	5.016
Utang pajak	688
Surat berharga yang diterbitkan	
Pihak berelasi	72.000
Pihak ketiga	28.000
Biaya emisi	(780)
Jumlah	99.220
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.891
JUMLAH LIABILITAS	1.054.205

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.
--

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai faktor risiko, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit/ pembiayaan, yaitu ketidakmampuan nasabah/konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang dapat menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko usaha lainnya adalah sebagai berikut:

- Risiko Pembiayaan
- Risiko Usaha
- Risiko Strategi
- Risiko Aset dan Liabilitas
- Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
- Risiko Yang Berkaitan Dengan Saham
- Risiko Operasional
- Risiko Tata Kelola
- Risiko Kepengurusan
- Risiko Umum

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI tentang Faktor Risiko.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagi dividen dalam bentuk tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dengan memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2018 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20% dari Laba Bersih setelah pajak.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 (2017 – Tidak diaudit dan direviu) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan untuk periode 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 23 Agustus 2018, 28 Februari 2018 dan 11 April 2017.

(dalam Jutaan Rupiah)			
Keterangan	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah Aset	1.493.581	1.750.440	1.790.467
Jumlah Liabilitas	1.054.205	1.286.192	1.503.726
Jumlah Ekuitas	439.376	464.248	286.741

(dalam Jutaan Rupiah)				
Keterangan	30 Juni 2018 (Enam bulan)	30 Juni 2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu)	31 Desember 2017 (Satu tahun)	31 Desember 2016 (Satu tahun)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen	98.749	110.311	227.254	216.353
Pendapatan Sewa pembiayaan	4.864	12.428	20.799	50.002
Pendapatan Administrasi	7.078	20.694	40.495	37.605
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	1.079	1.068	3.156	1.091
Jumlah Beban	160.981	158.493	318.103	327.050
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(33.091)	2.087	10.330	9.308
Manfaat (Beban) Pajak- Bersih	8.674	(556)	(2.778)	(2.842)
Laba (Rugi) - Bersih	(24.417)	1.531	7.552	6.466
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(455)	(720)	(1.179)	(4.073)
Laba (Rugi) Komprehensif	(24.872)	811	6.373	2.393

Prospek dan Strategi Usaha

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- Memfokuskan kegiatan pembiayaan pada mobil bekas yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dan risiko yang aman dan melakukan diversifikasi usaha kepada pembiayaan alat berat dan mesin.
- Menetapkan prinsip *prudent* atau kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip “Benar dari Awal” yang dianut oleh Perseroan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini.
- Mengadakan pemantauan secara terus menerus terhadap kondisi perekonomian secara makro, dikhususkan kepada perubahan yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang.
- Mengembangkan jaringan pemasarannya dengan cara memaksimalkan potensi penjualan setiap Kantor Cabang.
- Secara berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), *dealer*, *vendor* serta konsumen.
- Mengembangkan kemampuan karyawannya dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan serta terus meningkatkan kesejahteraan agar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

Prospek Usaha Perseroan

Bisnis usaha pembiayaan sangat sensitif terhadap gejolak nilai tukar Rupiah, pergerakan suku bunga dan daya beli masyarakat. Proses pemulihan tersebut membaik pada 2017 karena berbagai momentum baik dari global maupun domestik. Dari sisi global, perekonomian dunia tumbuh membaik dan merata. Hal tersebut terjadi tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang. Kinerja baik perekonomian global membawa dampak positif bagi pemulihan ekonomi domestik, yang kembali menguat pada akhir 2017. Hal tersebut juga ditandai dengan terjaganya tingkat inflasi dan membaiknya likuiditas perbankan untuk menyalurkan kredit dengan tingkat suku bunga yang rendah yang mendorong meningkatnya daya beli masyarakat yang menyebabkan diantaranya, permintaan akan pembiayaan kendaraan bermotor meningkat

yang pada gilirannya bukan saja meningkatkan penjualan kendaraan bermotor tetapi juga mendorong tumbuhnya industri kendaraan bermotor.

Pertumbuhan industri otomotif memiliki korelasi langsung dengan usaha pembiayaan di Indonesia, mengingat sebagian besar pembelian kendaraan bermotor Indonesia, khususnya pembiayaan mobil baik untuk tujuan pribadi maupun komersial, masih melalui pembelian secara kredit. Oleh karena itu, kondisi makro ekonomi dan tingkat bunga merupakan faktor yang sensitif bagi industri otomotif dan usaha pembiayaan konsumen. Selama kondisi makro ekonomi dan tingkat bunga yang relatif rendah dan stabil serta likuiditas perbankan yang memadai dan stabil, maka industri otomotif yang menjadi penyedia kendaraan bermotor serta usaha pembiayaan akan tetap terus bertumbuh, jika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah yang signifikan yang dapat mempengaruhi usaha pembiayaan misalnya: kebijakan perpajakan, kebijakan BBM bersubsidi, kebijakan perbankan dan kebijakan lainnya yang mempunyai hubungan secara langsung dan tidak langsung terhadap industri otomotif dan usaha pembiayaan.

Perusahaan Penyertaan

Sampai dengan saat ini Perseroan telah melakukan penyertaan pada satu perusahaan sebagai berikut:

Keterangan Saham	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Jumlah kepemilikan
PT IBJ Verena Finance	Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan yang berfokus pada sektor pembiayaan korporasi.	2010	20,00 % *)

*) per 30 Juni 2018

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II)

Perseroan menawarkan sebanyak 3.102.193.089 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak Rp 434.307.032.460,- (empat ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No.32/2015 pasal 33, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019 dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investas, modal kerja dan multiguna
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120
Telp: (021) 350 4890, Fax: (021) 350 4891
Situs Internet: www.verena.co.id

Kantor Cabang:
Perseroan memiliki 20 Kantor Cabang yang tersebar di Provinsi :
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 15 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 JANUARI 2019. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 JANUARI 2019 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

A. PENDIRIAN

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"). Perseroan didirikan dengan nama "PT Maxima Perdana Finance" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sejak PMHMETD I Tahun 2017

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat di hadapan Dina Chozie notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-0021332.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0135081.AH.01.11. Tahun 2018 semuanya tanggal 11 Oktober 2018. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham menjadi Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.

Perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Verena Multi Finance Tbk No. 39 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089393.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

Kegiatan Usaha Perseroan

Pada saat ini, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Pembiayaan Investasi**
Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
2. **Pembiayaan Modal Kerja**
Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
3. **Pembiayaan Multiguna**
Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
4. **Sewa Operasi**
Sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan sewa operasi.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jts. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Verena Oto Finance Menjadi Kepada PT Verena Multi Finance dan pembukaan kantor-kantor cabang Perseroan telah didukung dengan izin-izin pembukaan kantor cabang.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan dengan POJK No. 32/2015.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat dihadapan Dina Choize, S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0021332.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018, serta Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2018 struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.487.482.304	148.748.230.400	57,54
2. IBJ Leasing Co. Ltd	516.773.665	51.677.366.500	19,99
3. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	9,44
4. Murniaty Santoso *	97.586.016	9.758.601.600	3,77
5. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	239.353.883	23.935.388.300	9,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.414.839.092	741.483.909.200	

* Komisaris Utama

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan menawarkan sebanyak 3.102.193.089 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak Rp 434.307.032.460,- (empat ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No.32/2015 pasal 33, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019, dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Sebelum PMHMETD II ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 2.585.160.908 saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK dan OJK	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	13 Juni 2008	25 Juni 2008	1.002.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		24 Juni 2010	352
PMHMETD I	27 April 2017	15 Mei 2017	1.583.160.556

1. Asumsi A

Asumsi bahwa seluruh HMETD yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan milik Murniaty Santoso yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini akan dialihkan ke IBJL dan hanya IBJL yang akan melaksanakan seluruh haknya menjadi saham Perseroan, termasuk yang di terima dari pengalihan kedua pihak tersebut serta dimana IBJL juga bertindak sebagai Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100.-					
	Sebelum PMHMETD II			Sesudah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.487.482.304	148.748.230.400	57,54	1.487.482.304	148.748.230.400	26,15
2. IBJ Leasing Co. Ltd	516.773.665	51.677.366.500	19,99	3.038.984.046	303.898.404.600	53,43
3. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	9,44	243.965.040	24.396.504.000	4,29
4. Murniaty Santoso *	97.586.016	9.758.601.600	3,77	97.586.016	9.758.601.600	1,72
5. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	239.353.883	23.935.388.300	9,26	239.353.883	23.935.388.300	4,21
6. Pembeli Siaga (IBJ Leasing Co. Ltd)				579.982.708	57.998.270.800	10,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00	5.687.353.997	568.735.399.700	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.414.839.092	741.483.909.200		4.312.646.003	431.264.600.300	

* Komisaris Utama

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah total saham yang akan dimiliki oleh IBJL setelah PMHMETD II adalah sebanyak 3.618.966.754 lembar

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) setelah PMHMETD II.

2. Asumsi B

Asumsi bahwa seluruh HMETD yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan milik Murniaty Santoso yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini akan dialihkan ke IBJL dan pemegang saham lainnya melaksanakan seluruh haknya menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100.-					
	Sebelum PMHMETD II			Sesudah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.487.482.304	148.748.230.400	57,54	1.487.482.304	148.748.230.400	26,15
2. IBJ Leasing Co. Ltd	516.773.665	51.677.366.500	19,99	3.038.984.046	303.898.404.600	53,43
3. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	9,44	536.723.088	53.672.308.800	9,44
4. Murniaty Santoso *	97.586.016	9.758.601.600	3,77	97.586.016	9.758.601.600	1,72
5. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	239.353.883	23.935.388.300	9,26	526.578.543	52.657.854.300	9,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.585.160.908	258.516.090.800	100	5.687.353.997	568.735.399.700	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.414.839.092	741.483.909.200		4.312.646.003	431.264.600.300	

* Komisaris Utama

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah total saham yang akan dimiliki oleh IBJL setelah PMHMETD II adalah sebanyak 3.038.984.046 lembar.

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) setelah PMHMETD II.

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019 melalui BEI serta diluar Bursa, sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak, HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek bank kustodian pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya dapat diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI. Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan. kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI. Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 15 - 21 Januari 2019.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar per saham	= Rp a
Harga saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= R
Jumlah saham yang beredar sesudah PMHMETD II	= A + R

$$\text{Harga teoritis saham baru ex HMETD} = \frac{(\text{Rp } a \times A) + (\text{Rp } r \times R)}{(A + R)}$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } X \\ \text{Harga HMETD per saham} &= \text{Rp } X - \text{Rp } r \end{aligned}$$

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI dan Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan POJK No. 32/2015 pasal 33, bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Sebelum PMHMETD II ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 2.585.160.908 saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK dan OJK	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	13 Juni 2008	25 Juni 2008	1.002.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		24 Juni 2010	352
PMHMETD I	27 April 2017	15 Mei 2017	1.583.160.556

Berikut ini historis kinerja saham di BEI yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2018:

Tahun	Bulan	Tertinggi Rp	Terendah Rp	Harga Penutupan Rp	Volume Transaksi Unit	Nilai Rp (Miliar)	Frekuensi X	Kapitalisasi Pasar Rp (Miliar)
2017	Juni	107	93	94	9.282	911	1.640	243
	Juli	95	92	93	70.600	328	503	240
	Agustus	110	91	97	761.600	8,461	39,846	251
	September	99	98	98	1.168.500	9,430	27,251	253
	Oktober	101	100	101	1.236.100	7,610	9,850	261
	Nopember	100	99	99	54.500	1,013	880	256
	Desember	96	93	93	257.500	605	426	240
2018	Januari	93	110	94	4.112.900	41,207	123,076	243
	Pebruari	96	97	91	678.700	3,975	10,987	243
	Maret	94	102	93	164,950	16,003	68,780	243
	April	94	98	93	18,331	1,714	805	243
	Mei	94	83	90	151.500	5,839	737	233
	Juni	90	78	79	311,816	30,587	105,574	204
	Juli	88	73	87	22.259	1.783	6.055	225
	Agustus	120	86	111	50.140	5.254	2.024	287
	September	116	95	100	18.548	2.105	194	259

Sumber: IDX Monthly Statistics

Perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh BEI sejak saham Perseroan dicatatkan di BEI hingga prospektus ini diterbitkan.

PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Jumlah saham yang akan di catatkan di Bursa Efek seluruhnya adalah sebanyak 5.687.363.997 lembar saham, dimana sebanyak 2.585.160.908 lembar merupakan saham lama dan sebanyak 3.102.193.089 lembar merupakan saham baru hasil dari PMHMETD II ini.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk :

- Sekitar 49,96% atau Rp 214.307.032.460,- (dua ratus empat belas miliar tiga ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh Rupiah) untuk membeli 80% (delapan puluh persen) saham milik IBJ Leasing Co.Ltd pada PT IBJ Verena Finance; dan
- Sisanya kurang lebih sebesar 50,04% (lima puluh koma nul empat) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Rencana penggunaan dana sekitar Rp214.307.032.460,- untuk membeli 80% (delapan puluh persen) saham milik IBJ Leasing Co.Ltd pada PT IBJ Verena Finance adalah dalam rangka sinergi antar kedua perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh IBJL dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan daya saing Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil PMHMETD II, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan secara berkala kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Penggunaan dana yang akan digunakan untuk membeli saham IBJL di IBJV merupakan Transaksi Afiliasi sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1, dan Peraturan No. IX.E.2, namun di karenakan tidak memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga tidak memerlukan persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015 maka alokasi biaya yang telah dan akan dikeluarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD II adalah sekitar 1,2513% (satu koma dua lima satu tiga persen), dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,5193%, yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,3546%.
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0710%.
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,0177%.
 - d. Jasa Penilai sekitar 0,0760%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0198%.
- Biaya Jasa Konsultan Keuangan sekitar 0,3454%
- Biaya OJK sekitar 0,0500%, BEI sekitar 0,0380% dan KSEI sekitar 0,0035%.
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,2753%.

Adapun seluruh dana hasil PMHMETD I Tahun 2017, setelah dikurangi biaya emisi telah habis dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana PMHMETD I sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat Perseroan terakhir No.006/VMF/XVI/I18, perihal: Surat Pengantar Penyerahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan liabilitas Perseroan per 30 Juni 2018 yang diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.054.205 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

		(dalam Jutaan Rupiah)
LIABILITAS		Jumlah
Utang bank		
Pihak berelasi		464.285
Pihak ketiga		456.545
Jumlah		920.830
Utang lain-lain		18.560
Biaya masih harus dibayar		
Pihak berelasi		1.372
Pihak ketiga		3.644
Jumlah		5.016
Utang pajak		688
Surat berharga yang diterbitkan		
Pihak berelasi		72.000
Pihak ketiga		28.000
Biaya emisi		(780)
Jumlah		99.220
Liabilitas imbalan pasca kerja		9.891
JUMLAH LIABILITAS		1.054.205

1. UTANG BANK

Pada tanggal 30 Juni 2018, saldo utang bank adalah sebesar **Rp 920.830 juta** yang terdiri dari utang bank kepada bank pihak berelasi dan bank pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

		30 Juni 2018 (Rp Juta)
Pihak berelasi		
Bank Pan Indonesia		464.285
Pihak ketiga		
Bank Negara Indonesia (Persero)		250.455
Bank Victoria International		88.000
Bank Permata		38.809
Bank Ganesha		35.531
Bank Capital		25.000
Bank Resona Perdania		18.750
Jumlah		920.830

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki Perseroan:

Bank	Fasilitas	Batas Kredit (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga rata-rata	Awal	Akhir	Jaminan
Bank Pan Indonesia	Pinjaman cerukan	50.000	11,00%	30-Nov-10	10-Sep-18 (*)	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pinjaman tetap	100.000	12,50%	11-Jun-15	11-Des-18	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman

	Pinjaman tetap	100.000	11,75% - 12,50%	16-Des-15	16-Jun-19	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pinjaman tetap	200.000	10,00% - 10,75%	4-Sep-17	4-Mar-21	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	<i>Money Market Line</i>	300.000	9,00% - 9,25%	31-Okt-16	31-Okt-18	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank Negara Indonesia (Persero)	Kredit modal kerja	530.000	10,00% - 11,00%	23-Des-10	14-Des-18	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank Victoria International	Demand loan dengan mekanisme Money Market Line	100.000	9,50%	29-Sep-17	29-Sep-18 **)	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman
Bank Permata	Kredit kemitraan konsumen channelling. Pinjaman ini tidak diperpanjang dan sisa saldo utang merupakan sisa saldo piutang channelling yang masih akan dilunasi oleh customer. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 13 Agustus 2018.	150.000	10,75% - 13,50%	21-Des-11	31-Mar-18	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman
Bank Capital	<i>Money Market Loan</i>	100.000	9,50%	21-Jun-17	21-Jun-19	Piutang pembiayaan konsumen kolektibilitas lancar sebesar minimal 100% dari pemakaian fasilitas kredit
Bank Ganesha	Pinjaman tetap	10.000	12,25%	11-Jan-16	11-Jan-19	Piutang pembiayaan konsumen dengan agunan properti Perusahaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pinjaman tetap	80.000	12,50%	16-Des-16	16-Des-19	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank Resona Perdania	Pinjaman Berjangka	100.000	3,5% + COLF (Cost of Loanable Fund)	27-Mar-18	2-Mar-22	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran I (KMK-PTA 1). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 23 Februari 2018.	75.000	12,75%	10-Jul-15	10-Jul-19	Piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 125% dari saldo fasilitas pinjaman

*) Perjanjian utang bank dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk atas fasilitas pinjaman cerukan yang telah jatuh tempo pada 10 September 2018 telah diperpanjang pada tanggal 15 Agustus 2018, sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 10 September 2019.

**) Perjanjian utang bank dengan PT Bank Victoria Internasional atas fasilitas pinjaman *demand loan* dengan mekanisme *money market line* yang telah jatuh tempo pada 29 September 2018 telah diperpanjang pada tanggal 24 September 2018, sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 29 September 2019.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Bank BNI (BNI), Perseroan setuju untuk membuka kas yang dibatasi penggunaannya pada BNI. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Sebagai imbalannya, Perseroan diperbolehkan untuk membebaskan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada BNI. Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan akan menanggung seluruh risiko kerugian yang terkait dengan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan perjanjian tersebut dan membukukan piutang pembiayaan konsumen tersebut pada laporan keuangan Perseroan.

Seluruh utang bank yang diterima Perseroan digunakan untuk modal kerja.

Terkait dengan utang-utang bank yang diperoleh Perseroan, Perseroan wajib menjaga *gearing ratio* sebesar 8x - 10x. Perseroan juga diwajibkan menjaga *rasio non-performing loan* untuk tunggakan lebih dari 30 hari berkisar antara 4% - 5%, lebih dari 60 hari di 4%, dan tunggakan lebih dari 90 hari berkisar antara 2% - 3%. Perseroan diharuskan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada bank jika terdapat perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk perseroan, komposisi permodalan dan pembagian laba perseroan.

Perseroan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank per 30 Juni 2018.

2. UTANG LAIN-LAIN

Saldo utang lain-lain per 30 Juni 2018 adalah sebesar **Rp 18.560 juta** yang terdiri dari:

	30 Juni 2018 (Rp Juta)
Pembayaran diterima di muka dari pelanggan	14.655
Utang asuransi	1.849
Pendapatan ditangguhkan	623
Lain-lain	1.433
Jumlah	18.560

3. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang masih harus di bayar per 30 Juni 2018 adalah sebesar **Rp 5.016 juta** yang terdiri dari :

	30 Juni 2018 (Rp Juta)
Bunga atas utang bank	
Pihak berelasi	1.372
Pihak ketiga	1.277
Bonus dan tunjangan hari raya	1.000
Bunga atas surat berharga yang diterbitkan	722
Jasa profesional	441
Telepon, internet dan listrik	204
Jumlah	5.016

4. UTANG PAJAK

Perseroan memiliki utang pajak pada tanggal per 30 Juni 2018 adalah sebesar **Rp 688 juta** yang terdiri dari:

	30 Juni 2018 (Rp Juta)
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	573
Pasal 23	31
Pasal 25	39
Pasal 4 (2)	44
Pajak Pertambahan Nilai	1
Jumlah	688

Pada tanggal 4 November 2014 Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Perseroan Masuk Bursa, atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 11.661 juta dan Rp 6.537 juta untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

Pada bulan November 2014 Perseroan telah membayar sebagian dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 368 juta dan Rp 583 juta.

Pada tanggal 27 Januari 2015, Perseroan melunasi sisa kurang bayar pajak sebesar Rp 11.293 juta dan Rp 5.953 juta untuk tahun pajak 2011 dan 2010. Pada tanggal 30 Januari 2015, Perseroan mengajukan keberatan dengan surat No. 008/VMF-ACC/XIII/I/15 - 033/VMF-ACC/XIII/I/15 untuk tahun pajak 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 11.293 juta dan Rp 5.953 juta.

Pada bulan Januari 2016, Perseroan menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh Keberatan Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

Pada tanggal 21 April 2016, Perseroan mengajukan banding dengan surat No. 092/VMF-ACC/XIV/IV/16 – 117/VMF-ACC/XIV/IV/16 mengenai Surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh Keberatan Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

Pada tanggal 8 Agustus 2017, Pengadilan pajak mengabulkan sebagian banding dengan surat No. Put-85611/PP/M.XIB/2017-Put-85636/PP/M.XIB/16/2017 tentang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa senilai Rp 15.235 juta. Sisa kelebihan pajak dicatat sebagai aset lain-lain.

Pada tanggal 13 dan 22 November 2017, Pengadilan Pajak menerima Surat Permohonan/Memori Peninjauan Kembali dengan Nomor S-6655/PJ.07/2017, S-6764/PJ.07/2017, S-6794/PJ.07/2017, S-6795/PJ.07/2017, S-6796/PJ.07/2017, S-6797/PJ.07/2017, S-6812/PJ.07/2017, S-6813/PJ.07/2017, S-6815/PJ.07/2017, S-6816/PJ.07/2017, S-6770/PJ.07/2017, S-6947/PJ.07/2017, S-6788/PJ.07/2017 dan S-6948/PJ.07/2017 dari Direktorat Jenderal Pajak untuk peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85611/PP/M.XIB/2017 - Nomor Put.85636/PP/M.XIB/16/2017.

Sampai dengan tanggal laporan, Perseroan masih menunggu keputusan pengadilan pajak untuk peninjauan kembali putusan pengadilan pajak.

5. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN-BERSIH

Pada tanggal 30 Juni 2018, saldo surat berharga yang diterbitkan sebesar **Rp 99.220 juta** yang terdiri dari *Medium Term Notes* (MTN) II Verena Multi Finance Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp Juta)
Nilai Nominal	
Medium Term Notes (MTN II)	
Verena Multi Finance Tahun 2017	
Pihak berelasi	72.000
Pihak ketiga	28.000
Surat berharga yang beredar	100.000
Emisi surat berharga yang belum diamortisasi	(780)
Bersih	99.220

Medium Term Notes (MTN) II Verena Multi Finance Tahun 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017, Perseroan menerbitkan *Medium term Notes* (MTN) II diberi nama *Medium Term Notes* II Verena Multi Finance Tahun 2017 dengan nilai nominal Rp 100 miliar, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok MTN sebesar Rp 100 miliar, berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2019.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2018 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 5 Desember 2019.

Wali amanat untuk penerbitan MTN ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan surat No. RC-926/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dari PT Pefindo, peringkat MTN II Verena Multi Finance tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap adalah idA- (*Single A minus*) untuk periode 7 September 2018 sampai dengan 1 September 2019.

Sehubungan dengan peringkat *Medium Term Notes* idA- (*Single A minus*), maka *Medium Term Notes* ini harus dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perseroan sebesar 100% dari nilai pokok *Medium Term Notes*.

Dalam perjanjian penerbitan dan agen pemantauan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa guna usaha, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu MTN dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga MTN, Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan agen pemantau, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemerinkkatan dari Pefindo minimal idA- (*single A minus*) dan menambah jaminan bila hasil pemerinkkatan menurun.

Surat utang jangka menengah ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa guna usaha yang dimiliki Perseroan dengan jumlah jaminan sebesar Rp 30 miliar pada tanggal penerbitan, Rp 50 miliar selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal penerbitan, Rp 100 miliar atau 100% dari nilai pokok MTN selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerbitan.

Perseroan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan. Pembayaran bunga dan nominal MTN melalui KSEI dilakukan sesuai jadwal

6. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar **Rp 9.891 juta**. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

- Tingkat Diskonto : 8,3%
- Tingkat Kenaikan Gaji : 5%
- Tingkat Kematian : TMI 2011
- Umur Pensiun : 55 tahun
- Tingkat kecacatan : 1% dari TMI 2011.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 100 basis poin, liabilitas imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 904.932 ribu (meningkat sebesar Rp 1.062.471 ribu).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, liabilitas imbalan pasti akan naik sebesar Rp 1.162.345 ribu (turun sebesar Rp 998.022 ribu).

Perseroan tidak memiliki liabilitas lain selain yang telah diungkapkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Berikut terlampir liabilitas Perseroan yang telah diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang:

	Jangka Pendek			Jangka Panjang		
	1-3 Bulan	3 Bulan-12 Bulan	Jumlah	>1 - 5 Tahun	>5 Tahun	Jumlah
Utang bank	515.653	211.235	726.888	193.942	-	193.942
Utang lain-lain	17.788	149	17.937	623	-	623
Biaya masih harus dibayar	4.016	1.000	5.016	-	-	-
Utang pajak	688	-	688	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	-	99.220	-	99.220
Kewajiban imbalan pasca kerja	-	-	-	-	9.891	9.891
Jumlah	538.145	212.384	750.529	293.785	9.891	303.676

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan tidak memiliki aset atau kewajiban kontinjensi yang material sedangkan komitmen yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Bank Panin

Pada tanggal 28 Oktober 2003, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Bank Pan Indonesia (Bank Panin) dengan jumlah maksimum fasilitas sejumlah Rp 25 miliar. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan bertanggung jawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen - dokumen. Sebagai imbalannya, Perseroan diperbolehkan untuk membebaskan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada Bank Panin. Perjanjian kerjasama pembiayaan ini dilakukan dengan dasar *without recourse*. Jumlah maksimum fasilitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perjanjian dimana jumlah maksimum fasilitas menjadi Rp 1 triliun, dengan jangka waktu kredit jatuh tempo pada 28 Oktober 2020. Pada tanggal 30 Juni 2018 saldo fasilitas adalah sebesar Rp 405.980 juta. Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan setuju untuk membuka rekening kas yang dibatasi penggunaannya pada Bank Panin dengan saldo sebesar Rp 1.903 juta yang disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain.

Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai oleh Bank Panin.

Bank BRI

Pada tanggal 3 November 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit konsumen kemitraan *channeling* dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 200 miliar yang akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan perseroan dengan pelanggan. Jangka waktu penyaluran kredit adalah 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Jangka waktu perjanjian kredit ini sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada BRI telah diselesaikan.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan setuju untuk membuka kas yang dibatasi penggunaannya pada BRI dengan saldo sejumlah Rp 2 juta yang disajikan sebagai rekening amanat dalam kelompok Aset Lain-lain.

Saldo fasilitas yang telah disalurkan sebesar Rp 41.155 juta pada tanggal 30 Juni 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai oleh BRI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PMHMTED II, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 (2017 – Tidak diaudit dan direviu) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan untuk periode 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 23 Agustus 2018, 28 Februari 2018 dan 11 April 2017.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
ASET			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	1.121	21.301	471
Pihak ketiga	16.751	47.950	12.347
Jumlah	17.872	69.251	12.818
Piutang pembiayaan konsumen			
Pihak ketiga	1.054.253	1.270.267	1.306.797
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.154)	(15.952)	(14.538)
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	1.032.099	1.254.315	1.292.259
Piutang sewa pembiayaan			
Pihak ketiga	46.899	82.018	192.574
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.947)	(9.419)	(11.901)
Piutang sewa pembiayaan - bersih	33.952	72.599	180.673
Tagihan anjak piutang			
Pihak ketiga	-	-	237
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(164)
Anjak piutang - bersih	-	-	73
Piutang lain-lain - bersih			
Pihak berelasi	56	79	527
Pihak ketiga	269.683	222.056	167.389
Jumlah	269.739	222.135	167.916
Biaya dibayar di muka			
Pihak berelasi	-	1	366
Pihak ketiga	8.026	3.636	4.761
Jumlah	8.026	3.637	5.127
Investasi pada entitas asosiasi	45.105	43.986	36.154
Aset pajak tangguhan - bersih	15.567	6.729	6.256
Aset tetap			
Biaya perolehan	40.831	44.666	50.669
Akumulasi penyusutan	(11.286)	(12.712)	(16.461)
Jumlah tercatat	29.545	31.954	34.208
Aset lain-lain - bersih	41.676	45.834	54.983
JUMLAH ASET	1.493.581	1.750.440	1.790.467

(dalam Jutaan Rupiah)			
Uraian	30 Juni 2018	31 Desember	
		2017	2016
LIABILITAS			
Utang bank			
Pihak berelasi	464.285	442.418	274.042
Pihak ketiga	456.545	687.429	995.132
Jumlah	920.830	1.129.847	1.269.174
Utang usaha kepada pihak ketiga	-	10.840	18.931
Utang lain-lain	18.560	26.984	18.781
Biaya masih harus dibayar			
Pihak berelasi	1.372	2.054	687
Pihak ketiga	3.644	5.116	10.308
Jumlah	5.016	7.170	10.995
Utang pajak	688	1.156	2.794
Surat berharga yang diterbitkan			
Pihak berelasi	72.000	72.000	20.000
Pihak ketiga	28.000	28.000	152.000
Biaya emisi	(780)	(1.358)	(38)
Bersih	99.220	98.642	171.962
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.891	11.553	11.089
JUMLAH LIABILITAS	1.054.205	1.286.192	1.503.726
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 4.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor -			
2.585.160.908 saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan			
1.002.000.352 saham pada 31 Desember 2016			
	258.516	258.516	100.200
Tambahan modal disetor	10.433	10.433	(2.385)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(1.013)	(559)	621
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	1.000	900	800
Tidak ditentukan penggunaannya	170.440	194.958	187.505
JUMLAH EKUITAS	439.376	464.248	286.741
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.493.581	1.750.440	1.790.467

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam Jutaan Rupiah)

	2018	2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)
	(Enam bulan)			
<u>PENDAPATAN</u>				
Pembiayaan konsumen	98.749	110.311	227.254	216.353
Sewa pembiayaan	4.864	12.428	20.799	50.002
Administrasi	7.078	20.694	40.495	37.605
Pendapatan penalti	13.371	14.564	29.901	24.793
Bagian laba bersih entitas asosiasi	1.079	1.068	3.156	1.091
Bunga	289	397	775	126
Anjak piutang	-	-	-	98
Pendapatan lain-lain	2.460	1.118	6.053	6.290
JUMLAH PENDAPATAN	127.890	160.580	328.433	336.358
<u>BEBAN</u>				
Bunga dan pembiayaan lainnya	62.799	81.165	150.587	186.059
Tenaga kerja	28.443	33.758	62.076	58.353
Cadangan kerugian penurunan nilai	49.751	17.098	52.038	26.548
Umum dan administrasi	17.260	24.201	48.009	52.124
Imbalan pasca kerja	2.216	2.057	4.156	3.372
Beban lain-lain	512	214	1.237	594
JUMLAH BEBAN	160.981	158.493	318.103	327.050
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(33.091)	2.087	10.330	9.308
MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH	8.674	(556)	(2.778)	(2.842)
LABA (RUGI) BERSIH	(24.417)	1.531	7.552	6.466
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Kerugian aktuarial	(660)	61	(806)	(1.153)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	165	(15)	202	288
Sub jumlah	(495)	46	(604)	(865)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian laba (rugi) komprehensif lain atas entitas asosiasi	40	(766)	(575)	(3.208)
Jumlah rugi komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	(455)	(720)	(1.179)	(4.073)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(24.872)	811	6.373	2.393
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	(9,45)	1,12	3,81	6,45

LAPORAN ARUS KAS

	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>			
	2018	2017	2017	2016
	(Enam bulan)	(Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan anjak piutang	693.960	1.122.551	1.630.952	2.070.719
Penerimaan kas sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman	75.558	13.486	24.999	28.350
Penerimaan operasional lainnya	202	8.713	9.829	397
Penerimaan bunga	289	397	776	127
Penerimaan dari kantor pajak	-	-	15.235	-
Pembayaran kas untuk :				
Pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan anjak piutang	(410.253)	(906.994)	(1.294.578)	(1.647.797)
Beban operasional	(54.999)	(53.153)	(103.241)	(114.516)
Pembayaran kas sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman	(75.557)	(13.486)	(24.999)	(26.856)
Pembayaran beban operasional lainnya	(8.000)	-	(691)	(6.762)
Pembayaran beban bunga	(61.872)	(80.074)	(147.181)	(183.525)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(1.257)	(3.439)	(4.684)	(1.563)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	158.071	88.001	106.417	118.574
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Hasil penjualan aset tetap	2.339	365	1.495	2.510
Perolehan aset tetap	(1.765)	(2.149)	(4.407)	(4.384)
Investasi pada entitas asosiasi	-	(5.250)	(5.250)	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	574	(7.034)	(8.162)	(1.874)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank	154.394	574.418	1.095.093	1.098.408
Pembayaran utang bank	(364.418)	(597.903)	(1.234.804)	(1.075.662)
Penerimaan surat berharga – MTN	-	-	100.000	-
Pembayaran surat berharga – obligasi	-	(132.000)	(172.000)	(136.000)
Pembayaran biaya emisi surat berharga yang diterbitkan - MTN	-	-	(1.245)	-
Penerimaan penawaran umum terbatas I	-	177.314	177.314	-
Pembayaran biaya emisi penawaran umum terbatas I	-	(2.697)	(6.180)	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(210.024)	19.132	(41.822)	(113.254)
PENINGKATAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(51.379)	100.099	56.433	3.446
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	69.251	12.818	12.818	9.372
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	17.872	112.917	69.251	12.818

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Profitabilitas			
Imbal Hasil Investasi	(1,51)	0,42	0,35
Laba (Rugi) Bersih/ Jumlah Pendapatan	(19,09)	2,30	1,92
Imbal Hasil Ekuitas	(5,40)	2,01	2,26
Aset Produktif			
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah/ Piutang Pembiayaan Konsumen (Gross)	1,81	2,60	2,90
Likuiditas			
Utang Bank/ Jumlah Aset	68,30	70,18	80,49
Gearing Ratio (kali) ¹	2,58	2,92	5,77
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (kali)	2,40	2,77	5,24
Jumlah Pendapatan/ Jumlah Aset	8,56	18,76	18,79
Rasio Lancar	148,49	141,82	129,77
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	70,58	73,48	83,99
Pertumbuhan			
Pertumbuhan Aset	(14,67)	(2,24)	(5,48)
Pertumbuhan Liabilitas	(18,04)	(14,47)	(6,60)
Pertumbuhan Ekuitas	(5,36)	61,90	0,84
Pertumbuhan Pendapatan	(20,27)	(2,36)	(11,26)
Pertumbuhan Laba Bersih	(1.694,42)	16,79	167,28

¹ *Gearing Ratio* = Utang Bank dan Utang Jangka Panjang/ Total Ekuitas Dikurangi Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Pendapatan Komprehensif Lainnya

Tingkat Pemenuhan Rasio Keuangan Dalam Perjanjian Utang

Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (kali)	2,40	2,77	5,24
Piutang pembiayaan konsumen - bersih/jumlah aset	71,38	75,80	82,27
<i>Gearing ratio</i> (kali)	2,58	2,92	5,77
Penghapusan selama tahun berjalan / Piutang pembiayaan	-	0,37	0,31
Rasio lancar	148,49	141,82	129,77
NPL > 30 hari terhadap jumlah piutang pembiayaan bersih	5,31	4,29	3,28
NPL > 60 hari terhadap jumlah piutang pembiayaan bersih	4,08	2,64	2,78
NPL > 90 hari terhadap jumlah piutang pembiayaan bersih (NPL – Net)	0,29	1,65	1,98

Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan

Perseroaan wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Pasal 32 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan SE OJK No. 1/SEOJK.5/2016 tanggal 23 Februari 2016 Bab IV tentang tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan.

Cadangan penyisihan penghapusan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas piutang pembiayaan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan peraturan diatas, piutang pembiayaan diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan penyisihan penghapusan sebagai berikut:

Klasifikasi		Persentase Penyisihan Penghapusan
Lancar	Minimum	1%
Dalam Perhatian Khusus	Minimum	5%
Kurang Lancar	Minimum	15%
Diragukan	Minimum	50%
Macet	Minimum	100%

Persentase cadangan penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap outstanding pokok pembiayaan setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah tingkat kualitas piutang pembiayaan dan cadangan penyisihan penghapusan per 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 :

Keterangan	(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)					
	30 Juni 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Saldo	Cadangan	Saldo	Cadangan	Saldo	Cadangan
Lancar	1.007.761	2.449	1.269.022	3.922	1.424.086	4.878
Dalam Perhatian Khusus	74.149	2.146	48.087	1.339	31.373	712
Kurang Lancar	2.333	339	6.849	327	11.101	393
Diragukan	743	274	14.061	2.580	16.334	3.003
Macet	16.166	15.828	14.266	12.344	16.713	10.510
Jumlah	1.101.152	21.036	1.352.285	20.512	1.499.608	19.496

Penghapusbukuan Piutang Pembiayaan

Pada tanggal 31 Agustus 2018 dan 28 September 2018, Perseroan telah melakukan hapus buku atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih sejumlah Rp 151.040 juta. Penghapusbukuan ini dilakukan atas piutang – piutang yang menurut manajemen sudah tidak tertagih.

Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Untuk menghindari pemberian piutang pembiayaan secara terkonsentrasi kepada satu Debitur atau kelompok peminjam tertentu, Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014, BMPP kepada pihak yang terkait dengan Perseroan ditetapkan setinggi-tingginya 50% dari modal Perseroan dan kepada pihak yang tidak terkait setinggi-tingginya 20% dari modal Perseroan dan kepada satu kelompok debitur yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 50% dari modal Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2018, tidak terdapat pelanggaran BMPP yang dilakukan oleh Perseroan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut informasi keuangan Perseroan, dijabarkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 dan 2017.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sejak PMHMETD I Tahun 2017

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat di hadapan Dina Chozie notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-0021332.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0135081.AH.01.11. Tahun 2018 semuanya tanggal 11 Oktober 2018. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham menjadi Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.

Perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Verena Multi Finance Tbk No. 39 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089393.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

Kegiatan Usaha Perseroan

Pada saat ini, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Investasi
Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
- b) Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c) Pembiayaan Multiguna
Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- d) Sewa Usaha
Sewa yang secara tidak substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang di sewa.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jts, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain:

1. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar

Industri otomotif nasional tetap akan tumbuh, yang salah satunya ditandai dengan mulai diluncurkannya berbagai produk otomotif baru ke pasar. Pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Indonesia berkembang khususnya yang disebabkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kondisi politik yang kondusif;
- b. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik secara umum;
- c. Banyaknya produk dan jenis mobil yang harganya relatif lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia;
- d. Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan orang membeli kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat transportasi;
- e. Pangsa pasar pembiayaan mobil bekas yang sangat besar juga menjadi pemacu pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

Pertumbuhan industri properti dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi Indonesia positif;
- b. Nilai tukar rupiah yang relatif stabil;
- c. Berkembangnya perumahan bersubsidi sebagaimana yang dicanangkan pemerintah;
- d. Adanya paket kebijakan ekonomi khususnya mengenai relaksasi penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

2. Perubahan Kondisi Likuiditas atau *Cash Flow* serta Kondisi Tahun yang akan datang

Perseroan sebagai perusahaan multifinance harus menjaga likuiditas Perseroan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Sumber dana untuk menjaga likuiditas Perseroan bisa berasal dari internal dan eksternal.

Sumber internal Perseroan berasal dari penerimaan piutang bersih Perseroan, nilai piutang bersih Perseroan per 30 Juni 2018 sebesar Rp 1.335,79 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki sumber dana yang berasal dari eksternal berupa fasilitas pinjaman dari beberapa bank, diantaranya Bank Panin, Bank Victoria, Bank BNI, Bank Resona Perdania, Bank Permata, Bank Ganesha dan Bank Capital.

Pada Juni 2018, Perseroan masih memiliki plafon pinjaman yang masih tersedia untuk digunakan Perseroan sebagai modal kerja yang berasal dari Bank Panin sebesar Rp 536 miliar.

Sampai saat ini, tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dari dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.

Selain itu, dengan adanya penambahan modal melalui PMHMETD II, Perseroan mengharapkan perbaikan rating Perseroan, sehingga Perseroan dapat menerbitkan Surat Hutang sebagai sumber pendanaan baru dengan suku bunga yang lebih kompetitif.

Dengan penjelasan diatas, Perseroan berkeyakinan mempunyai kecukupan modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha.

3. Metode Penjualan

Pada umumnya dalam bisnis pembiayaan otomotif maupun non otomotif, dealer maupun developer memegang peranan yang penting dalam mata rantai transaksi pembiayaan, sehingga Perseroan menjaga dan terus meningkatkan hubungan baik dengan dealer dan developer dengan cara antara lain mengadakan dealer gathering yang juga dihadiri oleh Direksi Perseroan, program insentif untuk dealer dan melakukan kunjungan rutin kepada developer. Perseroan juga mengutamakan kecepatan persetujuan pembiayaan tanpa mengurangi kualitas pembiayaan yang dibiayai. Hal ini merupakan faktor penting dalam mendapatkan konsumen dari *dealer* dan *developer*.

4. Perubahan yang terjadi pada competitor

Sejalan dengan berkembangnya industri pembiayaan di Indonesia, banyak bermunculan kompetitor baru baik merupakan anak perusahaan bank maupun perusahaan dengan modal sendiri. Kompetitor-kompetitor baru ini menawarkan program dan paket yang terlihat sangat menarik tetapi berisiko. Perseroan tetap memegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat, sehingga tidak terpengaruh dengan adanya program atau paket seperti ini. Sedangkan kompetitor besar yang menawarkan tingkat suku bunga rendah sebagai strategi mereka, Perseroan tidak terjebak dalam persaingan suku bunga rendah, melainkan mencari alternatif yang mengutamakan kreativitas dan inovasi dalam membuat program dan paket pembiayaan.

5. Perubahan Dalam Harga dan Hubungan dengan Dealer dan Developer

Kenaikan harga / tingkat bunga yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga pinjaman bank tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian piutang pembiayaan, baik untuk piutang pembiayaan konsumen maupun piutang sewa pembiayaan. Hal ini dapat terjadi karena Perseroan menawarkan produk atau jasa baru yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) untuk jangka waktu tertentu sementara untuk mendanai pembiayaan tersebut Perseroan menerima pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tetap (*fixed rate*) dan dalam jangka waktu yang sama dengan pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu perubahan tingkat bunga selama 2(dua) tahun tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan bersih Perseroan serta laba bersih Perseroan. Perseroan juga tidak terkena dampak atas terjadinya perubahan kurs valuta asing karena tidak memberikan pembiayaan dalam mata uang asing. Perseroan mempunyai patokan harga mobil baru, mobil bekas serta untuk non otomotif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur, sehingga jaminan yang didapatkan Perseroan bernilai cukup untuk menutupi pokok hutang. Harga mobil baru, mobil bekas serta properti secara berkala akan diperbaharui Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mensyaratkan pengecekan keabsahan dokumen kepemilikan pada otoritas yang berwenang sebelum melakukan persetujuan pembiayaan.

Peningkatan volume atau jumlah barang yang dibiayai serta pengembangan usaha dengan mengeluarkan produk atau jasa baru di bidang pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan OJK akan berdampak signifikan atas jumlah piutang pembiayaan baik piutang pembiayaan konsumen maupun piutang sewa pembiayaan dan berimbas juga kepada meningkatkannya jumlah pendapatan pembiayaan konsumen maupun pendapatan sewa pembiayaan.

Selama ini Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan para dealer, hal ini disebabkan karena kerjasama yang terjalin sudah cukup lama, dimana Perseroan sering melakukan pertemuan dengan para dealer melalui kegiatan berkala, sehingga para dealer bisa memberikan kontribusi yang baik dan menunjang kinerja Perseroan. Sementara dengan para Developer, walaupun belum terlalu lama, hubungan dengan Perseroan juga baik, dimana Perseroan sering mengikuti pertemuan dengan para Developer dan mengikuti acara-acara yang dilakukan oleh Developer yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya hubungan yang baik antara Perseroan dengan Dealer dan Developer, maka bila terjadi perubahan harga tidak akan berpengaruh terhadap pemberian piutang pembiayaan.

6. Pengaruh Produk Baru atau Penarikan Produk

Dengan adanya produk baru yaitu mobil yang lebih terjangkau harganya dan banyak diminati. Perseroan menambah portofolio untuk pembiayaan atas mobil jenis ini. Pengaruh keluarnya mobil jenis baru baik varian maupun tipe baru hanya pada turunnya harga mobil sejenis. Sedangkan mobil yang diperbaiki oleh ATPM karena kerusakan atau cacat produksi, sangat kecil pengaruhnya terhadap kinerja Perseroan.

7. Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya

Ketidakpastian pada perekonomian global maupun di kawasan Asia ikut memberikan imbas pada kinerja ekonomi Indonesia. PDB tahun 2017 sebesar 5,07%, turun dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 5,02%, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 mengalami pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014 namun masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 7%.

Nilai tukar sebagian besar mata uang dunia terhadap dollar AS turun dalam waktu yang cukup lama. Ditambah permintaan impor barang dari Eropa terhadap China juga ikut menurun.

Ditengah perubahan pasar dan makin ketatnya kompetisi, Perseroan adalah fokus pada portofolio yang sehat. Perseroan menjaga pertumbuhan pembiayaan secara hati-hati untuk mempertahankan kualitas pembiayaan melalui praktek penerapan manajemen risiko termasuk melalui kebijakan pembiayaan yang lebih ketat dan peningkatan upaya penagihan. Perseroan juga melakukan efisiensi dengan mengelola biaya operasional melalui pengelolaan kapasitas yang optimal melalui peningkatan produktivitas SDM serta optimalisasi infrastruktur dan jaringan usaha.

Industri pembiayaan perlu lebih jeli menyusun strategi baik dalam penyaluran pembiayaan maupun mengelola risiko pembiayaan agar kinerjanya dapat terjaga. Perseroan sangat mengapresiasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang telah merilis aturan perluasan pembiayaan akhir tahun 2014. Lini pembiayaan baru seperti modal kerja dan Investasi bisa menjadi alternatif bagi industri pembiayaan untuk meningkatkan kinerja.

Tidak hanya itu, beragam kebijakan pemerintah di bidang perekonomian juga memberikan harapan besar bagi industri otomotif dan pembiayaan. Program pengampunan pajak yang berjalan adalah salah satu contoh kebijakan yang bisa berdampak positif pada industri.

Pelaku industri tentu sangat berharap pemerintah semakin banyak mengeluarkan terobosan yang bisa memacu daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi peraturan, perusahaan pembiayaan terus melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang diterapkan regulator, dalam upayanya meningkatkan kualitas dan daya saing industri jasa keuangan non bank.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan.

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 (2017 – Tidak diaudit dan direviu) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan untuk periode 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 23 Agustus 2018, 28 Februari 2018 dan 11 April 2017.

(dalam Jutaan Rupiah)			
Keterangan	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah Aset	1.493.581	1.750.440	1.790.467
Jumlah Liabilitas	1.054.205	1.286.192	1.503.726
Jumlah Ekuitas	439.376	464.248	286.741

(dalam Jutaan Rupiah)				
Keterangan	30 Juni 2018 (Enam bulan)	30 Juni 2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu)	31 Desember 2017 (Satu tahun)	31 Desember 2016 (Satu tahun)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen	98.749	110.311	227.254	216.353
Pendapatan Sewa pembiayaan	4.864	12.428	20.799	50.002
Pendapatan Administrasi	7.078	20.694	40.495	37.605
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	1.079	1.068	3.156	1.091
Jumlah Beban	160.981	158.493	318.103	327.050
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(33.091)	2.087	10.330	9.308
Manfaat (Beban) Pajak- Bersih	8.674	(556)	(2.778)	(2.842)
Laba (Rugi) - Bersih	(24.417)	1.531	7.552	6.466
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(455)	(720)	(1.179)	(4.073)
Laba (Rugi) Komprehensif	(24.872)	811	6.373	2.393

Berikut ini disajikan analisa keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

1. Pendapatan

Uraian	30 Juni 2018 (Enam bulan) (dalam Rp juta)	Δ%		30 Juni 2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu) (dalam Rp juta)	31 Desember 2017 (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2016 (dalam Rp juta)
		Nominal	%			Nominal	%	
Pembiayaan konsumen	98.749	(11.562)	-10,48 %	110.311	227.254	10.901	5,04%	216.353

Sewa pembiayaan	4.864	(7.564)	-60,86 %	12.428	20.799	(29.203)	-58,40%	50.002
Administrasi	7.078	(13.616)	-65,80 %	20.694	40.495	2.890	7,69%	37.605
Penalti	13.371	(1.193)	-8,19 %	14.564	29.901	5.108	20,60%	24.793
Bagian laba bersih entitas asosiasi	1.079	11	1,03%	1.068	3.156	2.065	189,28%	1.091
Bunga	289	(108)	-27,20%	397	775	649	515,08%	126
Anjak piutang	-	-	0%	-	-	(98)	-100,00%	98
Pendapatan lain-lain	2.460	(1.342)	120,04%	1.118	6.053	237	-3,77%	6.290
Total Pendapatan	127.890	(32.690)	-20,36%	160.580	328.433	(7.925)	-2,36%	336.358

Pendapatan

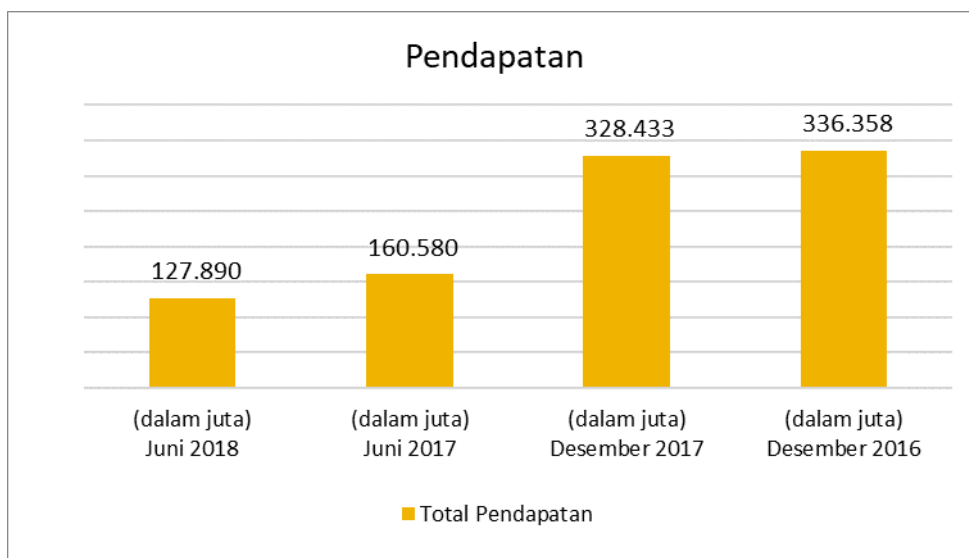
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 127.890 juta, mengalami penurunan sebesar 20,36% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 160.580 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan administrasi sebesar Rp 13.616 juta, penurunan pembiayaan konsumen sebesar Rp 11.562 juta dan penurunan pendapatan sewa pembiayaan Rp 7.564 juta seiring dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 328.433 juta, mengalami penurunan sebesar 2,36% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 336.358 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp 29.203 juta.

Grafik Pendapatan (dalam jutaan Rupiah)



(i) Pembiayaan konsumen

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan pembiayaan konsumen Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 98.749 juta, mengalami penurunan sebesar 10,48% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 110.311 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan konsumen.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan pembiayaan konsumen Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 227.254 juta, mengalami kenaikan sebesar 5,04% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 216.353 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pembiayaan konsumen.

(ii) Sewa pembiayaan

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan sewa pembiayaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 4.864 juta, mengalami penurunan sebesar 60,86% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 12.428 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan piutang sewa pembiayaan.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan sewa pembiayaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 20.799 juta, mengalami penurunan sebesar 58,40% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 50.002 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan piutang sewa pembiayaan.

(iii) Administrasi

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 7.078 juta, mengalami penurunan sebesar 65,80% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 20.694 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan pemberian piutang pembiayaan konsumen.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 40.495 juta, mengalami kenaikan sebesar 7,69% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 37.605 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan pemberian piutang pembiayaan konsumen.

(iv) Penalti

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan penalti Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 13.371 juta, mengalami penurunan sebesar 8,19% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 14.564 juta. Penurunan dikarenakan menurunnya denda keterlambatan dan menurunnya pelunasan dipercepat.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan penalti Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 29.901 juta, mengalami kenaikan sebesar 20,60% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 24.793 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan denda keterlambatan dan menurunnya pelunasan dipercepat.

(v) Bagian laba bersih entitas asosiasi

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Bagian laba bersih entitas asosiasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 1.079 juta, mengalami kenaikan sebesar 1,03% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 1.068 juta. Kenaikan dikarenakan kenaikan laba komprehensif perusahaan asosiasi.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Bagian laba bersih entitas asosiasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.156 juta, mengalami kenaikan sebesar 189,28% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 1.091 juta. Kenaikan dikarenakan kenaikan laba komprehensif perusahaan asosiasi.

(vi) Bunga

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 289 juta, mengalami penurunan sebesar 27,20% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 397 juta. Penurunan dikarenakan penurunan penempatan dana di bank.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 775 juta, mengalami kenaikan sebesar 515,08% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 126 juta. Kenaikan dikarenakan kenaikan penempatan dana di bank.

(vii) Pendapatan lain-lain

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 2.460 juta, mengalami kenaikan sebesar 120,04% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 1.118 juta. Kenaikan terutama dikarenakan kenaikan pendapatan dari piutang yang tertagih kembali.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.053 juta, mengalami penurunan sebesar 3,77% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 6.290 juta. Penurunan terutama dikarenakan menurunnya pendapatan dari piutang yang tertagih kembali.

2. **Beban**

Uraian	30 Juni 2018 (Enam bulan) (dalam Rp juta)	Δ%		30 Juni 2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu) (dalam Rp juta)	31 Desember 2017 (Satu tahun) (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2016 (Satu tahun) (dalam Rp juta)
		Nominal	%			Nominal	%	
Bunga dan pembiayaan lainnya	62.799	(18.366)	-22,63%	81.165	150.587	(35.472)	-19,06%	186.059
Tenaga kerja	28.443	(5.315)	-15,74%	33.758	62.076	3.723	6,38%	58.353

Cadangan kerugian penurunan nilai	49.751	32.653	190,98%	17.098	52.038	25.490	96,01%	26.548
Umum dan administrasi	17.260	(6.941)	-28,68%	24.201	48.009	(4.115)	-7,89%	52.124
Imbalan pasca kerja	2.216	159	7,73%	2.057	4.156	784	23,25%	3.372
Beban lain-lain	512	298	139,25%	214	1.237	643	108,25%	594
Total Beban	160.981	2.488	1,57%	158.493	318.103	(8.947)	-2,74%	327.050

Beban

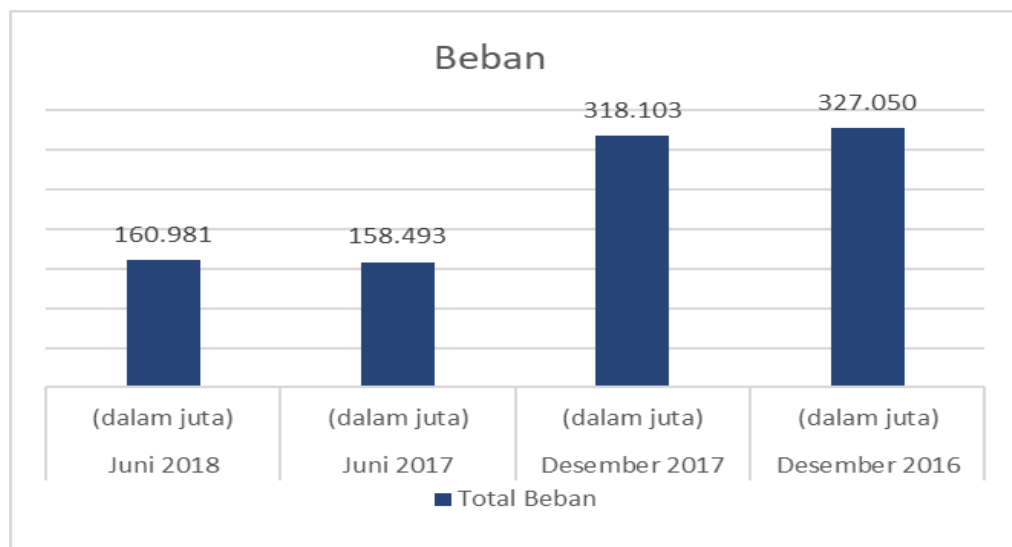
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Beban Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 160.981 juta, mengalami kenaikan sebesar 1,57% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 158.493 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 32.653 juta karena dibentuknya penambahan cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian penyelesaian piutang, peningkatan tersebut diimbangi oleh penurunan beban bunga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 18.366 juta yang terjadi karena menurunnya jumlah pinjaman yang diterima, beban umum dan administrasi sebesar Rp 6.941 juta karena adanya penurunan beban honorarium, iklan dan promosi, dan representasi, dan serta beban tenaga kerja sebesar Rp 5.315 juta yang sejalan dengan penurunan jumlah karyawan.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Beban Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 318.103 juta, mengalami penurunan sebesar 2,74% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 327.050 juta. Penurunan disebabkan oleh menurunnya beban bunga dan pembiayaan lainnya serta beban umum dan administrasi, masing-masing sebesar Rp 35.472 juta dan Rp 4.115 juta dan oleh kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 25.490 juta karena dibentuknya penambahan cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian penyelesaian piutang dan meningkatkan beban tenaga kerja sebesar Rp 3.723 juta karena kenaikan UMP.

Grafik Beban (dalam jutaan Rupiah)



(i) Bunga dan pembiayaan lainnya

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Beban bunga dan pembiayaan lainnya Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 62.799 juta, mengalami penurunan sebesar 22,63% dibandingkan dengan

periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 81.165 juta. Penurunan disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima sejalan dengan penurunan piutang.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Beban bunga dan pembiayaan lainnya Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 150.587 juta, mengalami penurunan sebesar 19,06% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 186.059 juta. Penurunan disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima sejalan dengan penurunan piutang.

(ii) Tenaga kerja

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Beban tenaga kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 28.443 juta, mengalami penurunan sebesar 15,74% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 33.758 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan jumlah tenaga kerja.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Beban tenaga kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 62.076 juta, mengalami kenaikan sebesar 6,38% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 58.353 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan UMP.

(iii) Cadangan kerugian penurunan nilai

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Beban cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 49.751 juta, mengalami kenaikan sebesar 190,98% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 17.098 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh pembentukan cadangan piutang untuk mengantisipasi kerugian penyelesaian piutang.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Beban cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 52.038 juta, mengalami kenaikan sebesar 96,01% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 26.548 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh pembentukan cadangan piutang untuk mengantisipasi kerugian penyelesaian piutang.

(iv) Umum dan administrasi

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 17.260 juta, mengalami penurunan sebesar 28,68% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 24.201 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban honorarium, iklan dan promosi, dan representasi.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 48.009 juta, mengalami penurunan sebesar 7,89% dibandingkan dengan periode

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 52.124 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban honorarium dan transportasi dan perjalanan.

(v) Imbalan pasca kerja

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Beban imbalan pasca kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 2.216 juta, mengalami kenaikan sebesar 7,73% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 2.057 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan pembayaran manfaat.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Beban imbalan pasca kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 4.156 juta, mengalami kenaikan sebesar 23,25% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 3.372 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan pembayaran manfaat.

Beban lain-lain

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Beban lain-lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 512 juta, mengalami kenaikan sebesar 139,25% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 214 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan pencadangan jaminan yang dikuasaskan kembali.

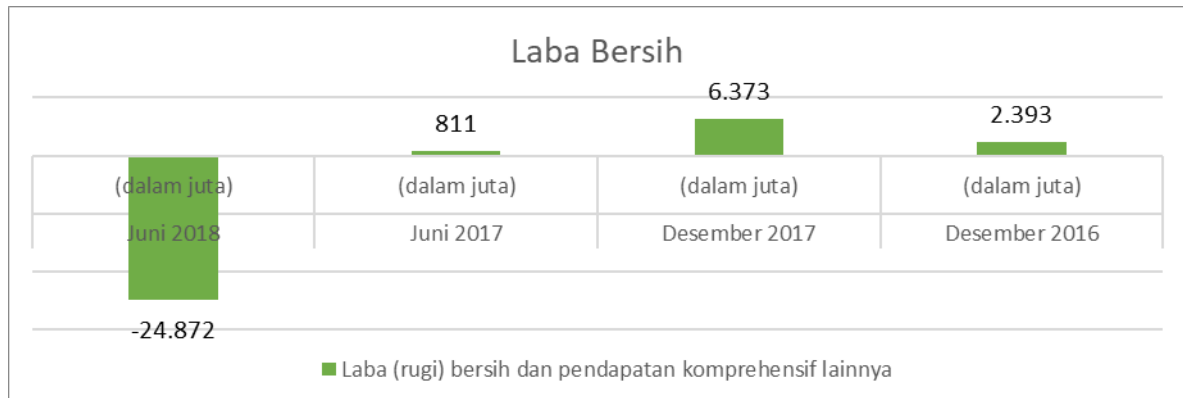
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Beban lain-lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.237 juta, mengalami kenaikan sebesar 108,25% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 594 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan pencadangan jaminan yang dikuasaskan kembali.

3. Laba Bersih dan Pendapatan Komprehensif Lainnya

Uraian	30 Juni 2018 (Enam bulan) (dalam Rp juta)	$\Delta\%$		30 Juni 2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direvisi) (dalam Rp juta)	31 Desember 2017 (Satu tahun) (dalam Rp juta)	$\Delta\%$		31 Desember 2016 (Satu tahun) (dalam Rp juta)
		Nominal	%			Nominal	%	
Laba (rugi) sebelum pajak	(33.091)	(35.178)	-1.685,58 %	2.087	10.330	1.022	10,98%	9.308
Manfaat (beban) pajak	8.674	9.230	-1.660,07%	(556)	(2.778)	(64)	-2,25%	(2.842)
Laba (rugi) bersih	(24.417)	(25.948)	-1.694,84%	1.531	7.552	1.086	16,80%	6.466
Pendapatan komprehensif lainnya	(455)	265	-36,81%	(720)	(1.179)	(2.894)	-71,05%	(4.073)
Laba (rugi) bersih dan pendapatan komprehensif lainnya	(24.872)	(25.683)	-3.166,83%	811	6.373	3.980	166,32%	2.393

Grafik Laba (Rugi) Bersih dan Pendapatan Komprehensif Lainnya (dalam jutaan Rupiah)



(i) Laba (rugi) sebelum pajak

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Perseroan mengalami rugi sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, mengalami penurunan sebesar Rp 35.178 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Rugi sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 turun sebesar 16,86 kali dibandingkan dengan laba sebelum pajak Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp 2.087 juta. Penurunan disebabkan oleh kenaikan beban cadangan kerugian penurunan nilai.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mengalami laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, mengalami kenaikan sebesar Rp 1.022 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar 10,98% dibandingkan dengan laba sebelum pajak perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 9.308 juta. Kenaikan disebabkan oleh penurunan beban bunga dan pembiayaan lainnya dan pendapatan pembiayaan konsumen.

(ii) Manfaat (beban) pajak

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Perseroan memiliki manfaat pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 8.674 juta, mengalami peningkatan sebesar 16,60 kali dibandingkan dengan beban pajak Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 556 juta. Peningkatan manfaat pajak disebabkan oleh manfaat pajak atas rugi fiskal periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Perseroan memiliki beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.778 juta, mengalami penurunan sebesar 2,25% dibandingkan dengan beban pajak Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 2.842 juta. Penurunan beban pajak disebabkan penurunan beban pajak tangguhan.

(iii) Laba (rugi) bersih dan pendapatan komprehensif lainnya

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017

Rugi bersih dan pendapatan lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 24.872 juta, mengalami penurunan sebesar 31,66 kali dibandingkan dengan laba bersih periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 811 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang tidak diimbangi dengan penurunan beban.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Laba bersih dan pendapatan lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.373 juta, mengalami kenaikan sebesar 166,32% dibandingkan dengan Laba bersih dan pendapatan lainnya perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 2.393 juta. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan pendapatan disertai penurunan beban.

4. Aset

Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2018 (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2017 (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2016 (dalam Rp juta)
		Nominal	%		Nominal	%	
Kas dan setara kas	17.872	(51.379)	-74,19 %	69.251	56.433	440,26%	12.818
Piutang pembiayaan konsumen	1.032.099	(222.216)	-17,72%	1.254.315	(37.944)	-2,94%	1.292.259
Piutang sewa pembiayaan	33.952	(38.647)	-53,23%	72.599	(108.074)	-59,82 %	180.673
Tagihan anjak piutang	-	-	0%	-	(73)	-100,00%	73
Piutang lain-lain	269.739	47.604	21,43%	222.135	54.219	32,29%	167.916
Biaya dibayar dimuka	7.094	3.457	95,05%	3.637	(1.490)	-29,06%	5.127
Pajak dibayar dimuka	932	932	100,00%	-	-	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	45.105	1.119	2,54%	43.986	7.832	21,66 %	36.154
Aset pajak tangguhan	15.567	8.838	131,34 %	6.729	473	7,56%	6.256
Aset tetap	29.545	(2.409)	-7,54%	31.954	(2.254)	-6,59%	34.208
Aset lain-lain	41.676	(4.150)	-9,06%	45.826	(9.157)	-16,65%	54.983
Pendapatan yang masih harus diterima	-	(8)	-100,00%	8	8	100,00%	-
Total Aset	1.493.581	(256.859)	-14,67%	1.750.440	(40.027)	-2,24%	1.790.467

Aset

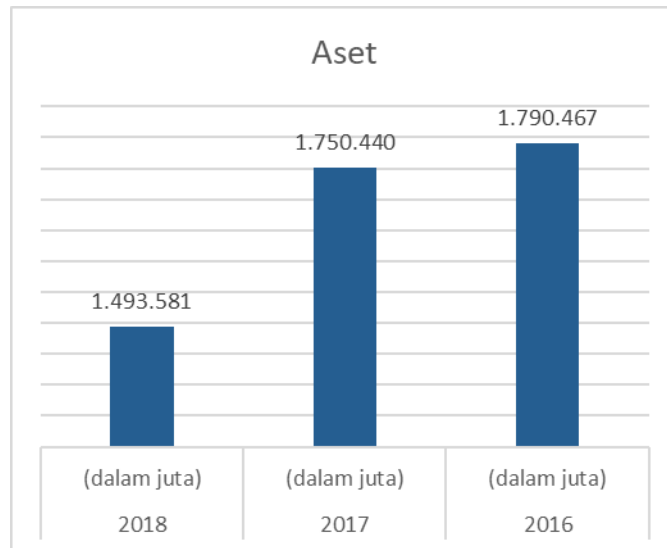
Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Posisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 1.493.581 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 256.859 juta atau 14,67% dibandingkan dengan posisi aset pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 1.750.440 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 38.647 juta dan penurunan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 222.216 juta. Selain itu kas dan bank juga mengalami penurunan sebesar 51.379 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.750.440 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 40.027 juta atau 2,24% dibandingkan dengan posisi aset pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 1.790.467 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 108.074 juta dan penurunan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 37.944 juta.

Grafik Aset (dalam jutaan Rupiah)



(i) Kas dan setara kas

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 17.872 juta, mengalami penurunan sebesar 74,19% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 69.251 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penempatan dana di bank.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 69.251 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 56.433 juta atau 440,26% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 12.818 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penempatan dana di bank.

(ii) Piutang pembiayaan konsumen

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 1.032.099 juta, mengalami penurunan sebesar 17,72% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 1.254.315 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pemberian pinjaman pembiayaan konsumen dibandingkan pemberian pinjaman tahun sebelumnya sehubungan dengan diperbaikinya ketentuan persyaratan pemberian kredit.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.254.315 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 37.944 juta atau 2,94% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 1.292.259 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pemberian pinjaman pembiayaan konsumen dan meningkatnya penyelesaian piutang di tahun 2017.

(iii) Piutang sewa pembiayaan

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo piutang sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 33.952 juta, mengalami penurunan sebesar 53,23% dibandingkan dengan saldo piutang sewa pembiayaan pada

tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 72.599 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan dihentikannya pemberian pinjaman sewa pembiayaan untuk alat berat dan barang penunjang usaha (mesin) sejak dilakukannya undang-undang Minerba.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 72.599 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 108.074 juta atau 59,82% dibandingkan dengan saldo piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 180.673 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pemberian pinjaman untuk alat berat. Penurunan tersebut sejalan dengan dihentikannya pemberian pinjaman sewa pembiayaan untuk alat berat dan barang penunjang usaha (mesin) sejak diberlakukannya undang-undang Minerba.

(iv) Piutang lain-lain

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 269.739 juta, mengalami peningkatan sebesar 21,43% dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 222.135 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 222.135 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 54.219 juta atau 32,29% dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 167.916 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih.

(v) Biaya dibayar dimuka

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo biaya dibayar dimuka pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 8.026 juta, mengalami kenaikan sebesar 120,68% dibandingkan dengan saldo biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 3.637 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai sewa dibayar dimuka kepada pihak ketiga.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.637 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.490 juta atau 29,06% dibandingkan dengan saldo biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 5.127 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai sewa dibayar dimuka kepada pihak ketiga.

(vi) Investasi pada entitas asosiasi

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 45.105 juta, mengalami peningkatan sebesar 2,54% dibandingkan dengan saldo investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 43.986 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba komprehensif entitas asosiasi.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 43.986 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 7.832 juta atau 21,66% dibandingkan Saldo investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 36.154 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba komprehensif entitas asosiasi.

(vii) Aset Pajak Tangguhan

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 15.567 juta, mengalami kenaikan sebesar 131,34% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 6.729 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset pajak tangguhan dari manfaat pajak rugi fiskal.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo aset pajak tangguhan pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 6.729 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 473 juta atau 7,56% dibandingkan saldo aset pajak tangguhan pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 6.256 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset pajak tangguhan dari manfaat pajak rugi fiskal.

(viii) Aset Tetap

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo aset tetap pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 29.545 juta, mengalami penurunan sebesar 7,54% dibandingkan dengan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 31.954 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap berupa kendaraan operasional.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo aset tetap pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 31.954 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 2.254 juta atau 6,59% dibandingkan saldo aset tetap pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 34.208 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap.

(ix) Aset Lain-lain

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo aset lain-lain pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 41.676 juta, mengalami penurunan sebesar 9,06% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 45.826 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban yang ditangguhkan lain – lain.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo aset lain-lain pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 45.826 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 9.157 juta atau 16,65% dibandingkan saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 54.983 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban yang ditangguhkan lain – lain.

5. Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2018 (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2017 (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2016 (dalam Rp juta)
		Nominal	%		Nominal	%	
Utang Bank	920.830	(209.017)	-18,50 %	1.129.847	(139.327)	-10,98%	1.269.174
Utang usaha kepada pihak ketiga	-	(10.840)	-100,00%	10.840	(8.091)	-42,74%	18.931
Utang lain-lain	18.560	(8.424)	-31,22%	26.984	8.203	43,68%	18.781
Biaya masih harus dibayar	5.016	(2.154)	-30,04%	7.170	(3.825)	-34,79%	10.995
Utang pajak	688	(468)	-40,48%	1.156	(1.638)	-58,63%	2.794
Surat berharga yang	99.220	578	0,59%	98.642	(73.320)	-42,64%	171.962

diterbitkan							
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.891	(1.662)	-14,39%	11.553	464	4,18%	11.089
Total Liabilitas	1.054.205	(231.987)	-18,04%	1.286.192	(217.534)	-14,47%	1.503.726

Liabilitas

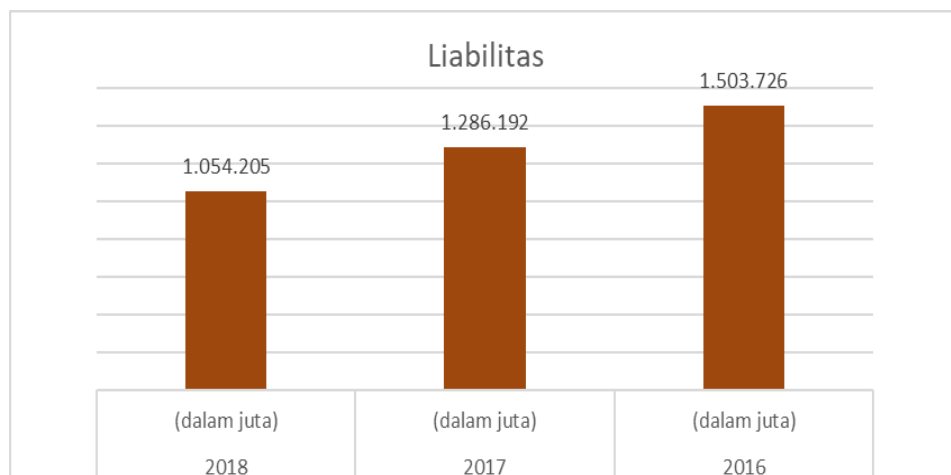
Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 1.054.205 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 231.987 juta atau 18,04% dibandingkan dengan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 1.286.192 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank, utang usaha kepada pihak ketiga, dan utang lain-lain sejalan dengan penurunan pemberian pembiayaan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi liabilitas Perseroan pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.286.192 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 217.534 juta atau 14,47% dibandingkan Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 1.503.726 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang bank dan surat berharga yang diterbitkan masing-masing sebesar Rp 139.327 juta dan Rp 73.320 juta.

Grafik Liabilitas (dalam jutaan Rupiah)



(i) Utang bank

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 920.830 juta, mengalami penurunan sebesar 18,50% dibandingkan dengan saldo utang bank pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 1.129.847 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang bank Perseroan pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.129.847 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 139.327 juta atau 10,98% dibandingkan saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 1.269.174 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan.

(ii) Utang usaha kepada pihak ketiga

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar nihil, mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 10.840 juta sejalan dengan penurunan pemberian pembiayaan baru.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang usaha pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 10.840 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 8.091 juta atau 42.74% dibandingkan saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 18.931 juta sejalan dengan penurunan pemberian pembiayaan baru.

(iii) Utang lain-lain

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 18.560 juta, mengalami penurunan sebesar 31,22% dibandingkan dengan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 26.984 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang asuransi dan penurunan pembayaran diterima dimuka dari pelanggan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 26.984 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 8.203 juta atau 43,68% dibandingkan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 18.781 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang asuransi.

(iv) Biaya masih harus dibayar

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 5.016 juta, mengalami penurunan sebesar 30,04% atau sebesar Rp 2.154 juta dibandingkan dengan saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 7.170 juta yang disebabkan oleh penurunan sewa dan jasa profesional yang masih harus dibayar.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7.170 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 3.825 juta atau 34,79% dibandingkan saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 10.995 juta yang disebabkan oleh penurunan jasa profesional yang masih harus dibayar.

(v) Utang pajak

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 688 juta, mengalami penurunan sebesar 40,48% dibandingkan dengan saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 1.156 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada pajak penghasilan badan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.156 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.638 juta atau 58,63% dibandingkan saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 2.794 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada pajak penghasilan badan.

(vi) Surat berharga yang diterbitkan

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 99.220 juta, mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 98.642 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 98.642 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 73.320 juta atau 42,64% dibandingkan saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 171.962 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan surat berharga yang diterbitkan.

(vii) Liabilitas imbalan pasca kerja

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 9.891 juta, mengalami penurunan sebesar 14,39% dibandingkan dengan saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 11.553 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah karyawan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 11.553 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 464 juta atau 4,18% dibandingkan saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 11.089 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan UMP.

6. Ekuitas

Uraian	30 Juni 2018 (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2017 (dalam Rp juta)	Δ%		31 Desember 2016 (dalam Rp juta)
		Nominal	%		Nominal	%	
Modal Saham	258.516	-	0,00%	258.516	158.316	158,00%	100.200
Tambahan Modal Disetor	10.433	-	0,00%	10.433	12.818	-537,44%	(2.385)
Penghasilan Komprehensif lain	(1.013)	(454)	81,22%	(559)	(1.180)	-190,02%	621
Saldo Laba	171.440	(24.418)	-12,47%	195.858	7.552	4,01 %	188.305
Total Ekuitas	439.376	(24.872)	-5,36%	464.248	177.507	61,90%	286.741

Posisi Tanggal 30 Juni 2018 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2017

Saldo ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 439.376 juta, mengalami penurunan sebesar 5,36% dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp 464.248 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi bersih periode berjalan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 464.248 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 177.507 juta atau 61,90% dibandingkan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 286.741 juta sejalan dengan penambahan modal saham.

7. Arus Kas

Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta 31 Desember 2017 dan 2016 :

Keterangan	30 Juni 2018 (Enam bulan) (Rp juta)	Δ%		30 Juni 2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu) (Rp juta)	31 Desember 2017 (Satu tahun) (Rp juta)	Δ%		31 Desember 2016 (Satu tahun) (Rp juta)
		Nominal	%			Nominal	%	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	158.071	70.070	79,62 %	88.001	106.417	(12.157)	-10,25%	118.574
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	574	7.608	108,17%	(7.034)	(8.162)	(6.288)	335,54%	(1.874)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(210.024)	(229.156)	-1.197,76 %	19.132	(41.822)	71.432	-63,07%	(113.254)
Peningkatan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(51.379)	(151.478)	-151,33%	100.099	56.433	52.987	1.537,64%	3.446
Kas dan setara kas awal periode	69.251	56.433	440,26%	12.818	12.818	3.446	36,77%	9.372
Kas dan setara kas akhir periode	17.872	(95.045)	-84,17%	112.917	69.251	56.433	440,26%	12.818

(i) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 158.071 juta, mengalami kenaikan sebesar 79,62 % dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 88.001 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerimaan piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih besar dari pembayaran kas untuk pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, serta turunnya pembayaran bunga pinjaman sejalan dengan turunnya jumlah pinjaman.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 106.417 juta, mengalami penurunan sebesar 10,25% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 118.574 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penerimaan piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan lebih kecil dari pembayaran kas untuk pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, serta meningkatnya pembayaran pajak penghasilan.

(ii) Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 574 juta, mengalami kenaikan sebesar 108,17% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 7.034 juta. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh penurunan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi serta adanya penerimaan dari hasil penjualan aset tetap Perseroan.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 8.162 juta, mengalami peningkatan sebesar 335,54% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 1.874 juta. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh peningkatan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi dan penurunan penerimaan dari hasil penjualan aset Perseroan.

(iii) Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 210.024 juta, mengalami peningkatan sebesar 1,20 kali dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp 19.132 juta. Penurunan tersebut diakibatkan oleh penurunan penerimaan utang bank dan meningkatnya pembayaran utang bank yang telah jatuh tempo.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 41.822 juta, mengalami penurunan sebesar 63,07% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 113.254 juta. Penurunan itu

disebabkan oleh peningkatan pembayaran utang bank, adanya penerimaan dari hasil MTN dan penerimaan dari *Right Issue*.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

a) Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai, penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen dan nilai wajar mengacu pada Catatan Dasar Penyusunan dan Catatan Instrumen Keuangan pada laporan keuangan.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

b) Piutang Sewa Pembiayaan

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Dalam sewa pembiayaan, *lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor*.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontingen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Pelunasan sebelum masa berakhirnya perjanjian dianggap sebagai pembatalan kontrak dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

c) Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya jika terdapat bukti yang obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Perusahaan harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") – Perusahaan mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Perusahaan apabila terjadi tunggakan kredit/ pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model Perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Exposure at default* ("EAD") – Perusahaan mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari kredit/pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD dan LGD diperoleh dari observasi data pembiayaan selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet pembiayaan pada posisi laporan dengan *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD).

Perusahaan menggunakan model analisa statistik, yaitu *flow rate method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan tersebut dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat aset keuangan pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan. Pada saat kerugian penurunan nilai diakui, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah kerugian penurunan nilai dengan menggunakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto estimasi arus kas masa datang pada saat menghitung penurunan nilai.

Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, dan tagihan anjak piutang pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan anjak piutang, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan yang berhubungan dengan piutang yang mengalami penurunan nilai langsung mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan dari piutang yang mengalami penurunan nilai dihitung menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai piutang setelah memperhitungkan penurunan nilai.

Beban provisi sehubungan dengan pinjaman yang diterima diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan dibukukan sebagai bagian dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat diterima.

Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

3. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Bagian pemasaran terus menjalin kerjasama dengan dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan untuk meningkatkan kontribusi terbesar bagi usaha Perusahaan.

Langkah pemasaran paling utama adalah melalui kerjasama dengan dealer mobil serta developer yang ada di tiap daerah. Pemasaran harus memastikan dealer dan developer untuk memberikan kontribusi yang stabil, mengingat dealer dan developer merupakan mediator antara calon konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen. Berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di PT Verena Multi Finance Tbk.

Strategi Pemasaran Tahun 2018

- Hubungan Yang Erat Dengan Dealer, Developer dan Mitra Strategis
Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan yang semakin erat dengan dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan. melalui berbagai macam program dan kerjasama promosi yang dicanangkan oleh Perusahaan kepada dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan Perusahaan.
- Optimalisasi Jaringan Usaha
Jaringan usaha ditujukan untuk dapat meng-cover jaringan pembiayaan yang luas. Perluasan jaringan usaha dilakukan jika lokasinya strategis yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sehat serta memiliki industri unggulan. Fokus Perusahaan saat ini adalah mengoptimalkan jaringan usaha yang ada melalui peningkatan pelayanan yang didukung dengan proses bisnis dan teknologi informasi yang tepat guna.

4. PROSPEK USAHA

Industri Otomotif

Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari sumbangsihnya kepada PDB yang mencapai 10,16% pada tahun 2017 serta mampu menyerap tenaga kerja langsung sekitar 350 ribu orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,2 juta orang.

“Kebutuhan masyarakat akan produk-produk otomotif pun semakin meningkat, di mana pada tahun 2020 nanti ditargetkan Indonesia mampu memproduksi lebih dari 1,29 juta unit, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun basis produksi untuk tujuan ekspor.

Industri Perusahaan Pembiayaan

Industri perusahaan pembiayaan (multifinance) sukses membukukan kinerja yang baik pada tahun 2017. Pertumbuhan penyaluran pembiayaannya tercatat tumbuh 16,48 persen, yaitu dari Rp356,1 triliun pada 2016 menjadi sebesar Rp414,8 triliun pada akhir tahun 2017.

Pencapaian ini patut diapresiasi, mengingat industri perbankan diproyeksi cuma mencatat pertumbuhan kredit di kisaran 8% - 9% hingga akhir tahun 2017. Selain itu, kondisi ekonomi nasional tahun 2017 juga belum menunjukkan percepatan pertumbuhan.

Statistik Lembaga Pembiayaan yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pembiayaan yang disalurkan 193 perusahaan di sepanjang tahun 2017 tembus Rp414,8 triliun.

Segmen multiguna mendominasi pembiayaan hingga Rp244,0 triliun. Segmen ini cuma bertumbuh 6% dibandingkan 2016, yaitu Rp230,1 triliun. Segmen multiguna umumnya mengalir ke pembiayaan kendaraan bermotor, roda dua maupun roda empat.

Diikuti oleh segmen pembiayaan investasi sebesar Rp119,0 triliun atau meningkat 8,2%. Kemudian, segmen pembiayaan modal kerja sebesar Rp22,8 triliun dan pembiayaan berkonsep syariah Rp28,7 triliun.

Selain membukukan pertumbuhan pembiayaan, Laba bersih tercatat tumbuh 10,74%, yakni dari Rp11,9 triliun pada 2016 menjadi sebesar 13,2 triliun pada akhir tahun 2017.

Perolehan laba bersih tersebut ditopang oleh meningkatnya pendapatan, diikuti dengan terkendalinya kenaikan beban. Pendapatan industri ini mencapai Rp99,5 triliun atau naik 7 persen.

Dimana aset dari 193 perusahaan pembiayaan hingga akhir tahun 2017 tembus Rp477,1 triliun.

5. Segmen Operasi

Organisasi Perseroan tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, walaupun segmen usaha Perseroan saat ini dibagi menjadi otomotif dan *property*, namun sampai dengan periode tahun 2018 untuk segmen *property* jumlahnya masih kecil dan segmen otomotif yang masih dominan, sehingga informasi pendapatan, beban, aset dan liabilitas Perseroan dibagi berdasarkan segmen geografis.

30 Juni 2018			
	Jabotabek Rp'000	Luar Jabotabek/ Rp'000	Jumlah Rp'000
PENDAPATAN			
Pendapatan segmen			
Pendapatan pembiayaan konsumen	45.218.357	53.530.627	98.748.984
Sewa pembiayaan	2.753.230	2.110.971	4.864.201
Pendapatan administrasi	3.308.531	3.768.990	7.077.521
Jumlah pendapatan segmen	51.280.118	59.410.588	110.690.706
Beban segmen			
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	28.007.291	34.792.172	62.799.463
Rugi penjualan dan penyisihan jaminan yang dikuasakan kembali	19.562	492.373	511.935
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	24.887.277	24.863.613	49.750.890
Jumlah beban segmen	52.914.130	60.148.158	113.062.288
Rugi segmen	(1.634.012)	(737.570)	(2.371.582)
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			17.199.259
Beban tidak dapat dialokasikan			(47.918.344)
Rugi sebelum pajak			(33.090.667)
Manfaat pajak			8.673.534
Rugi bersih			(24.417.133)
ASET			
Aset segmen	650.917.594	726.841.826	1.377.759.420
Aset tidak dapat dialokasikan			115.821.985
Jumlah aset			1.493.581.405
LIABILITAS			
Liabilitas segmen	135.286.800	172.232.257	307.519.057
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			746.685.849
Jumlah liabilitas			1.054.204.906

	31 Desember 2017		
	Jabotabek	Luar Jabotabek	Jumlah
	Rp'000	Rp'000	Rp'000
PENDAPATAN			
Pendapatan segmen			
Pendapatan pembiayaan konsumen	101.386.657	125.867.432	227.254.089
Sewa pembiayaan	10.467.904	10.330.830	20.798.734
Pendapatan administrasi	18.433.513	22.061.091	40.494.604
Jumlah pendapatan segmen	130.288.074	158.259.353	288.547.427
Beban segmen			
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	64.352.362	86.234.219	150.586.581
Rugi penjualan dan penyisihan jaminan yang dikuasakan kembali	698.004	539.419	1.237.423
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	25.593.014	26.445.189	52.038.203
Jumlah beban segmen	90.643.380	113.218.827	203.862.207
Hasil segmen	39.644.694	45.040.526	84.685.220
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			39.885.502
Beban tidak dapat dialokasikan			(114.240.787)
Laba sebelum pajak			10.329.935
Beban pajak			(2.777.720)
Laba bersih			7.552.215
ASET			
Aset segmen	716.556.443	840.447.982	1.557.004.425
Aset tidak dapat dialokasikan			193.435.479
Jumlah aset			1.750.439.904
LIABILITAS			
Liabilitas segmen	213.037.534	267.511.074	480.548.608
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			805.643.163
Jumlah liabilitas			1.286.191.771

	31 Desember 2016		
	Jabotabek Rp'000	Luar Jabotabek Rp'000	Jumlah Rp'000
PENDAPATAN			
Pendapatan segmen			
Pendapatan pembiayaan konsumen	98.693.103	117.660.120	216.353.223
Sewa pembiayaan	31.703.077	18.299.173	50.002.250
Pendapatan administrasi	16.091.020	21.513.651	37.604.671
Pendapatan anjak piutang	37.712	60.000	97.712
Jumlah pendapatan segmen	146.524.912	157.532.944	304.057.856
Beban segmen			
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	77.804.910	108.254.248	186.059.158
Rugi penjualan dan penyisihan jaminan yang dikuasakan kembali	493.380	100.267	593.647
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	20.101.146	6.447.206	26.548.352
Jumlah beban segmen	98.399.436	114.801.721	213.201.157
Hasil segmen	48.125.476	42.731.223	90.856.699
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			32.299.778
Beban tidak dapat dialokasikan			(113.848.702)
Laba sebelum pajak			9.307.775
Beban pajak			(2.841.364)
Laba bersih			6.466.411
ASET			
Aset segmen	756.032.099	893.608.953	1.649.641.052
Aset tidak dapat dialokasikan			140.826.014
Jumlah aset			1.790.467.066
LIABILITAS			
Liabilitas segmen	262.103.437	424.452.528	686.555.965
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			817.169.727
Jumlah liabilitas			1.503.725.692

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, total pendapatan segmen sebesar Rp 110.691 juta turun sebesar Rp 34.820 juta atau 23,93% dibandingkan total pendapatan segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Pendapatan segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar Rp 51.280 juta atau 46,33% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 59.411 juta atau 53,67% dari total pendapatan segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan pendapatan per segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, pendapatan segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 15.595 juta atau 23,32% dan dari luar Jabotabek turun sebesar Rp 19.225 juta atau 24,45%. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

Untuk periode 31 Desember 2017 total pendapatan segmen sebesar Rp 288.547 juta turun sebesar Rp 15.511 juta atau 5,10% dibandingkan total pendapatan segmen untuk periode 31 Desember 2016. Pendapatan segmen untuk periode 31 Desember 2017 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar Rp 130.288 juta atau 45,15% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 158.259 juta atau 54,85% dari total pendapatan segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan pendapatan per segmen untuk periode 31 Desember 2017, pendapatan segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 16.237 juta atau 11,08% dan dari luar Jabotabek naik sebesar Rp 726 juta atau 0,46%. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

Total beban segmen periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 113.063 juta naik sebesar Rp 14.585 juta atau 14,81% dibandingkan total beban segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Beban segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar 53,20% dari total beban segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan beban per segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Beban segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek naik sebesar Rp 11.707 juta atau 28,41% dan dari luar Jabotabek naik sebesar Rp 2.878 juta atau 5,03%. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan beban bunga dan kenaikan beban cadangan kerugian penurunan nilai.

Total beban segmen periode 31 Desember 2017 sebesar Rp 203.862 juta turun sebesar Rp 9.339 juta atau 4,38% dibandingkan total beban segmen untuk periode 31 Desember 2016. Beban segmen untuk periode 31 Desember 2017 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar Rp 90.643 juta atau 44,46% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 113.219 juta atau 55,54% dari total beban segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan beban per segmen untuk periode 31 Desember 2017, Beban segmen yang

berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 7.756 juta atau 7,88% dan dari luar Jabotabek turun sebesar Rp 1.583 juta atau 1,38%. Penurunan disebabkan oleh menurunnya beban bunga dan beban cadangan kerugian penurunan nilai.

Rugi segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 2.372 juta turun sebesar 49.406 juta atau 105,04% dibandingkan hasil segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Rugi segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar Rp 1.634 juta atau 68,89% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 738 juta atau 31,11% dari hasil segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan rugi segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Rugi segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 27.303 juta atau 106,37% dan dari luar Jabotabek hasil segmen turun sebesar Rp 22.103 juta atau 103,45%.

Hasil segmen untuk periode 31 Desember 2017 sebesar Rp 84.685 juta turun sebesar Rp 6.172 juta atau 6,79% dibandingkan hasil segmen untuk periode 31 Desember 2016. Hasil segmen untuk periode 31 Desember 2017 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar Rp 39.645 juta atau 46,81% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 45.040 juta atau 53,19% dari hasil segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan hasil segmen untuk periode 31 Desember 2016. Hasil segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 8.480 juta atau 17,62% dan dari luar Jabotabek naik sebesar Rp 2.309 juta atau 5,4%.

Pada tanggal 30 Juni 2018, total aset segmen sebesar Rp 1.377.759 juta, turun sebesar Rp 179.245 juta atau 11,51% dibandingkan total aset segmen akhir tahun 2017. Aset segmen per 30 Juni 2018, untuk wilayah Jabotabek sebesar Rp 650.917 juta atau 47,24% sedangkan wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 726.842 juta atau 52,76% dari total aset segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan aset segmen akhir tahun 2017. Aset segmen wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 65.639 juta atau 9,16% dan wilayah luar Jabotabek turun sebesar Rp 113.606 juta atau 13,52%.

Pada tanggal 31 Desember 2017, total aset segmen sebesar Rp 1.557.004 juta, turun sebesar Rp 92.637 juta atau 5,62% dibandingkan total aset segmen akhir tahun 2016. Aset segmen per 31 Desember 2017, untuk wilayah Jabotabek sebesar Rp 716.556 juta atau 46,02% sedangkan wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 840.448 juta atau 53,98% dari total aset segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan aset segmen akhir tahun 2016. Aset segmen wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 39.476 juta atau 5,22% dan wilayah luar Jabotabek turun sebesar Rp 53.161 juta atau 5,95%.

Sementara total liabilitas segmen per 30 Juni 2018 sebesar Rp 307.519 juta, turun sebesar Rp 173.030 juta atau 36,01% dibandingkan total liabilitas segmen akhir tahun 2017. Liabilitas segmen per 30 Juni 2018, untuk wilayah Jabotabek sebesar Rp 135.287 juta atau 43,99% sedangkan wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 172.232 juta atau 56,01% dari total aset segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan liabilitas segmen akhir tahun 2017, liabilitas segmen wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 77.751 juta atau 36,5% dan wilayah luar Jabotabek turun sebesar Rp 95.279 juta atau 35,62%.

Sementara total liabilitas segmen per 31 Desember 2017 sebesar Rp 480.549 juta, turun sebesar Rp 206.007 juta atau 30% dibandingkan total liabilitas segmen akhir tahun 2016. Liabilitas segmen per 31 Desember 2017, untuk wilayah Jabotabek sebesar Rp 213.038 juta atau 44,33% sedangkan wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 267.511 juta atau 55,67% dari total aset segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan liabilitas segmen akhir tahun 2016, liabilitas segmen wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 49.065 juta atau 18,72% dan wilayah luar Jabotabek turun sebesar Rp 156.942 juta atau 36,98%.

VI. FAKTOR RISIKO

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko Pembiayaan
- Risiko Usaha
- Risiko Strategi
- Risiko Aset dan Liabilitas
- Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
- Risiko Yang Berkaitan Dengan Saham
- Risiko Operasional
- Risiko Tata Kelola
- Risiko Kepengurusan
- Risiko Umum

Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan modal usaha, investasi dan multiguna. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip "Benar dari Awal" yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat antara lain *survey* calon konsumen, verifikasi data konsumen dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa *Dealer/Showroom* maupun vendor merupakan kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan.

Analisa calon Konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh. Perusahaan menggunakan jasa survei eksternal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh marketing (*Credit Marketing Officer / CMO*) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko terhadap risiko pembiayaan dan analisa konsentrasi risiko pembiayaan Perusahaan.

1. Eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan
Eksposur Perusahaan terhadap risiko pembiayaan hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan sama dengan nilai tercatat.
2. Analisis konsentrasi risiko pembiayaan
Konsentrasi risiko pembiayaan timbul ketika sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya mayoritas adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk sewa pembiayaan. Untuk usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, proses pembiayaan yang dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.

Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Risiko Usaha

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan, yaitu:

a) Risiko Persaingan.

Sektor usaha pembiayaan semakin diminati oleh para investor, baik dalam maupun luar negeri. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan pembiayaan dengan menitikberatkan pada pembiayaan

kendaraan *used car* serta diizinkan perbank untuk langsung memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat yang dapat mengakibatkan penurunan margin usaha Perusahaan.

- b) Risiko Kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Risiko Kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya merupakan risiko yang disebabkan karena Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak kepada kegiatan usaha Perusahaan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka risiko yang terjadi adalah sanksi bagi Perusahaan yang dapat berupa sanksi keuangan berupa denda maupun sanksi non keuangan berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perusahaan dalam mengelola usaha Perusahaan. Hal ini menurunkan kinerja Perusahaan baik dalam pandangan Regulator maupun kinerja non finansial lainnya.

Risiko Strategi

Risiko strategi merupakan risiko akibat tidak tepatnya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan, termasuk kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Pengelolaan risiko strategis, dimulai dengan pembuatan *business plan* untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perusahaan. Selanjutnya Perusahaan memastikan bahwa struktur organisasi, infrastruktur, kondisi keuangan, permodalan, SDM dan kompetensi manajerial serta sistem dan pengendalian yang ada di Perusahaan telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi dan rencana bisnis Perusahaan. Secara berkala Perusahaan melakukan analisa pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya.

Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang timbul karena kegagalan pengelolaan aset, liabilitas serta ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas yang disebabkan adanya pergerakan (suku bunga, nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki Perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban kepada kreditur.

Untuk mengatasi perubahan suku bunga dan mata uang serta menutup suku bunga yang dikenakan kepada konsumen. Perusahaan dalam perjanjian kerjasama dengan pihak Bank memperoleh tingkat biaya perolehan dana (*cost of fund*) yang menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*), dengan jangka waktu yang sama untuk pembiayaan yang diberikan dan pinjaman dari bank, dan dengan menggunakan pinjaman dalam mata uang Rupiah. Hal ini untuk mencegah risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk maupun menggunakan mata uang asing.

Perusahaan terpapar risiko suku bunga yang tidak signifikan karena piutang pembiayaan konsumen, utang jangka panjang dan sebagian besar utang bank memiliki suku bunga tetap.

Untuk modal kerja, utang dan pinjaman investasi. Perusahaan berusaha dengan mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selain menggunakan dana sendiri. Perusahaan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dan bank pemerintah maupun bank asing dalam bentuk fasilitas penerusan pinjaman untuk pembiayaan (*channeling*) maupun *demand loan* dan *term loan*. Dalam hal ini Perusahaan mengharuskan limit fasilitas pinjaman yang didapatkan minimal 110% dari total kebutuhan dana untuk aktivitas pembiayaan.

Saldo kas setiap hari cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari. Perusahaan juga mempunyai fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dapat ditarik setiap waktu dengan limit minimal menutupi kebutuhan dana 5 hari kerja.

Pinjaman Perseroan dalam mata uang Rupiah posisi 30 September 2018 adalah sebesar Rp 861.429 juta. Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman musiman ataupun pinjaman yang berasal dari luar negeri. Pinjaman ini memiliki suku bunga yang telah ditentukan.

Analisis jatuh tempo

30 September 2018 (Tidak diaudit)					
Sampai dengan 1 bulan/ Rp juta	> 1 bulan s.d 3 bulan/ Rp juta	> 3 bulan s.d 12 bulan/ Rp juta	> 1 tahun s.d 5 tahun/ Rp juta	Jumlah/ Rp juta	
Utang bank	420.384	47.274	155.251	138.520	761.429
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	-	100.000	100.000
Jumlah	420.384	47.274	155.251	238.520	861.429

Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah risiko yang timbul karena ketidakcukupan permodalan dan keterbatasan tambahan permodalan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menyerap kerugian tidak terduga akibat pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan.

Perusahaan mengelola risiko dukungan dana (permodalan) untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan penelaahan atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari *review* ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan menjaga *gearing ratio* sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10.

Risiko Yang Berkaitan Dengan Saham

Risiko terkait dengan kepemilikan atas saham Perseroan yaitu tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada PMHMETD II ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar, maka terdapat kemungkinan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi tidak likuid. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko timbul sebagai akibat ketidakcukupan ketentuan dan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi informasi, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. Pengidentifikasian risiko;
2. Pengukuran risiko;
3. Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko.

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perseroan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut :

- Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.
- Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standar Operasional Prosedures* (SOP) baku Perseroan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.
- Perseroan menggunakan Sistem Teknologi Informasi dari perusahaan terkemuka Sigma agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perseroan sudah menerapkan sistem *on-line* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perseroan.
- Perseroan juga sudah menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan Prosedur Operasi Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam

Perseroan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.

- Perseroan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan melalui VLC (*Verena Learning Centre*) agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional dan dampak kerugian finansial yang diakibatkan oleh hal tersebut.

Risiko Tata Kelola

Risiko Tata Kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*). ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perseroan.

Perseroan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan Perseroan, karena Perseroan menyadari bahwa kemajuan suatu Perusahaan terbentuk dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Secara berkesinambungan Perseroan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan Perseroan.

Risiko Kepengurusan

Risiko Kepengurusan adalah risiko kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Proses penunjukan dan pemberhentian pengurus Perusahaan senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan risiko kepengurusan, Perusahaan memastikan komposisi dan proporsi pengurus Perusahaan mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi dan integritas pengurus harus memadai dan menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus.

Perusahaan melaksanakan pendidikan secara berkala untuk pengurus Perusahaan, selain sebagai syarat keberlanjutan *fit and proper test*, pendidikan berkala ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pengurus Perusahaan, termasuk pemahaman dibidang pengelolaan risiko.

Risiko Umum

Risiko umum yang timbul, yaitu:

a) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global adalah risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian secara makro dan global yang secara umum berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perusahaan, yaitu :

- Tingkat Suku Bunga. Dalam kondisi tingkat suku bunga yang tinggi berdampak akan meningkatkan beban operasional Perusahaan, khususnya biaya dana dan sekaligus juga dapat meningkatkan tidak dapat bersaingnya produk Perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan nilai pembiayaan.
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Adanya Perubahan kondisi perekonomian nasional yang tidak kondusif dan melemahnya sektor riil akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan permintaan pembiayaan mobil.
- Tingkat Inflasi. Faktor ini akan berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat suku bunga atau biaya dana serta daya beli konsumen untuk mengangsur.
- Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, perubahan yang signifikan di pasar seperti devaluasi pada akhirnya akan menurunkan daya beli konsumen sehingga juga berakibat penurunan kinerja Perusahaan. Selain itu perubahan harga mobil yang signifikan akibat perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan jumlah penjualan mobil yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan pembiayaan.

b) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum adalah risiko yang disebabkan lemahnya aspek yuridis, seperti tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau pengikatan dokumen legal yang lemah, kejadian tersebut dapat timbul dari karyawan yang melanggar hukum dan perbuatan lain yang merugikan Perusahaan maupun pihak lain seperti konsumen dan masyarakat.

Sebagai Perusahaan dalam sebuah negara hukum, maka Perusahaan harus selalu tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan Perusahaan dalam aspek hukum mengakibatkan pada timbulnya tuntutan atau gugatan hukum yang ditujukan kepada Perusahaan.

c) Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko Kebijakan Pemerintah adalah risiko disebabkan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah. Hal ini akan mempengaruhi kinerja Perusahaan. Kebijakan uang ketat mengakibatkan terbatasnya sumber dana yang dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Situasi tersebut akan menurunkan pertumbuhan pembiayaan yang dijalankan Perusahaan.

d) Risiko Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Risiko Ketentuan negara lain atau peraturan internasional adalah risiko disebabkan kegagalan dalam mengantisipasi efek dari perubahan ketentuan lain atau peraturan internasional yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan. Proteksi aktivitas perdagangan yang diterapkan negara-negara maju yang mempengaruhi volume perdangan dunia serta harga komoditas yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Situasi tersebut akan berimbas pada kinerja Perusahaan.

Kerangka manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan adalah kebijakan yang disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri jasa pembiayaan. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan konsisten dengan PT Bank Panin Tbk., sebagai induk perusahaan (*parent company*) yang bergerak dalam bidang jasa perbankan.

Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Perseroan menyadari bahwa pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektifitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya Manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam limit risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan *shareholder value*.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 November 2018 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 yang diaudit oleh Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan untuk periode 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan jumlah aset pada periode 30 September 2018 sebesar Rp 309.766 juta (tidak diaudit) terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 194.737 juta (tidak diaudit), penurunan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 15.243 juta (tidak diaudit) dan penurunan piutang lain-lain sebesar Rp 88.033 juta (tidak diaudit), masing-masing dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2018. Penurunan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan terutama disebabkan karena pembayaran dari *customer*. Penurunan piutang lain-lain terutama disebabkan karena adanya penghapusbukuan piutang.
2. Terdapat penurunan jumlah ekuitas pada periode 30 September 2018 sebesar Rp 146.991 juta (tidak diaudit) disebabkan karena penambahan kerugian komprehensif periode berjalan sebesar Rp 146.991 juta (tidak diaudit) dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018.
3. Terdapat rugi sebelum pajak pada periode 30 September 2018 sebesar Rp 179.943 juta (tidak diaudit) terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp 65.404 juta (tidak diaudit) dan kenaikan beban kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp 167.009 juta (tidak diaudit), masing-masing dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan beban kerugian penurunan nilai piutang disebabkan karena Perseroan telah menghapusbukukan piutang sebesar Rp 151.040 juta (tidak diaudit). Penghapusan piutang tersebut dilakukan Perseroan tanpa memperhitungkan nilai jaminan.
4. Terdapat rugi bersih pada periode berjalan sebesar Rp 171.270 juta (tidak diaudit) terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp 185.425 juta (tidak diaudit) dan kenaikan manfaat pajak sebesar Rp 10.106 juta (tidak diaudit) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sejak PMHMETD I Tahun 2017

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat di hadapan Dina Chozie notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-0021332.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0135081.AH.01.11. Tahun 2018 semuanya tanggal 11 Oktober 2018. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham menjadi Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.

Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0935603.AH.01.02 Tahun 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015.

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multifinance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. .AHU-0935603.AH.0102.Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 dan didaftarkan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 21 Mei 2015. seluruh anggaran dasar Perseroan diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 29/POJK.05/2014, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014 maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembiayaan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - Pembiayaan Investasi;
Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*)
 - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
 - Pembiayaan Proyek;
 - Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
 - Pembiayaan Modal Kerja;
Pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara:
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Lease back*);
 - Anjak piutang dengan pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*)
 - Anjak piutang tanpa pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;

- Pembiayaan Multiguna
Pembiayaan multi guna wajib dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
 - Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Verena Multi Finance Tbk Nomor: 88 tahun 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai Perusahaan pembiayaan dengan jenis pembiayaan antara lain Investasi, Modal Kerja, Multi Guna.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance js. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat dihadapan Dina Choize, S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0021332.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018, serta Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2018 struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.487.482.304	148.748.230.400	57,54
2. IBJ Leasing Co. Ltd	516.773.665	51.677.366.500	19,99
3. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	9,44
4. Murniaty Santoso *	97.586.016	9.758.601.600	3,77
5. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	239.353.883	23.935.388.300	9,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.414.839.092	741.483.909.200	

* Komisaris Utama

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kedua yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkatnya, sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkatnya.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. No. 78 tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan termaktub dalam Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-29164.40.22.2014 dan didaftarkan Dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-AH.01.03-0145330 dan

didaftarkan Dalam Daftar Perseroan dengan AHU-0075602.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Murniaty Santoso
Komisaris Independen : Evi Firmansyah
Komisaris : Gunawan Santoso

Susunan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 39 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan termaktub dalam Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0220998 dan didaftarkan Dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0089393.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andi Harjono
Direktur : Iman Santoso Iskandar
Direktur Independent : Iman Syahrizal

Masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas menjabat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, sedangkan masing-masing anggota Direksi tersebut di atas menjabat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris :



Murniaty Santoso, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1953. Memperoleh gelar *Master of Science degree* dari MIT-Sloan School, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1989. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2003. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 beliau diangkat kembali menjadi Komisaris Utama. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut :

- 2013 – Sekarang. Komisaris Utama PT Verena Multi Finance Tbk;
- 2003 – sekarang. Komisaris Independen PT Summit Oto Finance;
- 1995 – sekarang. Komisaris Independen PT Oto Multiartha;
- 1999 – 2001. Direktur Utama PT Tunas Sepadan Investama;
- 1995 – 1998. Direktur PT Bentala Sanggrahan;
- 1993 – 1995. *Chief Financial Officer* PT Argo Manunggal;
- 1986 – 1993. *Chief Financial Officer* PT Astra Internasional Inc;
- 1983 – 1986. *General Manager of Budget dan Business Development* PT Astra Internasional Inc;
- 1981 – 1983. *Finance Manager of Heavy Equipment and Shipping* PT Astra Internasional Inc;
- 1975 – 1981. *Finance Manager* PT Broken Hill Proprietary Indonesia.



Gunawan Santoso, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Nganjuk pada tahun 1967. Memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Nuklir, Universitas Gajah Mada pada tahun 1989. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2011. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 beliau diangkat kembali menjadi Komisaris. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut :

- 2011 – sekarang. Komisaris PT Verena Multi Finance Tbk;
- 2007 – sekarang. Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 2000 – 2007. Komisaris PT Clipan Finance Tbk.;
- 1995 – 2007. *Vice President* – Kepala Divisi Treasury PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 1993 – 1995. *Assistant Vice President* – Pjs Kepala Divisi Treasury PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 1991 – 1993. Kabag Forex & Pasar Uang PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 1989 – 1991. *Assistant Manager* Bagian Pasar Uang PT Bank Pan Indonesia Tbk.



Evi Firmansyah. Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, lahir di Tanjung Pinang pada tahun 1957. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1983. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 beliau diangkat menjadi Komisaris Independen. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Juli 2014 – sekarang. Komisaris Independen PT Verena Multi Finance Tbk.;
- Februari 2012 - Februari 2014. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero);
- Desember 2007 – Desember 2012. Vice President Director PT Bank Tabungan Negara (Persero);
- Oktober 2004 - Desember 2007. Direktur PT Bank Ekspor Indonesia;
- Agustus 2004 - Oktober 2004. Direktur BNI Securities;
- 2003 – 2004. Komisaris PT Bank Bumi Putera;
- 2002 – 2004. Executive Director PT Danareksa (Persero) Holding Company;
- 1996 – 2002. Vice President PT Danareksa (Persero) Holding Copany;
- 1996 – 2002. Direktur PT Danareksa Finance;
- 1996 – 2002. Direktur PT Danareksa Currency Fund;
- 1996 – 2002. President Director PT Danareksa Future;
- 1996 – 2002. Managing Director PT Danareksa BV;
- 1994 – 1995. Assistant Vice President Bank Dagang dan Industri;
- 1990 – 1994. Manajer Bank Societe General – Indonesia;
- 1984 – 1990. Deputy Manager Bank Ekspor Impor – Indonesia.

Direksi:



Andi Harjono. Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1969. Memperoleh gelar Master of International Management dari American Graduate Shool of International Management, USA pada tahun 1994. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur sejak Juli 2007. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2018 beliau diangkat menjadi Direktur Utama. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Oktober 2016 – sekarang. Direktur Utama PT Verena Multi Finance Tbk;
- 2007 – Juni 2016. Direktur PT Verena Multi Finance Tbk;
- 2002 – 2007. Vice President. Deputy Emerging Prodives Business; Division PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bogasari Flour Mills;
- 2001 – 2002. Financial & Operational Advisor Sekar Group PT Tri Panji Anugrah;
- 1999 – 2001. Manager PT Tunas Sepadan Investama;
- 1998 – 1999. Manager. Carbonless Paper Export Marketing Division PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills;
- 1995 – 1998. Manajer Keuangan & Akunting PT Bentala Mahaya;
- 1993 – 1993. Finance Officer PT Astra Graphia Tbk.



Iman Santoso Iskandar, Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Semarang pada tahun 1962. Menjalani Pendidikan tingkat akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2018 beliau diangkat menjadi Direktur. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Oktober 2016 – sekarang. Direktur PT Verena Multi Finance Tbk;
- Juni 2014 – Mei 2016 Direktur Operasional PT. Nusantara Berlian Motor;
- Juni 2013 – Mei 2014 Direktur Marketing PT. Integra;
- November 2006 – Juni 2012 Direktur Marketing PT. Verena Multi Finance Tbk;
- November 2005 – Oktober 2006 Direktur Marketing PT. Bumen Redja Abadi;
- September 2004 – Oktober 2005 Direktur Marketing PT. Amazon Automobile Industry;
- Oktober 2002 – Agustus 2004 Direktur PT. Allbrite Invesmen;
- Oktober 2002 – Agustus 2004 Direktur Utama PT. Tristar Dinamika;
- Agustus 2001 – September 2002 Deputy Direktur Marketing PT. Hyundai Mobil Indonesian;
- Januari 2001 – Juli 2001 General Manager Disivisi Marketing (Panther) PT. Astra Internasional ISUZU;
- September 1991 – Desember 2000 Head National Operation Manager PT. Astra Internasional DAIHATSU;
- April 1988 – September 1991 Branch Manager PT. Indomarco.



Iman Syahrizal, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1969. Memperoleh gelar Sarjana bidang Teknik Industri dari Universitas Trisakti, memperoleh gelar Magister Pengembangan Masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Indonesia, pernah mendapatkan pendidikan Magister Bisnis di Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur sejak April 2013. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2018 beliau diangkat menjadi Direktur Independen. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Oktober 2016 – Sekarang. Direktur Indepeden PT Verena Multi Finance Tbk;
- 2013 – Juni 2016. Direktur PT Verena Multi Finance Tbk;
- 2012. Operation Development & AR Division Head PT Surya Artha Nusantara Finance;
- 2008 – 2012. Sales Marketing & AR Division Head PT Surya Artha Nusantara Finance;
- 2005 – 2008. Credit & AR Departement Head PT Surya Artha Nusantara Finance;
- 2005. Fleet Credit Departement Head Astra Credit Company Sekawan;
- 2003 – 2005. Fleet AR Management Head – Indonesia Timur Astra Credit Company;
- 1997 – 1998. Fleet Credit Analyst Astra Credit Company;
- 1996 – 1997. Kepala Cabang Bandung PT Surya Artha Nusantara Finance;
- 1997 – 1998. Marketing Segment Leader. Busines Proses Engineering PT Surya Artha Nusantara Finance;
- 1996. Account Officer PT Surya Artha Nusantara Finance.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Gaji dan manfaat kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan 2016, masing-masing sebesar Rp 683 juta, Rp 1.368 juta dan Rp 1.282 juta, sedangkan untuk anggota Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp 2.424 juta, Rp 4.673 juta dan Rp 4.360 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Untuk memenuhi POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Iman Syahrizal sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. 010/TK-CORSEC/VI/16 tanggal 22 Juni 2016. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Iman Syahrizal (Direktur Independen)
Nomor Telepon : (021) 350-4890
Faksmili : (021) 350-4891
E-mail : investor@verena.co.id
Alamat : Gedung Bank Panin, Lantai 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84
Jakarta 10120

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat. termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- e. Memelihara dan menjamin komunikasi yang intensif dengan para investor.

5. Komite Audit

Sesuai ketentuan POJK No. 55/2015 dan Peraturan No. 1-A – Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang bernama PT Bursa Efek Indonesia) No. Kep-305/BEJ/07/2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/BOC-VMF/Legal/V/17 tanggal 22 Mei 2017. dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Evi Firmansyah (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Evelyn Natasha
2. Bondan Anugrah

Evelyn Natasha, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 27 tahun. Memperoleh gelar Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya, pada tahun 2013. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, beliau sebagai Auditor KAP Pricewaterhouse Coopers Indonesia.

Bondan Anugrah, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti. Beliau memulai karir menjadi Accounting Supervisor pada PT. Dos Ni Roha pada tahun 2000 hingga 2004, kemudian menjadi Accounting Section Head pada PT Verena Oto Finance pada tahun 2004 hingga 2008, kemudian menjadi Finance & Accounting Manager pada PT. Global Madya Kencana pada tahun 2008 hingga 2011, kemudian menjadi Finance & Accounting Manager pada PT Cendana Wangi Energy pada tahun 2011 hingga 2013, dan Finance, Tax & Accounting Manager pada PT Sekawan Intiperkasa dari tahun 2013 hingga sekarang.

Penunjukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Sesuai ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal POJK No. 56/2015, piagam audit internal Perusahaan telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan surat penunjukan oleh Direksi Perusahaan No. 063/ VMF/X/IV/12 tertanggal 16 April 2012, Kepala Unit Audit Internal adalah Teddy Hariyadi

Unit Audit Internal Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional dan independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Unit Audit Internal Tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan operasional Perusahaan sesuai SOP, Kebijakan, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan bidang :
 - Keuangan
 - Akuntansi
 - Operasional
 - Sumber Daya Manusia
 - Pemasaran
 - Teknologi Informasi
 - Kegiatan Perusahaan lainnya
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- f. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilaksanakan.
- i. Bekerjasama dengan Komite Audit.
- j. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan bekerja berdasarkan Pedoman Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Merujuk pada POJK No. 34/2014, maka melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Verena Multi Finance Tbk Nomor: 005/BOC-VMF/TK/V/17 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Verena Multi Finance Tbk., tanggal 22 Mei 2017 susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perusahaan adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua	: Evi Firmansyah (Komisaris Independen)
Anggota	: Murniaty Santoso (Komisaris Utama)
Anggota	: Gunawan Santoso (Komisaris)

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Terkait dengan fungsi Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan bersaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Memonitor penerapan kebijakan dan program remunerasi.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sistem rekrutmen Perseroan :

Sistem rekrutmen pada Perseroan mengacu kepada adanya kebutuhan operasional serta melihat peran dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi:

- a. Mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan.

Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, dan lain-lain. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut.

- b. Mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan.

Untuk memperoleh uraian jabatan (*job description*) dan spesifikasi jabatan (*job specification*) sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Perseroan menerapkan sistem persyaratan jabatan secara hati-hati dan sejelas mungkin sehingga dalam penerapannya kandidat yang didapatkan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan.

- c. Menetapkan sumber, media, dan sarana untuk mendapatkan kandidat yang tepat.

Dua alternatif untuk mencari kandidat yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut.

- d. Memilih metode-metode proses rekrutmen yang tepat.

Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh Perseroan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan, *employee referrals*, *walk-ins & write-ins*, *head hunter*, lembaga pendidikan, dan berbagai sumber lain. Perseroan juga dapat memilih lebih dari satu metode. tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.

- e. Memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan.

Mengumpulkan berkas-berkas lamaran kandidat, dan meminta kandidat untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi.

f. Menyaring & menyeleksi kandidat.

Prosedur seleksi perlu dilakukan karena: 1) pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang; 2) ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak teknik atau metode seleksi yang digunakan oleh Perseroan dalam menyaring karyawan. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu, sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Pemilihan suatu teknik/metode sebagai predictor dalam prosedur seleksi sangat tergantung pada: ciri-ciri pekerjaan, validitas dan reliabilitas metode, persentase calon yang terseleksi, dan biaya penggunaan teknik tertentu. Perseroan menggunakan teknik seleksi sebagai berikut :

- Mengisi formulir lamaran, data biografi, referensi dan rekomendasi;
- 1 kemampuan dan kepribadian;
- Wawancara oleh HRD dan *End User*;
- *Test fisik/fisiologis & test simulasi pekerjaan* (untuk posisi-posisi tertentu);
- *Assessment* oleh pihak independen (eksternal).

Sistem Pelatihan & Pengembangan Karyawan :

Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting bagi pengembangan produktivitas dan efektivitas karyawan guna mencapai tujuan umum Perseroan, yaitu memiliki karyawan yang kompeten (memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan) yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan lebih baik.

a. Berdasarkan sasarannya, *training* yang diberikan kepada karyawan dapat dibedakan dalam 2 jenis. yaitu :

1. *Technical Training*
Merupakan jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk menambah keterampilan dan keahlian sesuai dengan jenis pekerjaannya.
2. *Non Technical Training*
Merupakan jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk membentuk perilaku, dan sifatnya menambah pengetahuan dan wawasan di luar pekerjaannya.

b. Berdasarkan teknis pelaksanaannya, *training* yang diberikan kepada karyawan dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *On the Job Training*
Meliputi semua upaya untuk melatih karyawan di tempat kerja yang sesungguhnya. Yang termasuk dalam kategori *on the job training* ini antara lain: magang, rotasi pekerjaan.
2. *Off the Job Training*
Meliputi semua upaya untuk menambah pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan karyawan pada waktu yang terpisah dengan waktu kerja reguler. Yang termasuk dalam kategori *off the job training* ini antara lain: kursus-kursus, workshop, seminar.
Pelaksanaan *off the job training* dapat berupa program-program *training internal (in-house)* yaitu *training* yang dilaksanakan di dalam Perseroan, maupun program-program *training eksternal (off-site)* yaitu *training* yang dilaksanakan di luar Perseroan dengan melibatkan pihak luar (*outsourcing*).

Langkah-langkah yang ditempuh Perseroan dalam proses pelaksanaan *training* :

- Menganalisa kesenjangan kinerja yang sekarang dengan kinerja optimum yang diinginkan oleh Perseroan menyebabkan kebutuhan terhadap *training*. Inilah tahap awal pengajuan program *training*;
- Melakukan penelitian untuk menentukan penyebab serta konsekuensinya. Penyelidikan lebih lanjut mengenai problem kinerja manajemen ini diidentifikasi;
- Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa problem itu disebabkan oleh sikap atau perilaku serta pengetahuan atau keterampilan yang kurang, maka kebutuhan pembelajaran dikembangkan dan dijabarkan secara detail;
- Berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang sudah dijabarkan, bagian *training* merancang sebuah paket pembelajaran yang sesuai dalam materi, model, media dan metode penyampaian;
- Secara kolektif tim *training* mempersiapkan bahan yang cocok untuk pengembangan materi serta program pembelajaran;
- Materi serta bahan yang sudah lengkap disampaikan oleh bagian operasional (tim instruktur). Hasilnya kemudian di evaluasi dan materi dikaji ulang kembali;
- Realisasi lapangan dari materi yang sudah disampaikan sebagai hasil pembelajaran dimonitor secara terus-menerus.

- Hasil dari monitor yang dilakukan dijadikan sebagai umpan balik pada fase perancangan materi berikutnya.

c. Komposisi Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan yang tercatat di Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebanyak 463 orang. Adapun komposisi karyawan dari tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut :

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajerial adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Manajemen	30-Jun		31-Des		31-Des					
		2018		2017		2016		2015		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Komisaris	2	0.43	2	0.31	3	0,41	3	0,43	3	0,38
2	Direksi	3	0.65	3	0.46	3	0,41	3	0,43	4	0,5
3	General Manager	4	0.86	5	0.77	4	0,55	2	0,28	3	0,38
4	Manager	40	8.64	42	6.45	44	6,05	45	6,42	51	6,38
5	Supervisor	88	19.01	99	15.21	94	12,91	98	13,98	91	11,38
6	Officer	326	70.41	500	76.80	580	79,67	550	78,46	647	80,98
Total		463	100,00	651	100,00	728	100,00	701	100,00	799	100,00

Komposisi karyawan Perseroan menurut kelompok usia adalah berikut :

No	Jenjang Manajemen	30-Jun		31-Des		31-Des					
		2018		2017		2016		2015		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	18 - 25 tahun	68	14.69	98	15.05	99	13,6	83	11,84	119	14,89
2	26 - 35 tahun	189	40.82	298	45.78	368	50,55	381	54,35	426	53,32
3	36 - 45 tahun	162	34.99	212	32.57	222	30,49	204	29,1	226	28,29
4	> 45 tahun	44	9.50	43	6.61	39	5,36	33	4,71	28	3,5
Total		463	100,00	651	100,00	728	100,00	701	100,00	799	100,00

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Manajemen	30-Jun		31-Des		31-Des					
		2018		2017		2016		2015		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sarjana	279	60.26	392	60.22	423	58,1	395	56,35	440	55,07
2	Diploma (D1 – D3)	70	15.12	108	16.59	126	17,31	114	16,26	136	17,02
3	SMU/SMK/SMEA/STM Dan di bawahnya	114	24.62	151	23.20	179	24,59	192	27,39	223	27,91
Total		463	100,00	651	100,00	728	100,00	701	100,00	799	100,00

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang status adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Manajemen	30-Jun		31-Des		31-Des					
		2018		2017		2016		2015		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pegawai Tetap	380	82.07	472	72.50	498	68,4	517	73,75	538	67,33
2	Pegawai Kontrak	83	17.93	179	27.50	230	31,6	184	26,25	261	32,67
Total		463	100,00	651	100,00	728	100,00	701	100,00	799	100,00

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja. Hingga 30 Juni 2018 Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset penggerak Perseroan dan sebagai kekuatan utama segala kegiatan usaha Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan sangat peduli dan ikut terlibat dalam mempersiapkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi. Perseroan juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan karyawannya dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan serta terus meningkatkan kesejahteraan karyawan-karyawannya agar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

Perseroan juga memiliki program untuk karyawan, yaitu VLC (*Verena Learning Centre*). Untuk karyawan baru, Perseroan telah memiliki jadwal dan pelatihan yang baku dan standar. Perseroan senantiasa berusaha mengembangkan kemampuan karyawannya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya, diantaranya melalui program sertifikasi terhadap karyawan.

Perseroan melakukan survei terhadap tingkat kepuasan karyawan Perseroan. Survei ini merupakan perwujudan dari sistem manajemen transparan yang dianut oleh Perseroan. Semua karyawan berhak untuk berpendapat demi kemajuan dan kejayaan Perseroan.

e. Kesejahteraan Karyawan

Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemberian jaminan kesehatan dan asuransi jiwa. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berstatus karyawan tetap.

Disamping penyediaan berbagai macam fasilitas tersebut di atas, Perseroan secara terencana mengadakan perbaikan sistem pengupahan dan secara berkala melakukan peningkatan upah/gaji karyawan dengan memperhatikan laju inflasi dan produktivitas.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

8. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan Perseroan, karena Perseroan menyadari bahwa kemajuan suatu Perusahaan terbentuk dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Secara berkesinambungan Perseroan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan Perseroan.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berikut penerapan-penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyediakan informasi yang cukup dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perseroan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang diungkapkan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan visi, misi, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus, pemegang saham pengendali, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, pelaksanaan tata kelola serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pimpinan Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan dikelola secara benar dan terukur. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan dan seluruh jajarannya secara jelas yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
- b. Perusahaan meyakini bahwa semua organ Perusahaan dan seluruh jajarannya mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- c. Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan, sasaran utama dan strategi Perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpedoman pada etika bisnis yang berlaku.

3. **Responsibilitas**

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan terlaksananya peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan internal.
- b. Perusahaan peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menjalankan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

4. **Independensi**

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Masing-masing organ Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. **Kewajaran dan Kesenjangan**

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan Perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing pegawai.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Adanya Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, sehingga diperlukan penerapan tata kelola terintegrasi.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Konglomerasi Keuangan Panin menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

PT Verena Multi Finance Tbk., sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Panin yang merupakan salah satu anak yang bergerak dalam bidang jasa keuangan non bank dimana Bank Panin saat ini merupakan pemegang saham pengendali. Untuk itu perseroan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup :

1. Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tugas dan Tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.

4. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Kinerja Perseroan sangat berkaitan erat dengan risiko usaha. Dengan demikian, proses dan struktur usaha yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah memperhatikan proses identifikasi, penanggulangan risiko usaha. Pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan dan Perseroan telah menerapkan manajemen risiko secara cermat dan tepat-guna untuk mencapai kinerja Perseroan yang diharapkan dengan risiko yang minimal.

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan ini, Perseroan telah melakukan proses sosialisasi dan implementasi nilai-nilai Perseroan yaitu integritas, gigih dan pantang menyerah, kerja-sama tim yang solid, lebih mudah-cepat-aman. Untuk menjamin efektivitas penerapan manajemen risiko serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, Perseroan sudah menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RSCA) pada seluruh bidang usaha sehingga risiko yang melekat dapat diminimalisasi sehingga tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan.

BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*)

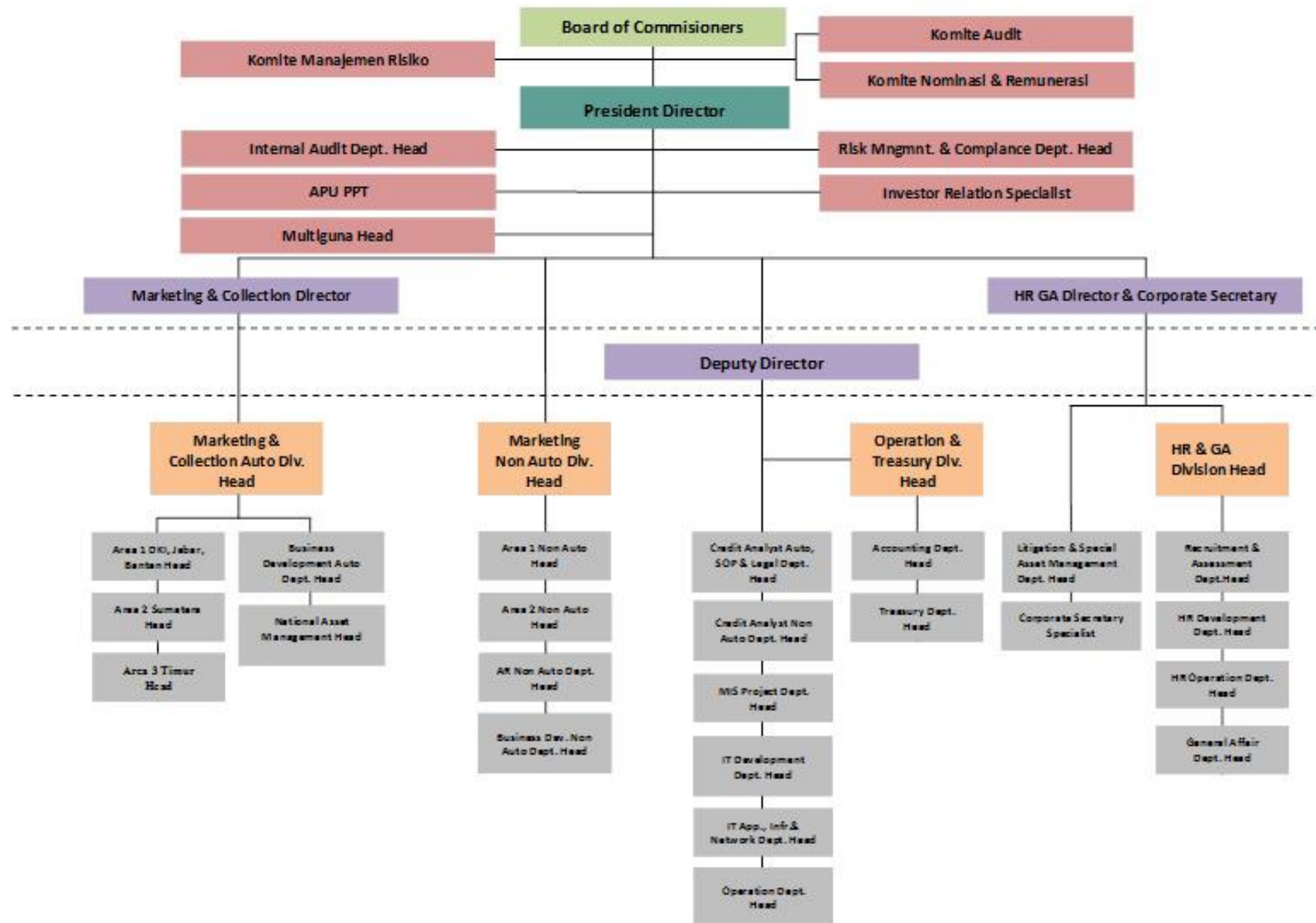
Penggunaan belanja modal terutama ditujukan untuk mendanai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendukung operasional, perluasan/perbaikan jaringan kantor secara umum, teknologi informasi, serta saluran distribusi lainnya.

Capital expenditure seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Nilai keseluruhan sebesar Rp 13.200 juta, dalam mata uang Rupiah, dan bagian yang telah direalisasi per 30 Juni 2018 sebesar Rp 10.560 juta. Pihak yang terkait dalam perjanjian adalah PT Inovasi Mitra Sejati (IMS).

Pembelian barang modal yang dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Prakiraan periode dimulai proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal yaitu pada 6 Januari 2016 dan estimasi penyelesaian pada 1 Juli 2019.

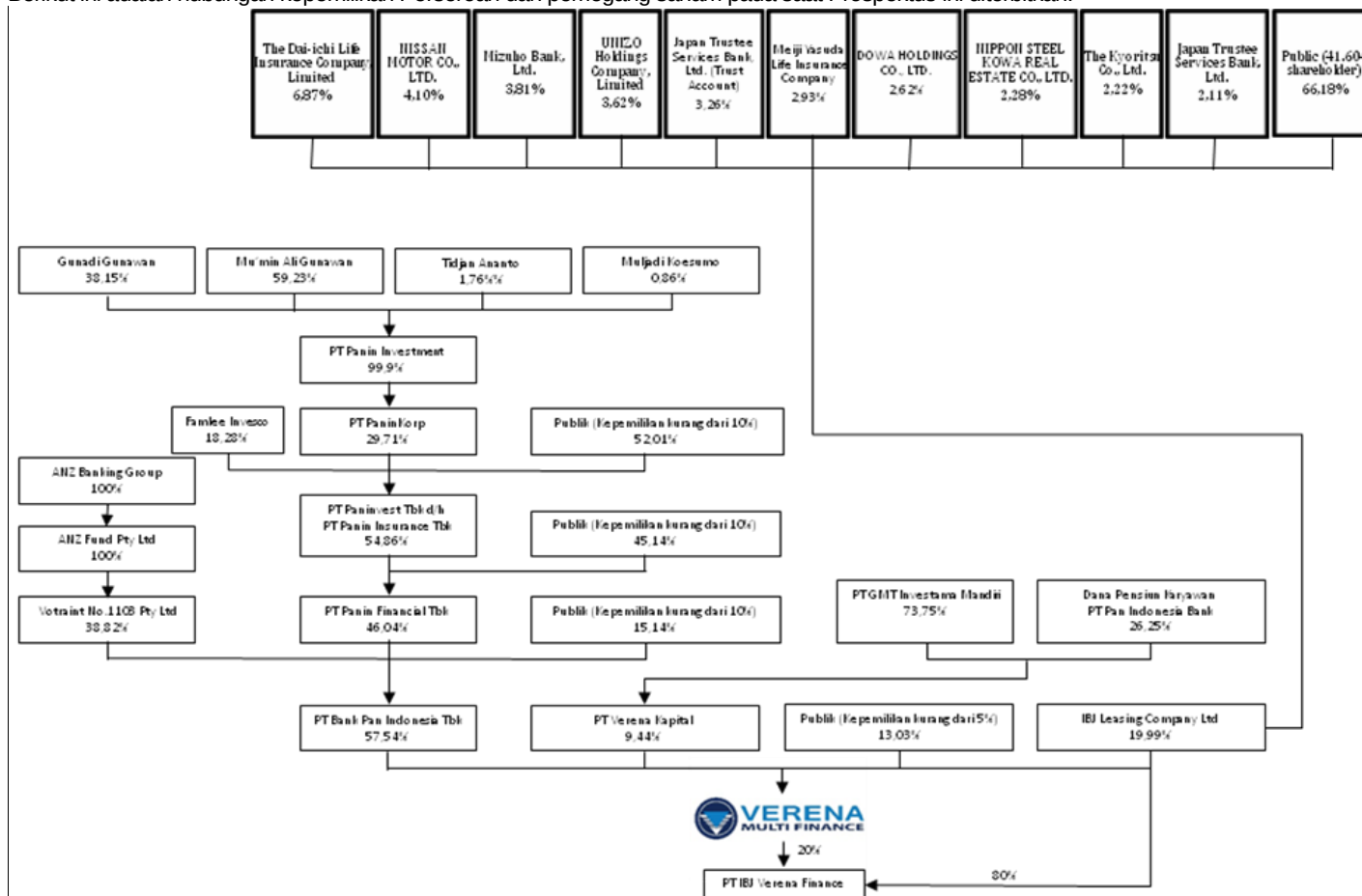
Investasi secara geografis berlokasi di Kantor Pusat di DKI Jakarta, tetapi dapat digunakan di seluruh kantor cabang Perseroan, dimana investasi teknologi tersebut akan meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan, seperti program aplikasi sistem multi finance, keuangan, serta aplikasi HRIS (*Human Resources Information Systems*) yang terintegrasi antara kantor pusat dengan kantor cabang.

9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



10. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan:



Keterangan: Pemegang Saham IBJ Leasing Company Ltd yang ditampilkan yaitu 10 besar pemegang saham, karena seluruh pemegang sahamnya berjumlah 41.614 pemegang saham.

Berikut ini merupakan tabel hubungan Kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Pemegang Saham Berbadan Hukum:

Nama	Perseroan	Bank Panin
Murniaty Santoso	KU	-
Evi Firmansyah	KI	-
Gunawan Santoso	K	D
Andi Harjono	DU	-
Iman Santoso Iskandar	D	-
Iman Syahrizal	D	-

Keterangan: KU = Komisaris Utama; KI = Komisaris Independen; K = Komisaris; DU = Direktur Utama; D = Direktur; Bank Panin = PT Bank Pan Indonesia Tbk

11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dan kepemilikan sahamnya di atas 5% (lima persen) atau lebih adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., dan PT Verena Kapital.

PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Riwayat Singkat

PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, (untuk selanjutnya disebut "PT. Bank Panin Tbk") didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971 sebagai hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan mereka. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 85. tanggal 17 Agustus 1971, dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta No. 48 tanggal 10 April 1972 dan No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti dari Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta. Ketiga akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. J.A.5/81/24. tanggal 19 April 1972, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45. tanggal 6 Juni 1972. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 210.

PT Bank Panin Tbk, telah beberapa kali mengadakan perubahan anggaran dasar. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk., dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termaktub dalam akta No. 81 tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.78480.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2009 No. 13. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4246.

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk., sehubungan dengan perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta No. 09 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No AHU-46590. AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-26581 tanggal 20 Oktober 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 Maret 2012 nomor 18 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5579.

Perubahan anggaran dasar PT Bank Panin Tbk., yang terakhir sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan (i) POJK No. 32/2014 dan (ii) POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan surat No. AHU-AH.01.03-0055417 (untuk perubahan anggaran dasar PT Bank Panin Tbk.) dan No. AHU-AH.01.03-0055418 (untuk perubahan data PT Bank Panin Tbk.) keduanya tertanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Untuk Akta Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Panin Tbk., terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta No. 47 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214639 tanggal 08 Juni 2018.

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum dan sebagai bank devisa, PT Bank Panin Tbk., memiliki izin untuk beroperasi sebagai bank umum dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-205/DDKIIJ8/1971, tanggal 18 Agustus 1971 dan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5J2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 42 tanggal 19 Mei 2016, maksud dan tujuan PT Bank Panin Tbk., ini adalah menjalankan usaha sebagai bank umum.

PT Bank Panin Tbk., berdomisili di Gedung Bank Panin Pusat. Jl. Jend. Sudirman Kav. 1. Senayan. Jakarta Pusat. 10270.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT Bank Panin Tbk., adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sehubungan Dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal Dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., No. 9 tanggal 9 Juli 2010 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46590.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071414.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 serta diumumkan Tambahan No. 5579. BNRI No. 18 tanggal 2 Maret 2012.

Struktur permodalan PT Bank Panin Tbk., tersebut telah dinyatakan kembali dalam akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Nomor AHU-AH.01.03-0055417 (untuk perubahan anggaran dasar PT Bank Panin Tbk.) dan No. AHU-AH.01.03-0055418 (untuk perubahan data PT Bank Panin Tbk.) keduanya tertanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham PT Bank Panin Tbk., per tanggal 30 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh PT Bank Panin Tbk., pada tanggal 2 Oktober 2018 Susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000.-	
Pemegang Saham :			
1. PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	1.108.907.128.500.-	46,04
2. Votaint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200.-	38,82
3. Direktur :			
- Roosniati Salihin	6.416.037	641.603.700.-	0,03
- Hendrawan Danusaputra	1.000.000	100.000.000.-	0,00
4. Masyarakat < 5%	3.641.365.524	364.136.552.400.-	15,11
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800.-	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200.-	

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, maksud dan tujuan PT Bank Panin Tbk., ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Panin Tbk., dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.

- b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
- c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
- d. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).
- e. Obligasi.
- f. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
11. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
18. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - c. Kertas perbendaharaan Negara Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dan kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank Panin, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan pentipkan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 21 Mei 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214639 tanggal 08 Juni 2018. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080379.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018, anggota Dewan Komisaris menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diadakan pada tahun 2020, sedangkan anggota Direksi menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang akan diadakan pada tahun 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Drs. Johnny**)
Wakil Presiden Komisaris /Komisaris Independen	: Lintang Nugroho
Komisaris	: Chandra Rahardja Gunawan*)
Komisaris Independen	: Drs. H. Riyanto
Komisaris	: Lianna Loren Limanto

Direksi

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Roosniati Salihin
Wakil Presiden Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Linto Gunawan
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: Ng Kean Yik
Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Januar Hardi
Direktur Kepatuhan	: Antonius Ketut Dwirianto
Direktur	: Suwito Tjokrorahardjo
Direktur	: H. Ahmad Hidayat

*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

**) Drs. Johnny telah mengundurkan diri dari jabatan Presiden Komisaris PT Bank Panin Tbk sejak tanggal 20 September 2018

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/2014.

12. KETERANGAN MENGENAI PENYERTAAN SAHAM OLEH PERSEROAN

Pada tahun 2010 Perseroan melakukan penyertaan saham sebanyak 17,54% (tujuh belas koma lima empat persen) atau 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham dalam PT IJB Verena Finance, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan pada tahun 2017 Perseroan menambah penyertaan saham sebanyak 2,46% (dua koma empat puluh enam persen) atau 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dalam PT IJB Verena Finance, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Rupiah) sehingga total penyertaan saham Perseroan seluruhnya sebanyak 20%. Berikut ini adalah keterangan mengenai PT IBJ Verena Finance sebagai berikut:

Riwayat Singkat

PT IBJ Verena Finance ("IBJ") berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IBJ Verena Finance No. 30 tanggal 28 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-40569.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061687.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 ("Akta No. 30/2010").

Sampai dengan saat ini, status operasional IBJ adalah aktif. IBJ berdomisili di Jl. Asia Afrika No. 8. Sentral Senayan I. lantai 6/ 106D. Kel. Gelora. Kec. Tanah Abang. Jakarta Pusat 10270.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30/2010, maksud dan tujuan IBJ ialah berusaha di bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha;
- menjalankan usaha dalam bidang anjak piutang;
- menjalankan usaha dalam bidang kartu kredit;
- menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen;
- melakukan segala sesuatu yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat menunjang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, IBJ telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-594/KM.10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT IBJ Verena Finance.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham IBJV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp1.000.000)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
IBJL	141.000	141.000.000.000	80
Perseroan	35.250	35.250.000.000	20
Total	176.250	176.250.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi IBJV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Masayuki Ando
 Direktur : Konosuke Mizuta
 Direktur : Linus Nusawirawan Suseno
 Direktur : Ade Rafida Saulina Samosir

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Yasuo Sato
 Komisaris Independen : Mohammad Syahril

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit dan direviu:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Jumlah Aset	943.726	966.248	1.120.625
Jumlah Liabilitas	718.200	746.319	914.546
Jumlah Ekuitas	225.526	219.929	206.079

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2018	30 Juni 2017	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Diaudit)	(Tidak diaudit dan di revidi)	(Diaudit)	(Diaudit)
Pendapatan	31.395	31.835	63.621	64.057
Beban	23.908	24.392	47.692	55.184
Laba sebelum beban pajak	7.487	7.443	15.929	8.873
Laba bersih periode berjalan	5.396	5.360	11.472	6.218
Total Laba (Rugi) Komprehensif	5.597	3.130	8.600	(12.066)

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Perusahaan-perusahaan yang berelasi adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT IBJ Verena Finance .

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

- Penempatan dana kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk dalam bentuk giro, deposito berjangka dan penerimaan bunga.
- Memberikan fasilitas pinjaman kepada manajemen kunci.
- Memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dan pembayaran bunga. Perseroan juga mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk dimana Perseroan setuju membuka kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Pan Indonesia Tbk.
- Surat berharga perusahaan dibeli oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan Anggota Dewan Direksi PT Bank Pan Indonesia Tbk.
- Biaya dibayar di muka untuk sewa gedung dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan jangka waktu 3 bulan sebesar nihil untuk tahun 2018 dan Rp 530.442 ribu untuk tahun 2017. Sewa gedung dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dapat diperpanjang.

Persentase kas dan setara kas, piutang lain-lain biaya dibayar di muka dan aset lain-lain - bersih dari pihak berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut :

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Kas dan setara kas	0,075	1,217	0,026
Piutang lain-lain	0,004	0,004	0,029
Biaya dibayar di muka	0,000	0,000	0,020
Aset lain-lain - bersih	1,134	1,492	1,012
Jumlah	1,213	2,713	1,087

Persentase utang bank, biaya masih harus dibayar dan surat berharga yang diterbitkan - MTN dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Utang bank	44,041	34,397	18,224
Biaya masih harus dibayar	0,130	0,160	0,046
Surat berharga yang diterbitkan - MTN	6,777	5,522	1,330
Jumlah	50,948	40,079	19,600

Persentase pendapatan bunga dari pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam persentase)			
	30 Juni		31 Desember	
	2018 (Enam bulan)	2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)
Pendapatan bunga	0,027	0,079	0,054	0,011
Jumlah	0,027	0,079	0,054	0,011

Persentase beban bunga dan pembiayaan lainnya, serta beban umum dan administrasi dari pihak berelasi terhadap jumlah beban adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam persentase)			
	30 Juni		31 Desember	
	2018 (Enam bulan)	2017 (Enam bulan) (Tidak diaudit dan direviu)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)
Bunga dan pembiayaan lainnya	14,650	11,882	12,543	6,391
Beban umum dan administrasi	0,802	0,809	0,808	0,783
Jumlah	15,452	12,691	13,351	7,174

Manajemen menyatakan transaksi-transaksi berelasi dilakukan dengan syarat normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak lainnya.

14. KETERANGAN PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1) IBJ Leasing Company, Limited ("IBJL")

a. Riwayat Singkat

IBJ Leasing Company, Limited, merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang pada tahun 1969 yang beralamat di 2-6, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Jepang. IBJL didirikan sebagai perusahaan pembiayaan yang diprakarsai oleh The Industrial Bank of Japan, Ltd. (sekarang Mizuho Bank, Ltd.) dengan partisipasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mewakili industri Jepang. Grup IBJL, secara pro-aktif mengembangkan bisnisnya pada bidang pembiayaan barang modal dan penjualan secara angsuran (*leasing & installment sales*), pembiayaan atas barang (*financing of physical items*), beroperasi sebagai bagian dari grup di bidang jasa keuangan yang mempunyai berbagai sumber pendanaan dan yang menyediakan beragam jasa kepada klien-klien korporasi di Jepang maupun diluar Jepang. Selain memberikan pembiayaan terhadap belanja modal, termasuk peralatan industri dan pabrik, perangkat informasi dan komunikasi dan peralatan kesehatan, IBJL juga mengembangkan cakupan kegiatan bisnisnya dengan menawarkan penyelesaian yang lebih luas yang dapat memenuhi kebutuhan klien yang semakin beragam, melalui jangkauan yang sangat luas di sektor keuangan dan juga melalui kegiatan merger dan akuisisi.

Grup IBJ Leasing terdiri dari IBJL, 26 anak perusahaan yang terkonsolidasi dan 3 perusahaan afiliasi. IBJL menyediakan jasa keuangan yang sangat luas, termasuk pembiayaan barang modal (*leasing*), penjualan secara angsuran (*installment sale*) dan pinjaman (*loans*) dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai barang peralatan dan ahli-ahli keuangan. Selain di Jepang, Grup IBJ Leasing juga memenuhi kebutuhan para klien di negara-negara diluar Jepang, berpusat di Asia, dengan grup perusahaan untuk memberikan solusi yang terbaik kepada klien.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham IBJL

Pemegang Saham IBJL terdiri atas insitusi finansial (41,1%), perusahaan domestik (29,6%), investor asing (14,3%), perorangan (13,1%) dan penyelenggaraan instrumen finansial (1,9%). Adapun struktur permodalan dan komposisi pemegang saham IBJL pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Ekuitas (dalam jutaan Yen)	(%)
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited	2.930.000	6,87
NISSAN MOTOR CO.,LTD. Retirement Benefit Trust Account, with the trustee being Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd. and re-trustee Trust & Custody Services Bank, Ltd.	1.750.000	4,10
Mizuho Bank, Ltd.	1.626.400	3,81
UNIZO Holdings Company, Limited	1.546.000	3,62
Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust Account)	1.393.100	3,26
Meiji Yasuda Life Insurance Company	1.251.700	2,93
DOWA HOLDINGS Co., Ltd.	1.120.000	2,62
Nippon Steel Kowa Real Estate Co., Ltd.	975.000	2,28
The Kyoritsu Co., Ltd.	949.000	2,22
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (TOSHIBA CORPORATION Retirement Benefit Trust Account re-entrusted by the Mitsui Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.)	900.000	2,11
Public (41604 shareholder)	28.207.800	66,18
Total	42.649.000	100,00

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah susunan pengurus IBJL pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini:

President & Chief Executive Officer	: Hiroshi Motoyama
Deputy President	: Katsuji Nagatsu
Senior Managing Director	: Shin Kuranaka
Managing Director	: Shinichiro Maruyama
Managing Director	: Masaya Hamamoto
Managing Director	: Akira Ueda
Outside Director	: Takao Komine
Outside Director	: Masatoshi Kiriya
Outside Director	: Yasuyuki Sugiura

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting

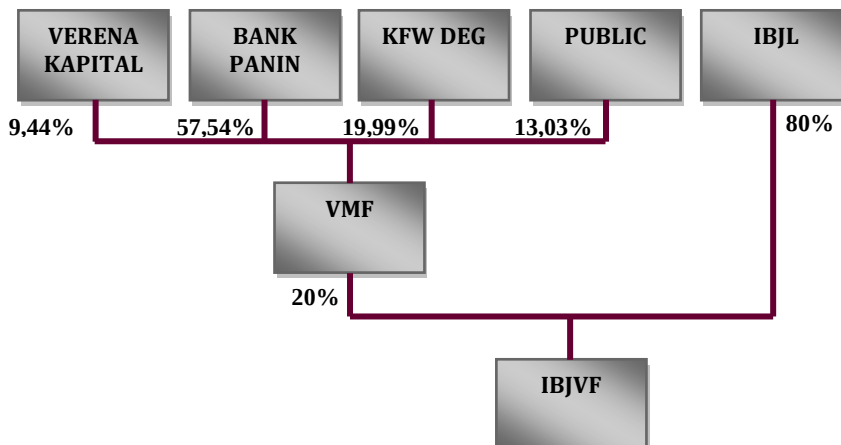
Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting IBJL berdasarkan laporan keuangan perusahaan:

(dalam Jutaan Yen)

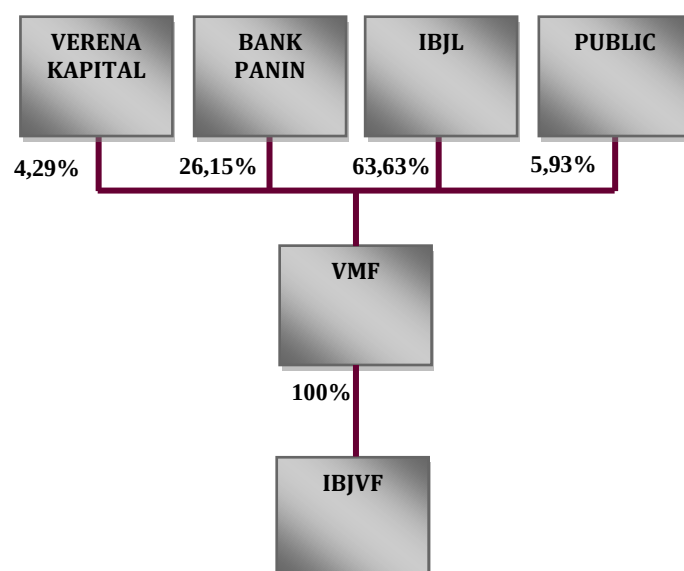
Uraian	30 Juni 2018	31 Maret 2017 (diaudit)	31 Maret 2016 (diaudit)
Total Aset	1.953.072	1.752.284	1.718.720
Total Liabilitas	1.797.480	1.610.529	1.585.933
Total Ekuitas	155.591	141.755	132.786

e. Skema Transaksi

Sebelum Transaksi



Setelah Transaksi



2) PT IBJ Verena Finance ("IBJV"):

a. Riwayat Singkat

PT IBJ Verena Finance ("IBJV") didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU- 40569.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 2011, Tambahan No. 28626. Anggaran dasar IBJV telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 03 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Ferry Gustiawan, SH, Notaris di Bekasi terkait dengan perubahan anggaran dasar IBJV tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar 5.250 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menkumham melalui Surat No. AHU- 0940528.AH.01.02 tanggal 27 Februari 2017.

Sesuai dengan anggaran dasar IBJV, ruang lingkup kegiatan utama usaha IBJV meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, termasuk sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek dan infrastruktur serta fasilitas modal usaha. IBJV memulai operasinya pada tanggal 25 Oktober 2010.

IBJV memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan *joint venture* dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. KEP-594/ KM.10/2010 tanggal 25 Oktober 2010. IBJV beralamat di Jakarta dengan alamat di Sentra Senayan III Lantai 13 No. 313A, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat. Jumlah karyawan IBJV adalah 19 dan 17 karyawan pada masing-masing tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Perusahaan tergabung dalam kelompok IBJ Leasing Group dengan entitas induk utama adalah IBJL.

b. Kegiatan Usaha

Pada saat ini, IBJV melakukan kegiatan usaha pembiayaan barang modal dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*) dan pembiayaan langsung ke *supplier* (*direct lease*) dan pembiayaan modal usaha untuk modal kerja (*working capital financing*).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham IBJV pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp1.000.000)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
IBJL	141.000	141.000.000.000	80
Perseroan	35.250	35.250.000.000	20
Total	176.250	176.250.000.000	100

Kepengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi IBJV pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Yasuo Sato

Komisaris Independen : Mohammad Syahrial

Direksi

Direktur Utama : Masayuki Ando

Direktur : Konosuke Mizuta

Direktur : Linus N. Suseno

Direktur : Ade Rafida Saulina S.

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit dan direviu:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018 (diaudit)	31 Desember 2017 (diaudit)	31 Desember 2016 (diaudit)
Total Aset	943.726	966.248	1.120.626
Total Liabilitas	718.200	746.319	914.547
Total Ekuitas	225.526	219.929	206.079

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018 (diaudit)	30 Juni 2017 (tidak diaudit dan direviu)	31 Desember 2017 (diaudit)	31 Desember 2016 (diaudit)
Total Pendapatan	31.395	31.835	63.621	64.057
Total Beban	23.908	24.392	47.692	55.184
Laba (Rugi) sebelum pajak	7.487	7.443	15.929	8.873
Laba (Rugi) setelah pajak	5.396	5.360	11.472	6.219
Total Laba (Rugi) Komprehensif	5.597	3.130	8.600	(12.066)

f. Nilai Transaksi

Nilai Keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar sekitar Rp214.307.032.460 atau sebesar sekitar 48,78% dari ekuitas Perseroan sehingga memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2, dimana Transaksi secara keseluruhan memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) tetapi tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan posisi 30 Juni 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, namun Transaksi ini tidak terdapat transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

g. Alasan dan Latar Belakang

PT IBJ Verena Finance ("IBJV") merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara IBJ Leasing, Company, Limited, Japan ("IBJL") dengan Perseroan, dimana kepemilikan saham pada IBJV yaitu IBJL sebesar 80% dan Perseroan sebesar 20%.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing Perseroan di industri pembiayaan, Perseroan merencanakan akan melakukan PMHMETD II. Dalam PMHMETD II tersebut, IBJL bertindak sebagai Pembeli Siaga dan akan menjadi Pemegang Saham Pengendali ("PSP") dari Perseroan. Rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II, sebagian dananya akan digunakan Perseroan untuk membeli 80% kepemilikan saham IBJL pada IBJV, sehingga seluruh saham IBJV akan dimiliki oleh Perseroan. Dengan demikian, sinergi antar kedua perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh IBJL dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan daya saing Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

15. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Lain

A. PERJANJIAN KREDIT

1. Perjanjian Fasilitas No. FH0262 tanggal 27 Maret 2018

Para Pihak	:	Bank Resona Perdania sebagai Bank Perseroan sebagai Debitur
Fasilitas	:	Pinjaman Berjangka
Tujuan	:	Modal Kerja
Jumlah Fasilitas	:	Rp100.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	02 Maret 2022
Bunga	:	COLF + 3,5%
Jaminan	:	Piutang pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman
Catatan	:	Sebagaimana termaktub dalam Surat Bank No. 1463/SK/BRP/CD/CRD/IX/2018 tanggal 24 September 2018, Bank telah memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk penambahan Modal dengan memberikan HMETD dan perubahan pemegang saham pengendali yang sebelumnya PT Bank Pan Indonesia menjadi IBJ Leasing Compny serta akuisisi saham PT IBJ Verena Finance sebesar 80%

2. Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 10 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Bank Negara Indonesia Tbk. (" Bank ") Perseroan
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas kredit modal kerja
Jumlah Fasilitas	:	Maksimum Rp530.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal Kerja untuk mendukung target pembiayaan di tahun 2017 sebesar Rp2.100.000.000.000.-.
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	14 Desember 2018
Pembatasan (Negative Covenants)	:	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	1. Akta Perjanjian Penanggungan (<i>Borgstelling</i>) No. 23 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana PT Verena Kapital dengan ini menanggung dan mengikatkan diri untuk membayar setiap dan semua jumlah utang yang harus dibayar oleh PT Verena Kapital kepada Bank bilamana Perseroan tidak memenuhi kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya pada waktu yang semestinya; 2. Akta Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan Piutang No. 24 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan memberikan jaminan secara fidusia atas tagihan milik Perseroan sampai dengan nilai penjaminan sebesar maksimum Rp 570.000.000.000,- , serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak Bank untuk melaksanakan Pendaftaran atas Jaminan ini; 3. Akta Perjanjian Cessie No. 25 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan dengan ini memberikan jaminan berupa penyerahan piutang-piutang dalam bentuk cessie kepada Bank; dan 4. Akta Promissory Notes No. 26 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H.,

		Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan menerbitkan promissory notes kepada Bank sebesar Rp 500.000.000.000,-.
Catatan	:	1. Bank telah menyetujui permohonan Perseroan untuk rencana penambahan Modal dengan memberikan HMETD, perubahan pemegang saham pengendali yang sebelumnya PT Bank Pan Indonesia menjadi IBJ Leasing Company serta akuisisi saham PT IBJ Verena Finance sebesar 80%, sebagaimana termaktub dalam Surat Bank No. LMC-1/3.8/1152 tanggal 3 Oktober 2018. 2. Perseroan saat ini sedang dalam proses melakukan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Surat Perseroan nomor : 0432/VMF/FIN/X/18 tertanggal 23 Oktober 2018.

3. Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 04 tanggal 7 September 2018, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan PT Bank Pan Indonesia Tbk. (" Bank ")
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (" Fasilitas PRK ")
Jumlah Fasilitas	:	Fasilitas PRK sebesar Rp30.000.000.000,-
Bunga	:	11% pertahun
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Cadangan modal kerja
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	10 September 2019
Jenis dan Tingkat Suku Bunga per Tahun	:	11% per tahun. Bunga dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	1. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 101 M² yang terletak di Jalan Pintu Air II Nomor 24-A, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2582/Kebon Kelapa berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ; 2. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 87 M² yang terletak di Jalan Pecenongan Raya nomor 72 Blok A-3, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1885/Kebon Kelapa berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ; 3. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 87 M² yang terletak di Jalan Pecenongan Raya nomor 72 Blok A-3A, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1886/Kebon Kelapa berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ; 4. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 129 M² yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Babura, Medan Baru, Kota Medan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 231/Babura berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ; 5. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 124 M² yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Babura, Medan Baru, Kota Medan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 232/Babura berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ;

Catatan	:	PT. Bank Pan Indonesia Tbk telah memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk penambahan Modal dengan memberikan HMETD dan perubahan pemegang saham pengendali yang sebelumnya PT Bank Pan Indonesia menjadi IBJ Leasing Company serta akuisisi saham PT IBJ Verena Finance sebesar 80% sebagaimana dalam suratnya No. 400/IBD/EXT/18 tanggal 21 September 2018.
---------	---	---

4. Akta Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan No. 05 tanggal 7 September 2018, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan PT Bank Pan Indonesia Tbk. (" Bank ")
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Pinjaman Money Market (" Fasilitas PMM ")
Jumlah Fasilitas	:	Rp300.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal kerja pembiayaan
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	10 September 2019
Jenis dan Tingkat Suku Bunga per Tahun	:	Akan ditentukan kemudian pada saat penarikan pinjaman sesuai kondisi pasar yang berlaku. Tingkat suku bunga berlaku selama jangka waktu masing-masing pinjaman.
Pembatasan (Negative Covenants)	:	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	1. Piutang pembiayaan sebesar 100% dari pokok pinjaman, 2. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 101 M² yang terletak di Jalan Pintu Air II Nomor 24-A, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2582/Kebon Kelapa berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya 3. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 87 M² yang terletak di Jalan Pecenongan Raya nomor 72 Blok A-3, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1885/Kebon Kelapa berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ; 4. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 87 M² yang terletak di Jalan Pecenongan Raya nomor 72 Blok A-3A, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1886/Kebon Kelapa berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ; 5. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 129 M² yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Babura, Medan Baru, Kota Medan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 231/Babura berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ; 6. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 124 M² yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Babura, Medan Baru, Kota Medan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 232/Babura berikut segala sesuatu yang tertanam, di atasnya ;
Catatan	:	PT. Bank Pan Indonesia Tbk telah memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk penambahan Modal dengan memberikan HMETD dan perubahan pemegang saham pengendali yang sebelumnya PT Bank Pan Indonesia menjadi IBJ Leasing Company serta akuisisi saham PT IBJ

	Verena Finance sebesar 80% sebagaimana dalam suratnya No. 400/IBD/EXT/18 tanggal 21 September 2018.
--	---

5. Bank Victoria Internasional Tbk tanggal 24 September 2018

Perjanjian	:	Pengubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan
Jenis Fasilitas	:	<i>Demand loan</i> dengan mekanisme <i>Money Market Line</i>
Jumlah Fasilitas	:	Rp88.000.000.000,-
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	29 September 2019
Pembatasan (Negative Covenants)	:	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	Piutang pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman
Catatan	:	PT.Bank Victoria International Tbk telah memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk penambahan Modal dengan memberikan HMETD dan perubahan pemegang saham pengendali yang sebelumnya PT Bank Pan Indonesia menjadi IBJ Leasing Company serta akuisisi saham PT IBJ Verena Finance sebesar 80% sebagaimana dalam suratnya No. 181/SKM-KPP/VIC/IX/18 tanggal 25 September 2018,

6. Bank Ganesha

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman tetap/ Fixed loan
Jumlah Fasilitas	:	Rp80.000.000.000,00
Bunga	:	12,5 %
Jatuh Tempo	:	15 Desember 2019
Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 105% dari saldo fasilitas pinjaman
Catatan	:	PT.Bank Ganesha Tbk telah memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk penambahan Modal dengan memberikan HMETD dan perubahan pemegang saham pengendali yang sebelumnya PT Bank Pan Indonesia menjadi IBJ Leasing Company serta akuisisi saham PT IBJ Verena Finance sebesar 80% sebagaimana dalam suratnya No. 005/CGVC-SK/IX/2018 tanggal 25 September 2018,

7. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 42 tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Mahyasari Arizza Notonagoro, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan juncto Addendum 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 131/ADD/2018 tanggal 21 Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan dan PT Bank Capital Indonesia Tbk
Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Aksep Money Market
Jumlah Plafond	:	Rp100.000.000.000,-
Jangka Waktu Fasilitas	:	Sampai dengan 21 Juni 2019
Tujuan	:	Modal Kerja
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman
Catatan	:	PT Bank Capital Indonesia Tbk telah memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk penambahan Modal dengan memberikan HMETD dan perubahan pemegang saham pengendali yang sebelumnya PT Bank Pan Indonesia menjadi IBJ Leasing Company serta akuisisi saham PT IBJ Verena

	Finance sebesar 80% sebagaimana dalam suratnya No. 193/FIN/IX/2018 tanggal 13 September 2018.
--	---

B. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. **Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan** No. 60 tanggal 28 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan akta Perubahan VI Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No.99 tanggal 30 November 2010, yang dibuat di hadapan Lydia Djajadi, S.H., pengganti dari James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Perseroan 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk (" Bank Panin ")
Bentuk Kerjasama	:	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menyalurkan dana kepada peminjam yang digunakan untuk pembelian kendaraan dan karenanya Bank Panin akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada peminjam, yang dilakukan dengan cara Bank Panin akan mengambil alih piutang Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Piutang sampai dengan jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,- dan Perseroan akan bertindak selaku wakil dari Bank Panin antara lain untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran dan/atau pembayaran lainnya, menyimpan, mengadministrasikan, memelihara seluruh asli surat dan/atau dokumentasi pembiayaan serta melakukan semua hal yang diperlukan.
Tujuan Kerjasama	:	Untuk membiayai pembelian kendaraan oleh pihak ketiga (peminjam) yang dananya disalurkan melalui Perseroan.
Jangka Waktu Kerjasama	:	28 Oktober 2020 atau tanggal lain yang disetujui oleh Para Pihak apabila seluruh pinjaman telah dilunasi oleh peminjam kepada Bank Panin.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2. PT Bank Permata Tbk.

Perjanjian	:	Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. 15 tanggal 19 Februari 2016, dibuat di hadapan Susanna Tanu, SH., notaris di Jakarta.
Jenis Fasilitas	:	Pinjaman tetap
Jumlah Fasilitas	:	Rp150.000.000.000,-
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	3 tahun terhitung dari setiap tanggal penarikan dana, dimana tanggal penarikan terakhir yaitu pada tanggal 26 Oktober 2017.
Pembatasan	:	Mempertahankan kepemilikan PT Bank Panin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman
Catatan	:	Fasilitas Pinjaman tersebut telah lunas per tanggal 13 Agustus 2018 berdasarkan Surat dari PT. Bank Permata Tbk nomor : 017/IM/WB-GRF/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018

C. PERJANJIAN ASURANSI

Jenis Asuransi	Indonesian Earthquake Standard Policy/Polis Standar Asuransi Gempa Bumi
No. Polis	1010010518000802
Jangka Waktu Pertanggungan	27-01-2019
Penanggung	PT Asuransi Soka Mas
Obyek Pertanggungan	Kantor-kantor Perseroan antara lain gedung/ bangunan beserta isi dan mesin-mesin yang ada di dalamnya
Nilai Pertanggungan	Rp14.384.615.414,-
Jenis Asuransi	Property All Risk Policy/ Polis Semua Risiko Harta Benda
No. Polis	1010010918001711
Jangka Waktu Pertanggungan	27-01-2019
Penanggung	PT Asuransi Soka Mas
Obyek Pertanggungan	Kantor-kantor Perseroan antara lain gedung/ bangunan beserta isi dan mesin-mesin yang ada di dalamnya
Nilai Pertanggungan	Rp13.128.922.414,-

D. PERJANJIAN LAINNYA

1. Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen No.MMI/RMS/182/V/05 tanggal 20 Mei 2005 jis. Addendum Perjanjian Jasa Administrasi Penyimpanan Arsip No.MMI/ADD/182/VIII/2007 tanggal 1 Juli 2007, Addendum II Perjanjian Jasa Administrasi Penyimpanan Arsip No. MMI/ADD2/182/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, Addendum III Perjanjian Jasa Administrasi Arsip No. MMI/ADD3/182/XXI/2013 tanggal 23 Desember 2013, dan Addendum III Perjanjian Jasa Administrasi Penyimpanan Arsip No. MMI/ADDIV/182/RMS/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 semuanya dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Perseroan 2. PT Multifiling Mitra Indonesia ("MMI")
Ruang Lingkup Perjanjian	:	Perseroan bersedia untuk menitipkan pengadministrasian dokumen-dokumen dengan membayar biaya jasa dan dokumen-dokumen Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip, efek dan surat-surat berharga lainnya di simpan di gudang arsip milik MMI.
Jangka Waktu Kerjasama	:	s/d 19 Mei 2020
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi

2. Perjanjian Kerjasama Payment Gateway melalui Fasilitas PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) No. 045/PKS-VMF/LGL/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Rintis Sejahtera ("RINTIS"). 2. Perseroan.
Lingkup Perjanjian	:	1. RINTIS menyediakan <i>Payment Gateway</i> untuk memfasilitasi data tagihan Pelanggan Perseroan. 2. Untuk meningkatkan penggunaan fasilitas perbankan elektronik BCA, BCA sudah melakukan kerjasama dengan RINTIS untuk mengembangkan sistem yang disebut fasilitas <i>Payment Gateway</i> untuk Perseroan. 3. Hasil penerimaan transaksi pembayaran tersebut akan dikreditkan secara otomatis oleh BCA ke rekening Perseroan. 4. BCA, RINTIS, dan Perseroan dapat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi (advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi) tentang layanan dimaksud.
Jangka Waktu	:	Sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian oleh para pihak.
Biaya	:	1. Perseroan akan dikenakan biaya Fasilitas <i>Payment Gateway</i> ini oleh BCA sebesar Rp6.050,- (enam ribu lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya untuk BCA adalah sebesar Rp5.500,- (lima ribu lima

		ratus Rupiah) (sudah termasuk pajak) per transaksi yang berhasil dan akan didebet oleh BCA dari rekening Perseroan; b. Perseroan untuk RINTIS dikenakan biaya administrasi sebesar Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) (sudah termasuk pajak) per transaksi pembayaran. 2. RINTIS berhak membebankan biaya-biaya, yaitu: a. Biaya Set Up & Setting Konfigurasi (<i>one time charge</i>) sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku). b. Biaya Link Komunikasi terhadap Perseroan dengan menggunakan media VSAT (Up to 64 Kbps) yaitu dengan rincian sebagai berikut: - Biaya instalasi untuk pertama kalinya dan sekali charge (<i>one time charge</i>) yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); - Biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku). 3. RINTIS berhak mengenakan Biaya <i>Annual Fee</i> sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya dimulai sejak awal tahun ke-4 (keempat) dan seterusnya, belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 4. RINTIS berhak mengenakan biaya minimum transaksi pada awal tahun ke-3 (ketiga) apabila minimum transaksi dalam sebulan tidak mencapai 5.000 (lima ribu) transaksi, dengan cara membayar selisih dari kekurangan dari minimum transaksi dikalikan biaya yang diatur dalam angka 1 di atas.
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

3. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Uang Angsuran Verena Multi Finance Di Gerai Indomaret No. 104/CLG-MKT/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015

Para Pihak	:	- Perseroan - PT Indomarco Prismaatama ("Indomarco")
Lingkup Perjanjian	:	- Perseroan dengan ini menunjuk Indomarco, dan Indomarco menerima penunjukan untuk menyediakan layanan transaksi pembayaran tagihan konsumen Perseroan secara langsung untuk konsumen dan pengguna jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. - Indomarco melayani penerimaan pembayaran tagihan konsumen Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menyediakan dan mengembangkan fasilitas penerimaan pembayaran tagihan konsumen Perseroan di Gerai Indomaret dan/atau Gerai Ceriamart di seluruh Indonesia.
Jangka Waktu	:	sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian oleh para pihak.
Biaya	:	Rp10.000,- per transaksi berhasil (belum termasuk PPN 10%).
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

4. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Program Aplikasi Sistem Multi Finance dan Keuangan "I-Financing" tanggal 6 Januari 2016.

Para Pihak	:	- Perseroan - PT Inovasi Mitra Sejati ("IMS")
Lingkup Perjanjian	:	Perseroan dengan ini menunjuk IMS untuk membuat <i>i-Financing</i> .
Jangka Waktu	:	06-01-2016 s.d. berakhirnya masa garansi <i>software</i>
Biaya	:	Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah)
Hukum yang	:	Hukum Negara Republik Indonesia

berlaku		
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

5. Perjanjian Kerjasama Jasa Lelang Kendaraan Bermotor tanggal 4 Februari 2016

Para Pihak	:	1. PT Balai Lelang Otomas ("Balai"). 2. Perseroan
Penunjukan dan Bentuk Kerjasama	:	Perseroan menunjuk dan menggunakan jasa Balai untuk menjual atau melakukan pekerjaan pelelangan atas kendaraan bermotor.
Jangka Waktu Kerjasama	:	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016 s.d. tanggal 4 Februari 2017 (jangka waktu kerjasama tersebut diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya secara terus menerus berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Februari 2016. Saat ini Perjanjian Kerjasama ini masih berlaku s.d. adanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
Kompensasi	:	<i>Success fee</i> , sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai nominal harga terbentuk.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

6. Perjanjian Kerjasama Jasa Lelang Kendaraan Bermotor No. 003/PKS/IV 2013 tanggal 10 April 2013

Para Pihak	:	1. PT Pacific Lelang Internasional / Balai Lelang Pacific ("Balai"). 2. Perseroan
Penunjukan dan Bentuk Kerjasama	:	Perseroan menunjuk dan menggunakan jasa Balai untuk menjual atau melakukan pekerjaan pelelangan atas kendaraan bermotor.
Jangka Waktu Kerjasama	:	Berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.
Kompensasi	:	<i>Success fee</i> , sebesar 3% (tiga persen) dari nilai nominal harga terbentuk.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

7. Perjanjian Kerjasama Jasa Lelang Kendaraan Bermotor No. 232/PKS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

Para Pihak	:	1. PT JBA Indonesia ("JBA"). 2. Perseroan.
Penunjukan dan Bentuk Kerjasama	:	Perseroan menunjuk dan menggunakan jasa JBA untuk menjual atau melakukan pekerjaan pelelangan atas kendaraan bermotor.
Jangka Waktu Kerjasama	:	26 Oktober 2017 s.d 25 Oktober 2019
Kompensasi	:	<i>Success fee</i> , sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai nominal harga terbentuk.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

16. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

A. PERSEROAN

1. Perkara No. 358/PDT/GBTH.PLW/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 perihal gugatan wanprestasi antara Perseroan sebagai Penggugat dengan PT Bintangar Maju Abadi sebagai Tergugat I dan PO Suwandi sebagai Tergugat II. Sampai dengan tanggal surat pernyataan ini perkara masih dalam proses Pengadilan Negeri.
2. Perkara No. 354/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, dengan progress, bahwa terhadap perkara ini akan masuk dalam tahap pembacaan Kesimpulan dari pihak PT. Verena Multi Finance, Tbk, dan pihak PT. Mulia Tangjong, Eddy Rustandi Ong, Jacob Tangjong dan PT. Asuransi Ramayana, Tbk yang rencananya akan dijadwalkan pada tanggal 11 April 2017 pada PN Jakarta Pusat.
3. Perkara No. 358/PDT/GBTH.PLW/2016/PN.JKT.PST dengan progres, dalam tahap kasasi dengan Pemohon Kasasi PT Verena Multi Finance Tbk dan Termohon Kasasi PT Bintangar Maju Abadi dan PO Suwandi . Sampai dengan tanggal surat pernyataan ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.
4. Perkara No. 354/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan progres, dalam tahap kasasi, dengan termohon Kasasi PT. Verena Multi Finance, Tbk, Pemohon Kasasi PT. Mulia Tangjong, Eddy Rustandi Ong, Jacob Tangjong dan PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Sampai dengan tanggal surat pernyataan ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.
5. Perkara No. 05/Pdt.Sus.Pemb.Perd/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Pembatalan Proposal Perdamaian PT Broadbis Asia dengan progres, telah dalam Putusan (Pailit), dengan termohon PT Broadbis Asia dengan Pemohon PT Bank Papua maka, dalam hal ini sedang dalam proses masa insolvensi.

Perkara tersebut di atas adalah perkara-perkara sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yaitu pembiayaan konsumen yang secara materiel tidak mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

B. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Tidak ada perkara yang menyangkut anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini. Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan.

17. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Total nilai buku bersih dari seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 29.545 juta.

Hak atas Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

NO.	SERTIPIKAT HGB/ HMSRS		LUAS (m ²)	LOKASI
	NOMOR	BERLAKU HINGGA		
1	HGB No. 1885/Kebon Kelapa	10-11-2036	87	Jl. Pecenongan Raya No. 72 Blok A-3. Kel. Kebon Kelapa. Kec. Gambir. Kotamadya Jakarta Pusat. Prop. DKI Jakarta.
2	HGB No. 1886/Kebon Kelapa	10-11-2036	87	

NO.	SERTIPIKAT HGB/ HMSRS		LUAS (m ²)	LOKASI
	NOMOR	BERLAKU HINGGA		
3	HGB No. 231	04-09-2035	129	Jl. Sultan Iskandar Muda. Kota Medan. Prop. Sumatera Utara.
4	HGB No. 232	04-09-2035	124	
5	HGB No. 2582/Kebon Kelapa	06-02-2042	101	Jl. Pintu Air II No.24-A Kebon Kelapa. Kec. Gambir. Kotamadya Jakarta Pusat. Prop. DKI Jakarta.

Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki dan menguasai 31 (tiga puluh satu) unit kendaraan mobil dan 3 (tiga) kendaraan sepeda motor.

Perseroan saat ini memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Alamat	Kantor	Status	Masa Berlaku Perjanjian Sewa
1	Jakarta Pusat	Komplek Rukan Red Top Blok A No. 3-3A Jl. Pecenongan 72 Blok I A3 Kel. Kebon Kelapa. Kec. Gambir. Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10120	Cabang	SHGB	06-02-2042
2	Medan	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83A Kel. Babura. Kec. Medan Petisah. Medan – Sumatera Utara 20112	Cabang	SHGB	04-09-2035

Total Nilai buku keseluruhan dari aset berupa tanah dan bangunan per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 20.087 juta (Dua puluh miliar dan delapan puluh tujuh juta Rupiah)

(dalam jutaan)

No.	Aset	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku	Penyusutan (Rp)
1.	Tanah	13.070	13.070	-
2.	Bangunan	9.496	7.017	2.479
	Jumlah	22.566	20.087	2.479

Aset Perseroan berupa harta bergerak adalah:

1. Kendaraan Bermotor

1) Kendaraan Bermotor yang dimiliki Perseroan (Kendaraan Roda 2 (dua))

A. Kendaraan Roda 2						
NO	MERK	JENIS	NO. POLISI	NOMOR BPKB	TAHUN	ATAS NAMA
1	HONDA	REVO NF 11T11C01 MT	B3107PBN	M-03732668	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
2	HONDA	SCOOPY	B3441ELL / B 3808 PXG	O-05938521	2017	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
3	HONDA	NEW REVO	B3218PFB	N-09871046	2018	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK

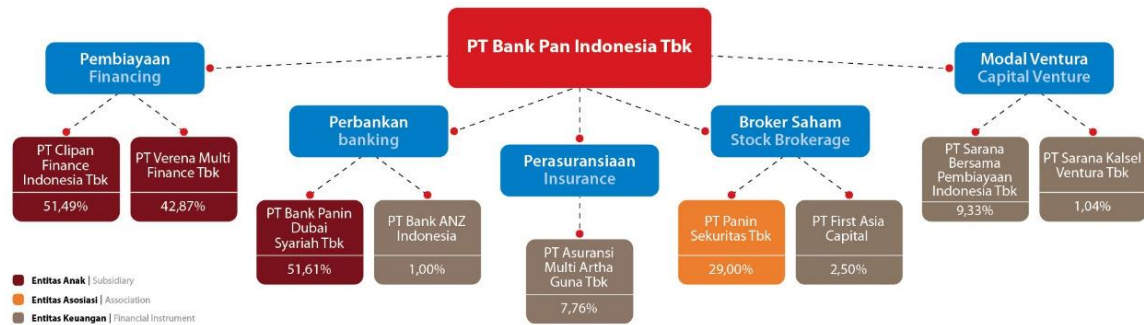
B. Kendaraan Roda 4						
NO	MERK	TYPE	NO. POLISI	NOMOR BPKB	TAHUN	ATAS NAMA
1	TOYOTA	ALPHARD 2.4 X A/T	B1944POW	J-03875146	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
2	MERCY	C200 CGI AT	B1808PAE	J-06758994	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
3	MERCY	C200 CGI AT	B1797PAE	J-06705346	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
4	HONDA	ACCORD CP2 2.4 VTI AT	B1609PAE	J-04992044	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
5	MERCY	C200 CGI AT	B1608PAE	J-04992037	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
6	TOYOTA	AGYA 1.0 G A/T	B1543PRW	L-13887530	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
7	TOYOTA	AGYA 1.0 G A/T	B1790PYQ	M-07878573	2016	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
8	TOYOTA	ETHIOS 1.2 E MT	B1463PZR	K-06210128	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
9	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 SV (4X2) A/T	B1167PZY	K-10639869	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
10	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 SV A/T	B1505PRF	L-00219171	2014	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
11	MITSUBISHI	MIRAGE 1.2L GLS-F A/T	B1042PRY	L-13931786	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
12	TOYOTA	CAMRY 2.5V A/T	B1471UAE	K-10674448	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
13	TOYOTA	AVANZA VELOZ	BG1656UP	M-10809856	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
14	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2	B1998BV	L-01961155	2014	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
15	CHEVROLET	SPIN 1.5 LTZ A/T	B1359UZO	L-13899849	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
16	HONDA	BRV.1.5 PRECVT	B1228PYX	M-14650678	2016	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
17	NISSAN	MARCH 1.2 AT	B1498PVH	N-00596966	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
18	TOYOTA	KIJANG INNOVA	B1723PM	N-05010236	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
19	TOYOTA	CALYA 1.2 AT	B2460PFC	N-07319405	2018	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
20	TOYOTA	YARIS	B1795TYS	N-06864396	2014	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
21	TOYOTA	NEW AVANZA 1.3 G M/T	B2767PFC	N-07324708	2018	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
22	DAIHATSU	TERIOS	B2876SFO	N-07478006	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
23	HONDA	HRV E 1.5	B1449PIR	N-04980095	2017	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
24	SUZUKI	ERTIGA	B1655PIP	N-04872024	2017	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
25	HONDA	CRV TURBO PRESTIGE	B185GSA	N-04782200	2017	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
26	HONDA	BRV.1.5 PRECVT	B2815BKF	M-07821564	2016	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
27	TOYOTA	AVANZA 1500S	1908PVC	I-07247157	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
28	TOYOTA	AVANZA 1500S	B1165PFF	J-06211217	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
29	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5D EXCEED	B1768PJF	K-02597711	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
30	HONDA	JAZZ	BG1365RC /B1207PG Y	K-10651730	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
31	DAIHATSU	TERIOS	B1715SIA/ D1867OG	N-03162685	2014	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK

18. KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan bagian dari Bank Panin Group yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di berbagai macam bidang usaha. Berikut adalah keterangan singkat mengenai anak perusahaan Bank Panin Grup.

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Pembiayaan	Bernaung dibawah Bank Panin Grup
2	PT Bank Panin Syariah Tbk	Bank	Bernaung dibawah Bank Panin Grup
3	PT Verena Multi Finance Tbk	Pembiayaan	Bernaung dibawah Bank Panin Grup
4	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi	Bernaung dibawah Bank Panin Grup

Berikut ini adalah struktur Bank Panin Grup dan persentase kepemilikan saham Bank Panin Grup di dalam masing-masing anak perusahaan.



B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan usaha dibidang pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - A. Pembiayaan Investasi;
Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara:
 - (a) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - (b) Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - (c) Anjak Pitung Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*)
 - (d) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
 - (e) Pembiayaan Proyek;
 - (f) Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
 - (g) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
 - B. Pembiayaan Modal Kerja;
Pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara:
 - (a) Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Lease back*);
 - (b) Anjak piutang dengan pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*)
 - (c) Anjak piutang tanpa pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - (d) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - (e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
 - C. Pembiayaan Multiguna
Pembiayaan multi guna wajib dilakukan dengan cara:
 - (1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - (2) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau
 - (3) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
 - D. Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas. Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jts. Surat Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Kinerja yang baik dari seluruh karyawan dan jajaran manajemen dalam mengelola Perseroan terbukti telah membawa Perseroan memperoleh beragam penghargaan. Adapun beberapa penghargaan yang diterima Perseroan antara lain sebagai berikut:

Tahun	Nama Penghargaan	Kategori	Institusi
2009	Multifinance Award	<i>Multifinance dengan predikat Sangat Bagus</i>	Majalah Info Bank
2010	Investor Awards	<i>Best Listed Companies 2010 – Emiten terbaik sektor Multifinance</i>	Majalah Investor
	Bisnis Indonesia Award 2010	<i>Multifinance Terbaik</i>	Bisnis Indonesia
	Multifinance Award	<i>Multifinance dengan predikat Sangat Bagus</i>	Majalah Info Bank
2011	Investor Awards	<i>Best Listed Companies 2011 – Emiten terbaik sektor Multifinance</i>	Majalah Investo
2013	Indonesia Multifinance Award 2013	The Best of Marketing for Multifinance Indonesia	Business Review
2013	Infobank Multifinance Awards	Penghargaan “Sangat Bagus”	Majalah Infobank
2014	Indonesia Multifinance Award 2014	The Best 2 nd Listed Company For Indonesia Multifinance Company	Ekonomic Review
2014	Indonesia Multifinance Award 2014	The Best 3 rd Good Corporate Governance For Indonesia Multifinance Company	Ekonomic Review
2017	Indonesia Corporate Secretary Award 2017	TOP 5 GCG Issues in Multifinance Sector	Warta Ekonomi

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri pembiayaan di Indonesia sebagai berikut:

Tim Manajemen yang Berpengalaman, Profesional, Ulet, dan Kreatif

Dengan pengalaman di bidang perbankan, pembiayaan, dan industri otomotif, manajemen Perseroan dipercaya dapat lebih memahami industri dan dapat mengelola perseroan dengan performa yang baik. Perseroan juga menjunjung tinggi profesionalitas dari setiap insan serta mengamalkannya pada aktivitas harian mereka.

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan Tersebar di 16 Kota Besar di Indonesia

Sebagai Perseroan pembiayaan yang berorientasi kepada pembiayaan konsumen secara perorangan dan pembiayaan sewa guna usaha ke perusahaan menengah ke atas, maka lokasi keberadaan dan jumlah Kantor Cabang Perseroan memegang peranan penting dalam keberhasilan dan perkembangan kegiatan usaha. Perseroan selalu berupaya membuka kantor cabang baru di daerah yang strategis dan berpotensi.

Perseroan memiliki jaringan pemasaran yang luas dan tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan komitmen Perseroan untuk meraih jaringan konsumen yang beragam dan menangkap potensi industri yang beragam yang membutuhkan pembiayaan mobil, alat berat, dan mesin.

Sistem Teknologi Informasi yang Real-Time dan Online Serta Pengalaman Dengan DRC (Disaster Recovery Center) yang telah teruji

Didukung oleh teknologi informasi yang tepat guna dan terkini, kantor pusat yang terhubung secara *real-time* dan *on-line* dengan seluruh cabangnya membuat performa perseroan lebih baik dan cepat dalam hal pemrosesan aplikasi pembiayaan, pengambilan keputusan, pengontrolan seluruh aktivitas Perseroan.

Perseroan telah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa Disaster Recovery Center (DRC) untukantisipasi gangguan pada kantor pusat yang tidak terduga. Prosedur manual juga telah disiapkan supaya aktivitas operasional tetap berjalan jika seluruh infrastruktur teknologi informasi gagal berfungsi.

Pembayaran Angsuran yang Aman dan Nyaman Melalui Tunai atau Kartu Debet di Cabang, ATM, Post Dated Check, Transfer Antar Bank, E-Payment, dan Payment Points

Perseroan terus mengembangkan alternatif untuk sistem pembayaran angsuran, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Sampai saat ini, Perseroan memiliki beberapa fasilitas pembayaran angsuran yaitu melalui :

1. Pembayaran secara langsung melalui kasir yang telah tersedia di kantor-kantor cabang Perseroan. Konsumen dapat melakukan pembayaran di semua cabang Perseroan karena sistem Perseroan yang telah *on-line* antar seluruh cabang dan juga kantor pusat.
2. Pembayaran dengan PDC (*Post dated Check*)
3. Pembayaran melalui transfer bank ke rekening Perseroan.
4. Pembayaran melalui kartu debit dengan menggunakan EDC (*Electronic Data Capture*).
5. Pembayaran melalui BRI (Bank Rakyat Indonesia)
6. Pembayaran melalui ATM BCA.

Hubungan yang Erat dan Terpercaya Dengan Mitra Bisnis Seperti Bank, Dealer Mobil Bekas, Vendor Alat Berat dan Mesin, Maskapai Asuransi, dan Otoritas yang Berwenang

Perseroan menyadari pentingnya hubungan baik dengan berbagai pihak dalam pengembangan usahanya. oleh sebab itu Perseroan selalu berupaya secara berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank. lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya. perusahaan asuransi. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM). *dealer*. *developer*. konsumen serta otoritas yang berwenang.

Perseroan telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari perbankan lokal maupun asing seperti Bank Panin, Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata, Bank Resona Perdania, Bank Sinarmas, Bank ICBC dan Bank DKI sehingga dapat menjamin keberlangsungan dan memperluas kemitraan Perseroan. Selain itu, Perseroan telah bekerjasama dengan lebih dari 2.000 dealer mobil bekas terutama dealer besar yang telah mempunyai hubungan baik dengan para nasabah.

Pelatihan yang Komprehensif bagi Karyawan

Sudah menjadi komitmen Perseroan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan melalui program pelatihan, pengembangan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku positif bagi karyawan.

Aktivitas pelatihan tidak hanya dilaksanakan melalui pelatihan internal di *Verena Learning Center* (VLC) yang mempunyai jadwal tetap, tapi juga pelatihan yang bekerjasama dengan pihak eksternal. seminar dan *outbound*.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan melakukan pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multi Guna, hal ini sesuai maksud dan tujuan dalam dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jts. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Pada saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan pembiayaan konsumen dimana Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil bekas yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman.

Saat ini selain kantor pusat, Perseroan memiliki jaringan 20 (dua puluh) Kantor Cabang yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

a. Jaringan Distribusi

No.	Lokasi	Alamat	Kantor	Status	Masa Berlaku Perjanjian Sewa
1	Jakarta Pusat	Komplek Rukan Red Top Blok A No. 3-3A Jl. Pecenongan 72 Blok I A3, Kel. Kebon Kelapa - Kec. Gambir, Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10120	Cabang	Milik	-
2	Jakarta Utara	Jl. Bukit Gading Raya Blok A Kav. No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading. Jakarta Utara - DKI Jakarta 14240	Cabang	Sewa	31-08-2021

3	Tangerang 1	Ruko Tangerang City Business Park Blok B No.18 Jl. Jend. Sudirman No. 1. Cikokol Kel. Babakan. Kec. Tangerang. Tangerang - Banten 15118	Cabang	Sewa	15-07-2021
4	Serang	Jl. Ahmad Yani No. 92 Rt. 001 Rw. 02 Kel. Sumur Pecung. Kec. Serang. Serang - Banten 42118	Cabang	Sewa	12-12-2021
5	Bogor	Jl. Padjajaran Pulo Armin Rt. 005 Rw. 04 No.28 C Kel. Baranangsiang. Kec. Bogor Timur. Bogor - Jawa Barat 16143	Cabang	Sewa	15-05-2021
6	Bandung	JL. BKR No.94. Rt. 03 Rw. 09 Kel. Ancol. Kec. Regol Bandung. Bandung - Jawa Barat 40252	Cabang	Sewa	20-10-2019
7	Surabaya 1	Ruko Sentra Fortuna No. 2 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 39-41 Kel. Ketabang. Kec. Genteng. Surabaya - Jawa Timur 60272	Cabang	Sewa	01-04-2021
8	Malang	Jl. Letjen S. Parman No. 56 – B3 Kel. Purwanto. Kec. Blimbing. Malang - Jawa Timur 65122	Cabang	Sewa	15-12-2019
9	Palembang	Komp. Graha Dempo Mas Blok A1 Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi No. 500-501 Rt. 008 Rw. 02. Kel. 9 Ilir. Kec. Ilir Timur II. Palembang - Sumatera Selatan 30115	Cabang	Sewa	01-05-2019
10	Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad No. 75 A-B. Rt.001 Rw.015 Kel. Tengkareng Tengah Kec. Marpoyan Damai. Pekanbaru - Riau 28125	Cabang	Sewa	30-04-2019
11	Makassar	Jl. Gunung Latimojong Komplek Ruko Metro Square Blok C No. 38 Kel. Lariangbangi. Kec. Makassar. Makassar - Sulawesi Selatan 90141	Cabang	Sewa	01-10-2021
12	Cikarang	Komplek Ruko CBD Blok E1 Jl. Niaga Raya Kav. AA3 Jababeka Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Bekasi - Jawa Barat 17532	Cabang	Sewa	08-03-2019
13	Bekasi	Ruko Festival Jl. Sultan Agung Kav. 19 Kel. Medan Satria – Kec. Medan Sartria Bekasi – Jawa Barat	Cabang	Sewa	29-11-2020
14	Medan	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83 A, Kel. Babura - Medan Petisah, Medan – Sumatera Utara 20112	Cabang	Milik	-
15	Jakarta Selatan	Jl. Radio Dalam Raya No. 05. Rt 009 Rw 013 Kel. Gandaria Utara. Kec. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12160	Cabang	Sewa	*
16	Tangerang 2	Paramount Glaze 2 Blok A/02 Paramount Serpong. Gading Serpong Kel. Kelapa Dua. Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang. Tangerang - Banten 15810	Cabang	Sewa	*
17	Semarang	Jl. Supriyadi No. 69 G Kel. Kalicari. Kec. Pedurungan. Semarang - Jawa Tengah 50198	Cabang	Sewa	*
18	Surabaya 2	Komplek Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok E2 Kel. Kalirungkut. Kec. Rungkut. Surabaya - Jawa Timur 60293	Cabang	Sewa	*
19	Labuhanbatu	Jl. Pekan Lama No.24 Kec. Rantau Utara. Kab. Labuhan Batu. Rantau Prapat - Sumatera Utara 21412	Cabang	Sewa	*
20	Jakarta Timur	Komplek Buaran Persada Jl. Soekamto No. 15. RT. 008 RW. 06 Kel. Pondok Kelapa. Kec. Duren Sawit. Jakarta Timur - DKI Jakarta 13450	Cabang	Sewa	*

*) Perjanjian sewa telah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi. Kegiatan usaha di cabang ini sementara tidak aktif. diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama dapat diputuskan oleh manajemen untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha masing-masing kantor cabang atau menutup kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor Selain Kantor Cabang

No.	Lokasi	Alamat	Kantor	Status	Masa Berlaku Perjanjian Sewa
1	Ciledug	Jl. Puri Beta 1, RT 001 / 010 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan. Tangerang – Banten 15154	Kantor Selain Kantor Cabang	Sewa	21-09-2019
2	Sidoarjo	Ruko Pondok Mutiara Blok K2-C Desa Jati. Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. - Jawa Timur 61226	Kantor Selain Kantor Cabang	Sewa	*
3	Depok	Jl. Margonda Raya No.23, RT 001 / RW 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas. Depok - Jawa Barat 16431	Kantor Selain Kantor Cabang	Sewa	10-09-2019
4	Jatiwaringin	Jl. Raya jatiwaringin, RT 002 / RW 015 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondok Gede. Bekasi – Jawa Barat 17411	Kantor Selain Kantor Cabang	Sewa	01-10-2019

*) Perjanjian sewa telah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi. Kegiatan usaha selain kantor cabang ini sementara tidak aktif. diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama dapat diputuskan oleh manajemen untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha di kantor selain kantor cabang atau menutup kantor selain kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Bagian pemasaran terus menjalani kerjasama dengan dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan untuk meningkatkan kontribusi terbesar bagi usaha Perusahaan.

Langkah pemasaran paling utama adalah melalui kerjasama dengan dealer mobil serta developer yang ada di setiap daerah. Pemasaran harus memastikan dealer dan developer untuk memberikan kontribusi yang stabil, mengingat dealer dan developer merupakan mediator antara calon konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen. Berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di PT Verena Multi Finance Tbk.

Produk-Produk yang Ditawarkan

- 1) **Pembiayaan Investasi.** Pembiayaan untuk pengadaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
- 2) **Pembiayaan Modal Kerja** Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) **Pembiayaan Multiguna Pembiayaan** untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- 4) **Sewa Operasi**
Sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

4. STRATEGI PEMASARAN

Hubungan Yang Erat Dengan Dealer dan Mitra Strategis

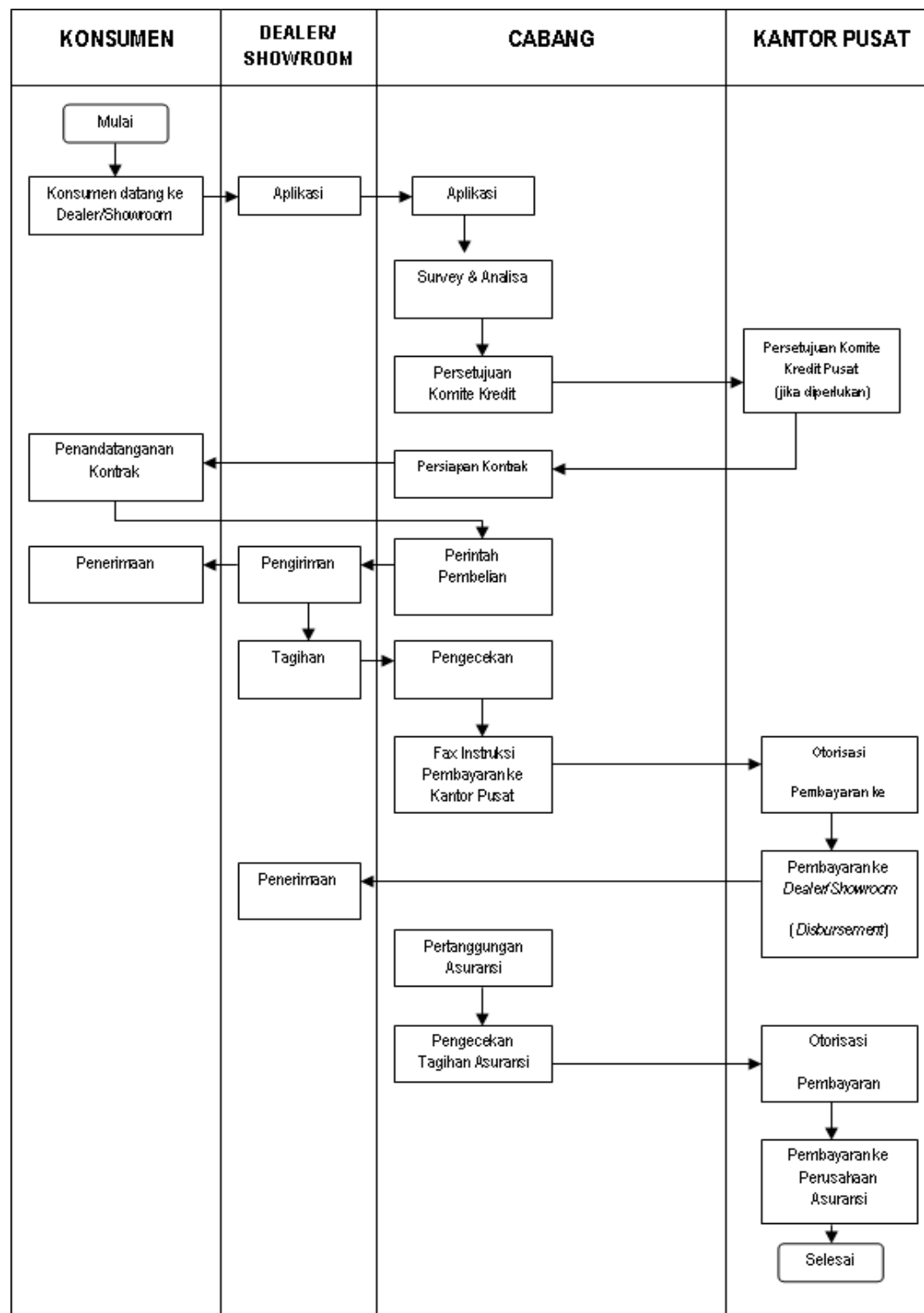
Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan yang semakin erat dengan dealer dan mitra strategis pembiayaan, melalui berbagai macam program dan kerjasama promosi yang dicanangkan oleh Perusahaan kepada dealer dan mitra strategis pembiayaan Perusahaan.

Optimalisasi Jaringan Usaha

Jaringan usaha ditujukan untuk dapat meng-cover jaringan pembiayaan yang luas. Perluasan jaringan usaha dilakukan jika lokasinya strategis yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sehat serta memiliki industri unggulan. Fokus Perusahaan saat ini adalah mengoptimalkan jaringan usaha yang ada melalui peningkatan pelayanan yang didukung dengan proses bisnis dan teknologi informasi yang tepat guna.

5. OPERASIONAL

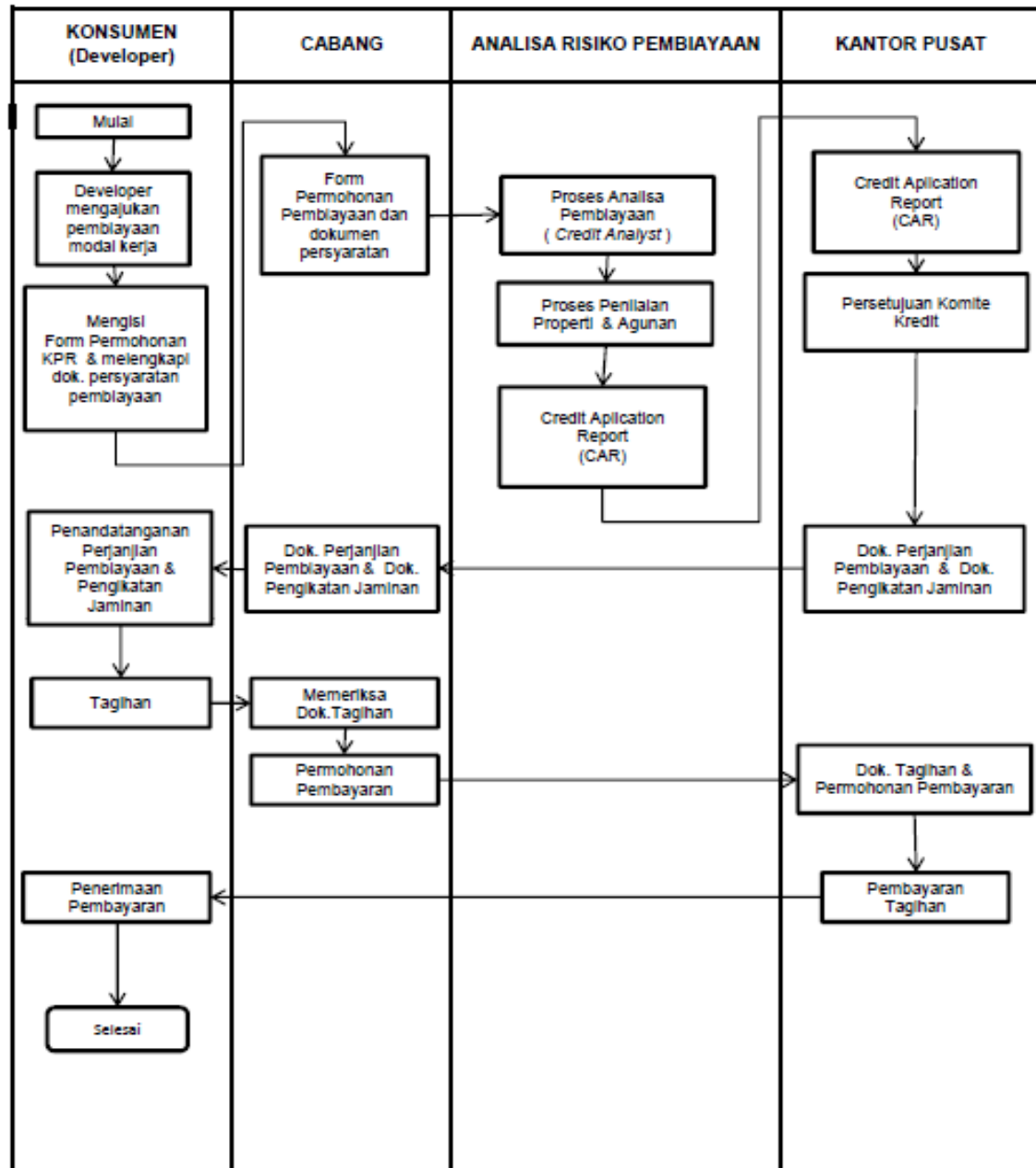
Proses pembiayaan otomotif dapat digambarkan dalam skema berikut:



Keterangan Proses Pembiayaan Otomotif

Pelaksanaan proses penerimaan calon konsumen diawali dengan pengisian aplikasi pembiayaan oleh calon konsumen dan dilengkapi dengan data pendukung yang terdiri dari identitas diri dan data keuangan. Selanjutnya karyawan Perseroan dari cabang yang bersangkutan akan melakukan survei lebih lanjut ke lokasi (tempat tinggal dan usaha) calon konsumen. Setelah itu dilakukan survei ulang/survei lingkungan yang dilakukan oleh pihak *outsourcing*. Kemudian dilakukan proses evaluasi kelayakan kredit. Proses persetujuan kredit dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas pembiayaan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

Proses Pembiayaan Properti



Keterangan Proses Pembiayaan Properti

Pelaksanaan proses penerimaan calon konsumen diawali dengan pengajuan pembiayaan modal kerja dan mengisi formulir permohonan KPR oleh developer dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Selanjutnya karyawan Perseroan dari cabang yang bersangkutan akan melakukan menyampaikan formulir permohonan pembiayaan beserta dokumen pendukungnya kepada *Credit Analyst* untuk melakukan proses analisa Pembiayaan, proses penilaian Properti & Agunan untuk proses evaluasi kelayakan kredit yang kemudian dituangkan kedalam *Credit Application Report* (CAR). Proses persetujuan kredit dilakukan dikantor pusat oleh Komite Kredit. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas pembiayaan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

Setelah mendapat persetujuan dari komite kredit, proses pembiayaan dapat dijalankan. Perseroan lalu menerbitkan Dokumen Perjanjian & Dokumen Pengikatan Jaminan yang kemudian diserahkan kepada developer oleh Cabang untuk ditandatangani. Setelah penandatanganan selanjutnya developer akan menerbitkan tagihan yang harus dibayarkan kepada cabang dan cabang melakukan pemeriksaan serta membuat surat permohonan pembayaran kepada kantor pusat untuk dilakukan pembayaran dan mengirimkan pembayaran kepada developer

6. SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, PT Verena Multi Finance Tbk., memanfaatkan teknologi informasi (TI); yang senantiasa mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya seiring dengan pertumbuhan usaha dan kompleksitas kegiatan Perseroan. Sehubungan dengan itu Perseroan mencadangkan anggaran khusus bagi pemeliharaan, penggantian dan peningkatan infrastruktur TI untuk mendukung kesinambungan usaha dan daya saing.

a. Teknologi Untuk Operasional

Perseroan menggunakan jaringan komputer yang saling terhubung antara seluruh cabang dan kantor pusat dengan teknologi *frame relay (leased line)* dan *Multiprotocol Label Switching (MPLS)* berkecepatan tinggi sehingga seluruh informasi dan transaksi dieksekusi secara *real-time*; dan data center yang dilengkapi dengan lantai yang ditinggikan, sensor asap/ api, sensor panas, pendingin ruangan dan alat pemadam kebakaran standar yang sesuai untuk produk teknologi informasi. Khusus untuk data center, Perseroan telah melakukan *upgrade* untuk mengantisipasi peningkatan jumlah dan jenis transaksi, jumlah nasabah dan pengembangan usaha dalam 5 - 10 tahun mendatang. Data Center juga telah dilengkapi dengan mesin genset tersendiri yang akan menjadi *backup power* jika terjadi gangguan pasokan listrik dari gedung maupun PLN, sehingga pelayanan operasional dapat berjalan tanpa gangguan. Perusahaan juga telah melakukan *upgrade server* dan menggunakan server baru yang didukung oleh teknologi virtualisasi server dan NetApp. Teknologi tersebut meningkatkan efisiensi pemeliharaan sebab jumlah server kini telah berkurang secara signifikan karena virtualisasi. Untuk mendukung berbagai aktifitas operasional seperti *pool management*, *treasury*, biro jasa, *procurement*, *vault management*, pencatatan penyimpanan BPKB, kontrak dan *workflow*. Perseroan menggunakan berbagai aplikasi seperti *Microsoft SQL Server*, *Microsoft Visual Studio 6* dan *•NET*, serta *Perseroan Integrated Processing System (VIPS)* yang dibangun sendiri oleh tim internal. Sebagai inti dari proses aplikasi pembiayaan. VIPS merupakan aplikasi yang terintegrasi dan mencakup semua tahap proses, termasuk pelaporan data-data penting. VIPS secara otomatis mendeteksi data yang tidak sesuai dan menggunakan mekanisme persetujuan kredit berdasarkan wewenang sehingga meminimalisasi risiko manipulasi dan penyalahgunaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip utama yang diterapkan Perusahaan dalam pemrosesan kredit: "Benar dari Awal" Dengan VIPS, laporan-laporan disajikan dalam bentuk digital dashboard dan tabulasi sehingga Perusahaan dapat memonitor dan menganalisa kondisinya setiap saat secara akurat dan mengambil keputusan strategis secara tepat. Perusahaan juga menggunakan aplikasi *Human Resources Information System (HRIS)* dari pihak ketiga untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) yang terus bertambah seiring dengan perkembangan Perusahaan. HRIS meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan SDM seperti *recruitment*, *development* dan *payroll*. Untuk mengantisipasi risiko kehilangan data di data center, data *backup* Perusahaan memanfaatkan *Disaster Recovery Center (DRC)* untuk *backup* data dan operasional yang disediakan oleh pihak ketiga. Sehubungan dengan itu Perusahaan telah mempersiapkan para karyawannya dengan prosedur manual bila infrastruktur TI gagal berfungsi, sehingga aktivitas operasional tetap berjalan lancar. Untuk efisiensi biaya komunikasi Perusahaan menggunakan teknologi *Voice over Internet Protocol (VoIP)* yang diintegrasikan dengan jaringan telepon (PABX) dan server. Perseroan juga mensyaratkan penggunaan perangkat lunak yang asli secara ketat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Teknologi Informasi (PPTI) yang harus ditandatangani oleh seluruh karyawan. PPTI mengatur pelarangan penggunaan perangkat lunak bajakan, penjagaan kerahasiaan data dan informasi, penyebaran informasi yang tidak pantas dan pemeliharaan aset TI yang digunakan oleh karyawan. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah penularan virus komputer, Perseroan menggunakan aplikasi khusus yang menyaring email baik yang masuk maupun yang keluar, membatasi penggunaan *flash disk* dan melaporkan instalasi program-program baru. Perseroan juga telah membangun workshop TI yang lebih lengkap untuk kebutuhan reparasi dan pemeliharaan perangkat keras sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.

b. Teknologi Untuk Pelayanan Nasabah

Teknologi juga berperan penting dalam pelayanan nasabah, Perseroan menyediakan *call center* yang terintegrasi dengan data center sebagai sarana pelayanan dan penyampaian informasi kepada nasabah. Kedepan, *call center* akan ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya seiring dengan pertumbuhan usaha, nasabah dan kompleksitas transaksi Perseroan. Untuk kemudahan pembayaran, Perseroan bekerjasama dengan salah satu bank pemerintah yang memiliki jaringan kantor cabang di hampir seluruh pelosok Indonesia sehingga nasabah dapat membayar angsuran melalui cabang tersebut dimana saja. Perseroan juga bekerjasama dengan sebuah bank nasional sehingga memungkinkan nasabah untuk membayar angsuran dengan kartu debit melalui mesin EDC di cabang-cabang; dan dengan satu bank swasta utama sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran melalui ATM bank tersebut. Perseroan juga berinvestasi di sarana pengiriman SMS otomatis ke nasabah untuk mengirimkan informasi dan pengingat angsuran yang akan jatuh tempo. Sarana SMS tersebut juga digunakan sebagai media komunikasi antara Perseroan dengan karyawan-karyawan kunci. Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Perseroan saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi *Mobile Collection dan Mobile Survey* yang berbasis *WhatsApp Group*. Aplikasi *Mobile Collection* memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran tunai di mana saja dan juga memudahkan Perusahaan dalam memantau aktivitas *collector* di lapangan. Sedangkan aplikasi *Mobile Survey* mempersingkat survei dan mencegah pemasukan data ganda sebab data yang dimasukkan langsung terhubung ke aplikasi utama di data center.

7. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki beberapa kompetitor. Untuk pembiayaan otomotif, kompetitor utama Perseroan diantaranya adalah PT Astra Sedaya Finance, PT Oto Multiartha, PT BCA Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., PT BII Finance dan PT CIMB Niaga Finance.

Selain persaingan dari sesama perusahaan pembiayaan, Perseroan juga mendapatkan persaingan dari sektor perbankan yang menawarkan pembiayaan antara lain PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Danamon Internasional Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank International Indonesia Tbk., PT OCBC NISP Tbk., PT Bank Pan Indonesia Tbk., dan PT Bank Jasa Jakarta.

Di tengah-tengah persaingan yang ketat, Perseroan tetap mempertahankan kualitas karena strategi Perseroan yang berfokus pada pembiayaan mobil bekas di segmen yang selalu tumbuh dan mempunyai peminat terbesar, intensifikasi Cabang di kota-kota besar, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan masing-masing pemilik maupun pengelola *dealer/showroom*.

Pada saat ini, belum ada data pembiayaan properti sehingga sangat sulit menentukan posisi Perseroan di antara pesaing secara pasti.

8. STRATEGI USAHA

Dalam menghadapi persaingan dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki, maka Perseroan menjalankan beberapa strategi usaha. Hal ini dilakukan untuk tetap menjadi pembiayaan yang terbaik di antara ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan. Adapun strategi yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut :

Portofolio

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaan pada mobil bekas yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dan risiko yang lebih aman. Sampai saat ini, pangsa pasar Perseroan lebih dari 90% merupakan pembiayaan pada berbagai merek mobil yang diproduksi oleh produsen mobil Jepang.

Hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat penguasaan pangsa pasar oleh merek mobil hasil produksi produsen Jepang dan juga karena mobil produksi Jepang memiliki nilai yang cukup tinggi dalam penjualan kembali (*resale value*). Adapun usaha pembiayaan mobil bekas memberikan "*natural hedge*" kepada Perseroan dimana dalam kondisi perekonomian yang membaik, konsumen akan cenderung untuk membeli mobil baru. namun jika kondisi perekonomian menurun, konsumen cenderung memilih untuk membeli mobil bekas.

Prudent Credit Management & Effective Collection Management

Perseroan menetapkan prinsip *prudent* atau kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip "Benar dari Awal" yang dianut oleh Perseroan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian. Prinsip tersebut diterapkan sejak dari awal proses pemberian kredit kepada calon konsumen. Survei atas kemampuan dan keberadaan konsumen serta liabilitas bagi konsumen untuk memberikan uang muka (*down payment*) merupakan bentuk lain dari perwujudan sikap kehati-hatian Perseroan. Survei yang diadakan secara mendalam baik internal maupun eksternal (*outsourcing*) akan menyeleksi calon-calon konsumen yang memang layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan. Wujud lainnya dari prinsip ini adalah dengan adanya komite yang bertugas untuk meminimalisir risiko yang ada, yaitu Komite Kredit yang bertugas mengevaluasi kelayakan kredit tiap calon konsumen yang ada terdiri dari 3 (tiga) lapisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan telah berusaha seoptimal mungkin menerapkan prinsip *prudent* dalam setiap kredit yang diberikan. Untuk memonitor kualitas persetujuan pemberian pembiayaan, Perseroan telah membentuk tim internal audit yang mempunyai staf pada setiap cabang. Pemantauan atas tiap angsuran yang ada pun selalu dikontrol agar penunggakan yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan cara yang paling efektif.

Prudent Funding Management

Perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang dalam kondisi yang riil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap usaha pembiayaan, oleh sebab itu Perseroan selalu mengadakan pemantauan secara terus menerus terhadap kondisi perekonomian secara makro, dikhususkan kepada perubahan yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang.

Usaha Perseroan dalam mengatasi terjadinya perubahan suku bunga, yaitu strategi *natural hedge*. Perseroan dalam perjanjian kerjasama pemberian kreditnya dengan bank memperoleh tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dari bank yang berkaitan sehingga konsumen juga dapat memperoleh tingkat bunga yang tetap. Perseroan juga telah menerbitkan obligasi pada bulan Maret 2011, *Medium Term Notes* (MTN) pada bulan Desember 2011, serta menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012. Tahap II Tahun 2013 dan Tahap III Tahun 2014 sebagai alternatif pendanaan. Hal ini diupayakan untuk mencegah risiko

yang dapat ditimbulkan dari perubahan tingkat suku bunga yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

9. Perluasan Jaringan Pemasaran

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berorientasi kepada pembiayaan konsumen secara perorangan dan sewa guna usaha, maka lokasi Kantor Cabang Perseroan memegang peranan penting dalam keberhasilan dan perkembangan kegiatan usaha. Perseroan selalu berupaya untuk mengembangkan jaringan pemasarannya dengan cara memaksimalkan potensi penjualan setiap Kantor Cabang yang sudah dibuka dengan menambah kerjasama dengan *dealer* / *showroom* di setiap wilayah Kantor Cabang dan menjalin hubungan yang baik dengan *authorized vendor* yang memiliki *coverage area* konsumen yang luas.

Pembukaan Kantor Cabang baru dilakukan secara selektif, yang mempertimbangkan potensi pasar, pendapatan asli daerah, dan persaingan usaha di wilayah tersebut serta tingkat risiko usaha secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Perseroan akan melihat potensi dan kompetitif atau tidaknya pembukaan kantor Cabang baru tersebut.

Hubungan yang Kuat dengan Mitra Bisnis

Perseroan menyadari pentingnya hubungan baik dengan berbagai pihak dalam pengembangan usahanya. Oleh sebab itu Perseroan selalu berusaha untuk selalu berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), *dealer*, *vendor* serta konsumen.

- Hubungan dengan Bank

Perseroan telah menjalin kerjasama yang baik dengan bank dalam bentuk *chanelling*, *joint financing* dan *direct loan*. Selama ini, Perseroan telah mampu memenuhi tingkat kredibilitas, integritas dan komitmen yang dipersyaratkan oleh bank untuk memperoleh pinjaman.

- Hubungan dengan ATPM dan dealer

Dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari ATPM dan *dealer*, Perseroan selalu menunjukkan kemampuan finansial serta kredibilitas Perseroan. Di samping itu, sebagai bentuk penghargaan Perseroan terhadap *dealer* yang telah bekerja sama dengan baik, Perseroan juga memberikan beberapa program yang ditujukan untuk *dealer* berkaitan yang telah mencapai target. Program bentuk terima kasih itu dituangkan dalam *reward dealer*, berisi berbagai macam hadiah, dari peralatan elektronik, kendaraan bermotor sampai paket-paket wisata ke dalam dan luar negeri. Hal ini dapat juga menjadi pemacu untuk *dealer* yang bersangkutan agar meningkatkan kerjasamanya.

- Hubungan dengan Developer

Dalam mengembangkan bisnis pembiayaan properti, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan developer seperti PT. Metropolitan Land Tbk., PT Artha Debang Development, PT Fajar Putera Dinasti, PT Kembang Griya Cahaya dan PT Metropolitan Permata Deplemment. Dalam penerapan strategi usahanya, Perseroan senantiasa memberikan pelayanan dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan kompetitornya.

- Hubungan dengan Konsumen

Konsumen merupakan aset utama Perseroan, oleh sebab itu untuk tetap menjaga hubungan baik yang telah dibina, Perseroan selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya sejak konsumen mengajukan permintaan pelayanan kredit sampai liabilitas konsumen kepada Perseroan berakhir. Perseroan menjamin proses pengajuan kredit dapat berlangsung lebih mudah dan cepat serta adanya rasa aman. Perseroan senantiasa mengembangkan alternatif fasilitas pembayaran angsuran untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya, antara lain dengan memperkenalkan sistem pembayaran baru melalui *payment point* di Bank dan *Mini Market*.

- Hubungan dengan Perusahaan Asuransi

Untuk meminimalisir risiko yang ada pada setiap kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan dan meningkatkan daya saing di pasar, Perseroan menjalin hubungan baik dengan perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria utama, yaitu perusahaan asuransi berskala nasional dan tingkat premi yang kompetitif. Setiap jaminan wajib untuk diasuransikan pada perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan Perseroan.

10. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Hak Cipta

No.	Nomor/ Tanggal Pendaftaran	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Jangka Waktu Perlindungan	Tanggal / Tempat di Umumkan	Nama Pencipta
1	32803 (20 Februari 2007)	Seni logo	"PT. Verena Oto Finance"	50 tahun sejak pertama kali diumumkan	11 Juni 2003/ Jakarta	PT Verena Oto Finance (Perseroan)
2	43617	Seni logo	SI JITU (Solusi Teruji Kebutuhan Anda)	50 tahun sejak pertama kali diumumkan	Agustus 2008/ Jakarta	PT Verena Oto Finance Tbk (Perseroan)

2. Merek

No.	Nomor/ Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
1	IDM000278698 (10 November 2010)	SI JITU (Solusi Teruji Kebutuhan Anda)	36	10 tahun sejak tanggal penerimaan	PT Verena Oto Finance Tbk (Perseroan)

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), Partner penanggung jawab adalah Muhammad Irfan untuk periode 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 23 Agustus 2018, 28 Februari 2018 dan 11 April 2017.

STRUKTUR EKUITAS PERSEROAN Per tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016

Keterangan	(Dalam jutaan rupiah)		
	30 Juni 2018	31 Desember 2017	2016
EKUITAS			
Modal Dasar - Nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal Dasar - 4.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor –			
2.585.160.908 saham pada 30 Juni 2018			
dan 31 Desember 2017 dan 1.002.000.352			
saham pada 31 Desember 2016	258.516	258.516	100.200
Tambahan Modal Disetor - Bersih	10.433	10.433	(2.385)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(1.013)	(559)	621
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	1.000	900	800
Tidak ditentukan penggunaannya	170.440	194.958	187.505
Total Ekuitas	439.376	464.248	286.741

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK melalui surat No.283 pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam rangka PMHMETD II dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebanyak 3.102.193.089 (tiga miliar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 16.00 WIB mempunyai 120 (seratus dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II adalah sebanyak 3.102.193.089 (tiga miliar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018:

Perubahan ekuitas seandainya PMHMETD II sebanyak 3.102.193.089 (tiga miliar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) Terjadi pada tanggal 30 Juni 2018, maka proforma ekuitas sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas Bersih
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Desember 2017 dengan nilai nominal Rp 100 per saham	258.516	10.433	(559)	900	194.958	464.248
Rugi komprehensif setelah pajak			(454)	100	(24.517)	(24.872)
Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD II sejumlah 3.102.193.089 saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 dan harga pelaksanaan Rp 140 per saham	310.219	111.059	-	-	-	421.278
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 setelah pelaksanaan PMHMETD II	568.735	121.492	(1.013)	1.000	170.440	860.654

* Tambahan modal disetor dikurangi biaya emisi sehubungan dengan PMHMETD II sebesar Rp 13.029 juta

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2018 (tidak diaudit):

Perubahan ekuitas seandainya PMHMETD II sebanyak 3.102.193.089 (tiga miliar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp140 (seratus empat puluh Rupiah). Terjadi pada tanggal 30 September 2018, maka proforma ekuitas sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas Bersih
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Desember 2017 dengan nilai nominal Rp 100 per saham	258.516	10.433	(559)	900	194.958	464.248
Rugi komprehensif setelah pajak (tidak diaudit)			(592)	100	(171.369)	(171.861)
Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD II sejumlah 3.102.193.089 saham terjadi pada tanggal 30 September 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 dan harga pelaksanaan Rp 140 per saham	310.219	111.059	-	-	-	421.278
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2018 setelah pelaksanaan PMHMETD II	568.735	121.492	(1.151)	1.000	23.589	713.665

* Tambahan modal disetor dikurangi biaya emisi sehubungan dengan PMHMETD II sebesar Rp 13.029 juta

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham WNA akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham WNA dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2018 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20% dari Laba Bersih setelah pajak.

Riwayat Pembayaran Dividen

Dengan memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, maka sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen sesuai keputusan RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan
2. bagi Perseroan Terbatas, badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan sebagai Objek dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan pasal 17.2 Undang-Undang No.36 tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh pasal 4 (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD II INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

PERPAJAKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah utang pajak perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Utang Pajak	(Dalam jutaan Rupiah)
Pasal penghasilan badan	-
Pasal 21	573
Pasal 23/26	31
Pasal 25	39
Pasal 4 (2)	44
Pajak Pertambahan Nilai	1
Jumlah utang pajak	688

Perseroan tidak memiliki utang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA/ CALON PENGENDALI BARU PERSEROAN

Keterangan Tentang Pembeli Siaga/Calon Pengendali Baru Perseroan

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Verena Multi Finance Tbk., oleh Pembeli Siaga IBJL No. 24 Tanggal 10 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Dina Choize S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana di ubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham oleh Pembeli Siaga yaitu IBJ Leasing Company, Limited Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Verena Multi Finance Tbk., oleh Pembeli Siaga IBJL No. 27 tanggal 22 November 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

IBJL telah menyatakan kesanggupannya sebagai Pembeli Siaga untuk membeli saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan pemegang saham lainnya dalam PMHMETD II ini.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan dan pemegang HMETD, maka seluruh sisa saham tersebut wajib dibeli oleh IBJL selaku Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan dalam PMHMETD II sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Apabila IBJL selaku Pembeli Siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, maka kepemilikan IBJL pada Perseroan akan menjadi lebih besar dari pada 50% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-207/NB.11/2018, tanggal 23 November 2018 tentang Permohonan Persetujuan Atas Pencalonan calon Pihak Utama PT Verena Multi Finance, Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-128/NB.1/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Persetujuan Atas Rencana Perubahan Pemegang Saham Pengendali (Pengambilalihan) PT Verena Multi Finance Tbk, Salinan Keputusan Anggota Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-1126/NB.11/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Verena Multi Finance Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT IBJ Verena Finance, dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-45/D.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Persetujuan Atas Rencana Perubahan Pemegang Saham Pengendali (Pengambilalihan) PT IBJ Verena Finance.

Riwayat Singkat

IBJL didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Jepang yang beralamat terdaftar di 2-6, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Jepang.

IBJL didirikan sebagai perusahaan pembiayaan yang diprakarsai oleh The Industrial Bank of Japan, Ltd. (sekarang Mizuho Bank, Ltd.) dengan partisipasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mewakili industri Jepang. Grup IBJL, secara pro-aktif mengembangkan bisnisnya pada bidang pembiayaan barang modal dan penjualan secara angsuran (*leasing & installment sales*), pembiayaan atas barang (*financing of physical items*), beroperasi sebagai bagian dari grup di bidang jasa keuangan yang mempunyai berbagai sumber pendanaan dan yang menyediakan beragam jasa pada klien-klien korporasi Jepang maupun di luar Jepang. Selain memberikan pembiayaan terhadap belanja modal, termasuk peralatan industri dan pabrik, perangkat informasi dan komunikasi dan peralatan kesehatan, IBJL juga mengembangkan cakupan kegiatan bisnisnya dengan menawarkan penyelesaian yang lebih luas yang dapat memenuhi kebutuhan klien yang semakin beragam, melalui jangkauan yang sangat luas di sektor keuangan dan juga melalui kegiatan merger dan akuisisi. Grup IBJL terdiri dari IBJL, 26 anak perusahaan yang terkonsolidasi dan 3 perusahaan afiliasi.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha IBJL ialah bergerak dalam jasa pembiayaan terintegrasi. Kegiatan usaha yang dijalankan adalah melakukan (i) penyewaan, penjualan dan pembelian alat-alat atau mesin-mesin untuk keperluan industri, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, administrasi, medis dan komersil, (ii) penyewaan, penjualan dan pembelian hak-hak tidak berwujud seperti hak cipta, paten, dan desain industri, (iii) penyewaan, penjualan dan pembelian, perantara perdagangan dan pengelolaan perumahan, (iv) usaha pembiayaan, (v) kegiatan usaha berkaitan dengan permintaan atau permohonan asuransi jiwa, (vi) agen asuransi (kecuali asuransi jiwa), (vii) kegiatan usaha pembiayaan tipe 2, antara lain melakukan penawaran terbatas atas efek dan transaksi *derivative*), (viii) perantara perdagangan instrumen keuangan, (ix) agen penagih hutang, (x) pengolahan dan penyediaan berbagai jenis informasi, (xi) segala kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimaksud dalam poin (i) sampai (x).

Komposisi Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pemegang saham IBJL terdiri dari institusi finansial, perusahaan domestik, investor asing, perorangan dan penyelenggaraan instrumen finansial, dengan kepemilikan masing-masing 41,1%, 29,6%, 14,3%, 13,1% dan 1,9%.

Berikut adalah 10 pemegang saham terbanyak di IBJL. Saham IBJL tercatat pada *Tokyo Stock Exchange, 1st section*.

Pemegang Saham	Jumlah Ekuitas	(%)
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited	2,930,000	6,87
NISSAN MOTOR CO.,LTD. Retirement Benefit Trust Account, with the trustee being Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd. and re-trustee Trust & Custody Services Bank, Ltd.	1,750,000	4,10
Mizuho Bank, Ltd.	1,626,400	3,81
UNIZO Holdings Company, Limited	1,546,000	3,62
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	1.393.100	3,26
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	1,251,700	2,93
DOWA HOLDINGS Co., Ltd.	1,120,000	2,62
Nippon Steel Kowa Real Estate Co. Ltd.	975,000	2,28
The Kyoritsu Co. Ltd.	949,000	2,22
Japan Trustee Services Bank Ltd. (TOSHIBA CORPORATION Retirement Benefit Trust Account re-entrusted by the Mitsui Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd.)	900,000	2,11

Pengelolaan dan Pengawasan

Berikut ini adalah susunan pengurus IBJL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:

President & Chief Executive Officer	: Hiroshi Motoyama
Deputy President	: Katsuji Nagatsu
Senior Managing Director	: Shin Kuranaka
Managing Director	: Shinichiro Maruyama
Managing Director	: Masaya Hamamoto
Managing Director	: Akira Ueda
Outside Director	: Takao Komine
Outside Director	: Masatoshi Kiriya
Outside Director	: Yasuyuki Sugiura

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini disajikan ikhtisar keuangan data keuangan penting IBJL berdasarkan laporan keuangan IBJL.

(dalam jutaan Yen)

Uraian	30 Juni 2018	31 Maret 2017 (diaudit)	31 Maret 2016 (diaudit)
Total Aset	1.953.072	1.752.284	1.718.720
Total Liabilitas	1.797.480	1.610.529	1.585.933
Total Ekuitas	155.591	141.755	132.786

Sifat hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Perseroan tidak memiliki sifat hubungan afiliasi dengan IBJL, kecuali pada saat Prospektus ini diterbitkan IBJL adalah pemilik 19,99% saham Perseroan yang telah membelinya dari DEG, dan setelah selesai PMHMETD II, IBJL akan menjadi pemegang saham pengendali Perseroan.

Sumber Dana IBJL sebagai Pembeli Siaga / Calon Pengendali Baru Perseroan

Sebagai Pembeli Siaga/Calon Pengendali Baru Perseroan, sumber dana IBJL berasal dari dana internal IBJL.

Uraian Tentang Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham

1. Perseroan akan melakukan PMHMETD II yang ditawarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing Pemegang Saham dengan jumlah sebanyak 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
2. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada

pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

3. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II tidak seluruhnya diambil bagian oleh para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada para Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam FPPS dan FPPS Tambahan berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
4. Apabila setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, tersebut masih terdapat Sisa Saham, maka Sisa Saham tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga, yang berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh saham yang tidak terjual. Pembeli Siaga menyatakan kesanggupannya untuk membeli seluruh Sisa Saham tersebut dengan Harga Pelaksanaan dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama.
5. Perseroan berkewajiban dan dengan ini setuju serta berjanji bahwa pada Tanggal Penjatahan selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, Perseroan melalui BAE akan (i) memberitahukan secara tertulis dengan Pemberitahuan Tertulis kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah Sisa Saham yang wajib dibeli Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, dan setelah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pembeli Siaga, Perseroan akan menerbitkan dan mendistribusikan Sisa Saham kepada Pembeli Siaga dan (ii) memberi konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga setelah pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam poin (i) di atas.
6. Perseroan setuju untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelian Sisa Saham oleh Pembeli Siaga, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dan ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan BEI di mana saham-saham Perseroan tercatat.
7. Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan seluruh Sisa Saham dikalikan dengan jumlah Harga Pelaksanaan yang wajib disetor ke dalam rekening Perseroan di bank yang di tentukan dalam Prospektus, yang sudah harus di terima dengan baik (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran.
8. Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian Sisa Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham tergantung pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini:
 - a. Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
 - b. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan ijin yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk menerbitkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD II;
 - c. Perseroan tidak melanggar atau tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham;
 - d. Masing-masing syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah dipenuhi sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
9. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Semua kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah dipenuhi dengan benar;
 - b. Seluruh persyaratan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan perjanjian bersyarat dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham tidak terpenuhi; atau
 - c. Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD II, yaitu tanggal 31 Desember 2018.
10. Sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Perjanjian Pembelian Sisa Saham dapat diakhiri oleh Pembeli Siaga apabila terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Jika pernyataan, janji dan jaminan Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham (termasuk berdasarkan surat komitmen) tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan atau dilanggar atau tidak dipenuhi;
 - b. Jika terjadi pelanggaran material atas kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham (termasuk berdasarkan surat komitmen); atau
 - c. Jika setelah tanggal Perjanjian Pembelian Sisa Saham, selain sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus, sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang terakhir diaudit untuk keperluan PMHMETD II, terjadi suatu perubahan terhadap manajemen, keadaan keuangan, kegiatan operasional, likuiditas, kewajiban, harta kekayaan atau kelanjutan usaha Perseroan, yang mana menurut penilaian Pembeli Siaga setelah berkonsultasi dengan Perseroan adalah bersifat sangat material dan berdampak merugikan terhadap pelaksanaan PMHMETD II.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

1. AUDITOR INDEPENDEN

SATRIO BING ENY & REKAN (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*)

The Plaza Office Tower 32nd Floor

Jl. M.H Thamrin Kav 28-30

Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (021) 29923100

Faksimili: (021) 29928200 / 29928300

STTD Nomor : STTD.AP-157/PM.22/2018 atas nama Muhammad Irfan

Surat Penunjukkan Nomor : 120B/VMF/XVI/V/18 Tanggal 31 Mei 2018

Pedoman Kerja: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan No. VIII.A.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD II ini adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor memper timbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Jl. H.R Rasuna Said Kav 1 – 2 BI X – 1

Graha Rama Lt.6 – C

Jakarta 12950.

Telepon : (021) 5297304 - 6

Faksimili: (021) 5261136

STTD Nomor : 02/STID-N/PM/1996 Tanggal 12 Februari 1996

Anggota Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia nomor 011.003.027.260958

Surat Penunjukkan Nomor: 120C/VMF/XVI/18 Tanggal 31 Mei 2018

Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD II ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD II dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut dengan mengacu pada peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

3. KONSULTAN HUKUM

Lasut Lay & Pane

Jl. Hang Tuah Raya No. 29

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120

Nomor STTD: 57/STTD-KH/PM/1994 atas nama Marjan E. Pane

Tanggal STTD: 20 April 1994

Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: 93007

Surat Penunjukkan Nomor: 120A/VMF/XVI/VI/18 Tanggal 31 Mei 2018

Tugas Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD II ini adalah memberikan Pendapat Hukum, melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukan.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48

Jakarta 12930. Indonesia

Telepon : 021 – 2525666

Fax : 021 – 2525028

Ijin Usaha: No. Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991

Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

No.Anggota: ABI/IV/2011 - 004 tanggal 6 April 2011

Surat Penunjukkan: No. 120D/VMF/XVI/VI/18 Tanggal 31 Mei 2018

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD II ini antara lain menentukan DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di (KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham. Pedoman kerja BAE mengacu pada kode etik Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Verena Multi Finance Tbk., No.25 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Dina Choize S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana di ubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Elek Terlebih Dahulu II PT Verena Multi Finance Tbk., No.28 tanggal 22 November 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 120 (seratus dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan POJK No. 32/2015, bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memiliki saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 11 Januari 2019.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu 14 Januari 2019.
- b) Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 15 Januari 2019. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/ Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui

sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/ Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para Pemegang saham baik Indonesia maupun non - Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl.Jend. Sudirman Kav.47-48
Jakarta 12930
Telepon : 021 – 2525666

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/ Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.

Jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 15 Januari 2019 hingga 21 Januari 2019 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat, Jam 09.00 -15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 23 Januari 2019, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdattar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII. G.12, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan atau transfer dengan mencatumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Bank Panin
KCU Pecenongan, Jakarta Pusat
No. Rekening : 124 5 011 895
Atas nama : PT Verena Multi Finance

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima, bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Januari 2019. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG / transfer ataupun pemindah bukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 25 Januari 2019.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

10. Penyerahan saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas

pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, IBJL akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II Perseroan wajib membeli seluruh sisa saham dalam PMHMETD II Perseroan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan tersedia untuk para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.00 WIB di BAE dan Kantor Pusat Perseroan.

Biro Administrasi Efek:
PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral Lantai 2.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telepon : 021 – 252666
Fax : 021 – 2525028

Kantor Pusat:
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84
Jakarta Pusat 10120
Telp: 021 – 350 4890
Fax: 021 – 350 4891

Apabila sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 11 Januari 2019 belum menerima atau mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE atau Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE atau Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT VERENA MULTI FINCANCE Tbk

GEDUNG BANK PANIN LT. 3

Jl. Pecenongan Raya No. 84

Jakarta Pusat 10120

Telp: 021 – 350 4890

Fax: 021 – 350 4891

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lantai 2.

Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48

Jakarta 12930

Telepon : 021 – 252666

Fax : 021 – 2525028